



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

Jl. Hibrida XV NO. 81 Kel. Sidomulyo, Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595
BENGKULU Kode Pos 38229



KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

NOMOR : 73 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penatausahaan keuangan, diperlukan penyusunan kebijakan akuntansi;
- b. bahwa Direktur perlu Menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanan;
- c. bahwa kebijakan akuntansi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan dan biaya;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud poin a, b, c, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu tentang Kebijakan Akuntansi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kepegawaian BUMD Air Minum;
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
4. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor. 262 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu;
5. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 18 Tahun 2025 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu;
6. Peraturan Perusahaanaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU.
- Kesatu : Kebijakan Akuntansi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagaimana dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Akuntansi sebagaimana pada diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku untuk Laporan Keuangan Tahun 2025 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 25 November 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU
PLT. DIREKTUR,


MEDY PEBRIANSYAH, S.STP.,M.Si

Tembusan Yth :

1. Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu
2. Kepala S P I PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu
3. Seluruh Kepala Bagian dilingkungan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
4. Arsip.

Kebijakan Akuntansi Keuangan **ENTITAS PRIVAT**

Perumda Tirta Hidayah
Kota Bengkulu

Kata Sambutan

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya rangkaian Buku Kebijakan Akuntansi Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah ini dapat kami wujudkan. Buku ini memberikan gambaran umum, penjelasan, dan prosedur yang harus dilakukan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP).

Dengan kehadiran buku ini, diharapkan Perumda Tirta Hidayah memiliki kebijakan akuntansi keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sesuai dengan SAK-EP. Akhir kata, semoga buku ini memberikan pedoman bagi para pejabat dan pelaksana perusahaan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Bengkulu, November 2025

Perumda Tirta Hidayah

Plt. Direktur



Medy Pebriansyah, S.STP., M.Si.

DAFTAR ISI

BAB I	AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN	1
1.1	Pendahuluan	1
1.2	Definisi	1
	1) Aset	1
	2) Liabilitas	2
	3) Ekuitas	2
	4) Penghasilan	2
	5) Beban	3
1.3	Standar Akuntansi Yang Berlaku di Indonesia	3
1.4	Latar Belakang Perubahan SAK ETAP ke SAK EP	3
	1) Evolusi Standar Akuntansi di Indonesia	3
	2) Perkembangan dan Kebutuhan	4
	3) Kelemahan SAK ETAP	4
	4) Pengembangan SAK Entitas Privat	4
	5) Implementasi dan Dampak.....	5
BAB II	KERANGKA KONSEPTUAL DAN PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN KEUANGAN	6
2.1	Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan	6
2.2	Kerangka Konseptual Laporan Keuangan	6
	1) Asumsi Entitas Berkelanjutan (<i>Going Concern</i>)	6
	2) Asumsi Dasar Akuntansi Akrua (<i>Accrual Basic</i>)	7
	3) Asumsi Konsistensi (<i>Consistency</i>)	7
	4) Asumsi Kesiambungan (<i>Continuity</i>)	7
	5) Asumsi Entitas Ekonomi (<i>Economic Entity</i>)	8
	6) Asumsi Penilaian Historis (<i>Historical Cost</i>)	8
	7) Asumsi Materialitas (<i>Materiality</i>)	8
	8) Asumsi Kewajaran (<i>Fair Presentation</i>)	8
2.3	Komponen Laporan Keuangan	9
2.4	Tanggung Jawab Laporan Keuangan	9
2.5	Karakteristik Kualitatif Laporan Kuangan	9
	1) Relevan	9
	2) Materialitas	10
	3) Keandalan	10
	4) Dapat Dipahami	10
	5) Disajikan Dengan Jujur	10
	6) Netral	10
	7) Disusun Dengan Pertimbangan Yang Sehat	10
	8) Penyajian Informasi Lengkap	11
	9) Dapat Dibandingkan	11
	10) Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
2.6	Prinsip – prinsip Pelaporan Keuangan	12
	1) Dasar Akrua	12
	2) Periode Laporan	12
	3) Saling Hapus (<i>Offsetting</i>)	12
	4) Konsistensi Penyajian	12
	5) Informasi Komparatif	13
2.7	Laporan Keuangan Interim	13

2.8	Laporan Konsolidasi	13
2.9	Informasi Komparatif	14
BAB III	SIKLUS AKUNTANSI	15
3.1	Pendahuluan	15
3.2	Terminologi Dasar Proses Akuntansi	15
3.3	Persamaan Akuntansi	18
3.4	Arus Jaringan Data Menjadi Laporan Keuangan	19
3.5	Siklus Akuntansi	19
BAB IV	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	22
4.1	Laporan Posisi Keuangan	22
	1) Aset	22
	1.1) Aset Lancar	22
	a. Kas dan Setara Kas	23
	b. Piutang Usaha	23
	c. Piutang Lain-lain	23
	d. Persediaan	23
	e. Pajak Dibayar Dimuka	24
	f. Beban Dibayar Dimuka	24
	g. Aset Lancar Lain-lain	24
	1.2) Aset Tidak Lancar	25
	a. Piutang Hubungan Istimewa	25
	b. Aset Pajak Tangguhan	25
	c. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi	25
	d. Investasi Jangka Panjang Lainnya	25
	1.3) Aset Tetap	26
	a. Pemilikan Langsung	26
	b. Aset Guna Usaha	27
	c. Aset Dalam Penyelesaian	27
	d. Aset Kerjasama Operasi (KSO)	27
	1.4) Aset Tak Berwujud	27
	1.5) Aset Lain-lain	28
	2) Liabilitas	28
	2.1) Liabilitas Lancar	28
	a. Utang Usaha	29
	b. Utang Pajak	29
	c. Pinjaman Jangka Panjang	29
	d. Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	29
	e. Beban Masih Harus Dibayar	29
	f. Liabilitas Lancar Lain-lain	29
	2.2) Liabilitas Tidak Lancar	29
	a. Utang Hubungan Istimewa	30
	b. Liabilitas Pajak Tangguhan	30
	c. Pinjaman Jangka Panjang	30
	d. Utang Sewa Guna Usaha	30
	e. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	30
	3) Hak Minoritas	31

4)	Ekuitas	31
a.	Modal Saham	31
b.	Tambahan Modal Disetor (<i>Additional Paid In Capital</i>)	31
c.	Perubahan Transaksi Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi ..	31
d.	Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	31
e.	Cadangan Umum	32
f.	Cadangan Bertujuan	32
g.	Saldo Laba	32
4.2	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	32
1)	Pendapatan Usaha	32
2)	Beban Pokok Penjualan	32
3)	Beban Usaha	33
4)	Pendapatan Lain-lain	33
5)	Beban Lain-lain	34
6)	Beban Keuangan	35
7)	Beban Pajak Penghasilan Kini	35
8)	Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	35
9)	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan Dari Operasi	35
4.3	Laporan Perubahan Ekuitas	36
4.4	Laporan Arus Kas.....	36
a.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	37
b.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	37
c.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	37
4.5	Catatan Atas Laporan Keuangan	37
BAB V	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN	40
5.1	Perubahan Kebijakan Akuntansi	40
5.2	Perubahan Estimasi Akuntansi	40
5.3	Kesalahan Mendasar	40
BAB VI	KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN AKUN-AKUN PELAPORAN	41
6.1	Kebijakan Akuntansi Akun-Akun Laporan Posisi Keuangan	41
1.	Kas Dan Setara Kas	41
2.	Investasi Jangka Pendek	42
3.	Piutang Usaha	43
4.	Penurunan Nilai Piutang Usaha	45
5.	Piutang Lain-lain	48
6.	Persediaan	49
7.	Uang Muka Dan Biaya Dibayar Dimuka	51
1)	Uang Muka	51
2)	Biaya Dibayar Dimuka	52
8.	Pajak Dibayar Dimuka	53
9.	Aset Lancar Lainnya	54
10.	Investasi Pada Entitas Asosiasi	55
11.	Investasi Pada Ventura Bersama	57
12.	Properti Investasi	59
13.	Aset Tetap	60
14.	Akuntansi Pada Model Revaluasi Aset Tetap	64

	15. Aset Pajak Tangguhan	66
	16. Aset Tidak Berwujud selain <i>Goodwill</i>	67
	17. Kombinasi Bisnis dan <i>Goodwill</i>	69
	18. Sewa	71
	19. Provisi dan Kontijensi	72
	20. Aset Tidak Lancar Lainnya	74
	21. Utang Usaha	75
	22. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	76
	23. Utang Sewa Guna Usaha	78
	24. Utang Pajak	79
	25. Biaya Masih Harus Dibayar	81
	26. Hibah Pemerintah	82
	27. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	83
	28. Liabilitas Pajak Tangguhan	85
	29. Penyertaan Pemerintah Daerah	86
	30. Saldo Laba	87
	31. Kepentingan Non Pengendali	88
6.2	Kebijakan Akuntansi Akun-akun Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	88
	1. Pendapatan	88
	2. Beban	89
	3. Biaya Keuangan	91
	4. Pajak Penghasilan Kini	92
	5. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	94
	6. Penghasilan Komprehensif Lainnya	95
	7. Laba Per Saham	97
BAB VII	KODE AKUN / PERKIRAAN AKUNTANSI	100
7.1	Sistematika Penomoran Kode Akun / Perkiraan	100
7.2	Media Pencatatan	100
	1. Jurnal	100
	2. Buku Besar	101
	3. Buku Pembantu	101
7.3	Kode Perkiraan Akuntansi Laporan Posisi Keuangan	102
BAB VIII	PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI AKUNTANSI	126
8.1	Akuntansi Persediaan	126
	a) Metode Periodik	126
	b) Metode Perpetual	127
8.2	Akuntansi Investasi Entitas Asosiasi	129
8.3	Akuntansi Properti Investasi	131
	a) Model Nilai Wajar	132
	b) Model Biaya	132
8.4	Akuntansi Aset Tetap dan Depresiasi	132
8.5	Akuntansi Tanah	138
8.6	Akuntansi Aset Tak Berwujud	139
8.7	Akuntansi Biaya Pinjaman	140
8.8	Akuntansi Sewa	141
8.9	Akuntansi Provisi	143

8.10	Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas	143
8.11	Akuntansi Pendapatan	144
	1) Pencatatan Transaksi Piutang Air	145
	2) Pencatatan Pelunasan Piutang Air Loker Kantor	145
	3) Pencatatan Pelunasan Piutang Air Loker Bank	146
	4) Pencatatan Koreksi Pemakaian Air	147
	5) Pencatatan Penghapusan Piutang Air	148
	6) Pencatatan Penerimaan Piutang Yang Telah Dihapuskan	149
	7) Pencatatan Keterlambatan Pelunasan Piutang	149
	8) Pencatatan Penyisihan Kerugian Piutang Usaha Pelanggan Masih Aktif	150
	9) Pendapatan Pemasangan Sambungan Baru	152
	10) Beban Harga Pokok Penjualan Sambungan Baru	153
8.12	Akuntansi Hibah Pemerintahan	153
8.13	Akuntansi Imbalan Kerja	154
8.14	Akuntansi Pajak Penghasilan	160
8.15	Akuntansi Penyertaan Pemerintah	163
8.16	Akuntansi Pembagian Laba	164
BAB IX	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	168
9.1	Bentuk Laporan Keuangan	169
BAB X	LAPORAN MANAJEMEN DIREKSI DAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS	199
10.1	Landasan Hukum	175
10.2	Laporan Manajemen Direksi	175
10.3	Laporan Dewan Pengawas	178

BAB I

AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

I.1 Pendahuluan

Pedoman ini merupakan pedoman penyajian Laporan Keuangan secara umum, sehingga bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian Laporan Keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim. Laporan Keuangan dalam pedoman ini sesuai dengan pengertian Laporan Keuangan yang termuat dalam SAK EP yang diterbitkan oleh IAI, meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

1.2 Definisi

1) Aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi untuk memberikan sumbangan, baik langsung, maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Secara umum, aset dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Suatu aset dikelompokkan dalam aset lancar jika:

- diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal;
- dimiliki untuk diperdagangkan;
- diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;
- berupa kas atau setara kas.

Perusahaan mengelompokkan semua aset lainnya sebagai aset tidak lancar. Ditinjau dari sifat fisiknya, aset dapat pula dikelompokkan sebagai aset berwujud dan aset tidak berwujud.

Aset berwujud yaitu aset yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya: persediaan, bangunan dan kendaraan.

Sedangkan Aset Tidak Berwujud adalah aktiva yang secara fisik tidak dapat dilihat. Contohnya adalah : hak cipta, paten, *goodwill*.

Aset disajikan di Laporan Posisi Keuangan (neraca) berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu mulai dari aset yang likuiditasnya paling tinggi kemudian diikuti dengan aset yang likuiditasnya semakin rendah. Likuiditas di sini maksudnya adalah kemampuan aset tersebut untuk dapat segera dicairkan menjadi uang atau kas.

2) Liabilitas

Karakteristik dari suatu liabilitas adalah bahwa perusahaan memiliki liabilitas masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa atau konversi liabilitas menjadi ekuitas.

Liabilitas dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek jika:

- diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan;
- dimiliki untuk diperdagangkan;
- liabilitas akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;
- perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan. ekuitas merupakan hak residual atas aset setelah dikurangi liabilitas.

4) Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal.

Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti dan sewa.

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan.

5) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemilik modal.

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa meliputi misalnya beban pokok penjualan, upah dan depresiasi. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

1.3 Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia

Pada saat ini di Indonesia berlaku 4 (empat) Standar Akuntansi untuk Akuntansi Keuangan, yaitu:

- a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut SAK Umum untuk entitas berakuntabilitas publik secara signifikan;
- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP);
- c. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM);
- d. Standar Akuntansi Syariah Khusus untuk transaksi syariah.

Dengan memperhatikan kondisi dan mengantisipasi kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan lebih komprehensif dari SAK ETAP, DSAK IAI mengesahkan SAK EP yang mengacu *IFRS for SMEs* versi 2015 pada tanggal 30 Juni 2021. SAK EP berlaku efektif 1 Januari 2025.

1. 4 Latar Belakang Perubahan SAK ETAP ke SAK EP

Latar belakang perubahan SAK ETAP menjadi SAK EP, sebagai berikut:

1) Evolusi Standar Akuntansi di Indonesia

- SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pertama kali diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun

2009. SAK ETAP dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal selain kreditor.

- Standar ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum, yang lebih kompleks dan diperuntukkan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik.

2) Perkembangan dan Kebutuhan

- Seiring waktu, terdapat perubahan dan perkembangan dalam praktik akuntansi internasional dan nasional. Banyak negara mulai mengadopsi standar yang lebih modern dan relevan untuk entitas privat.
- Dalam konteks global, *International Financial Reporting Standards (IFRS)* terus berkembang, dan banyak negara menyesuaikan standar akuntansi mereka agar sejalan dengan IFRS. Hal ini juga mempengaruhi pandangan terhadap SAK ETAP, yang mulai dianggap kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan akuntansi entitas privat di era yang terus berubah.

3) Kelemahan SAK ETAP

- SAK ETAP dianggap terlalu sederhana dan tidak cukup komprehensif untuk beberapa entitas privat yang memiliki transaksi lebih kompleks.
- Kurangnya harmonisasi dengan *IFRS for SMEs (Small and Medium-sized Entities)*, yang sudah diadopsi di banyak negara, membuat SAK ETAP perlu diperbarui agar lebih relevan dan bermanfaat bagi entitas privat.

4) Pengembangan SAK Entitas Privat

- Untuk menjawab kebutuhan tersebut, IAI mengembangkan SAK Entitas Privat sebagai pengganti SAK ETAP. SAK Entitas Privat dirancang untuk lebih sejalan dengan *IFRS for SMEs*, namun tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal.
- Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan standar yang lebih relevan, mudah dipahami, dan diterapkan oleh entitas privat, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, termasuk kreditor, investor, dan pihak lain yang berkepentingan.

5) Implementasi dan Dampak

- Implementasi SAK Entitas Privat diharapkan akan membawa dampak positif, seperti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan entitas privat di Indonesia dan meningkatkan daya saing entitas privat di pasar global.
- Adopsi standar baru ini juga diharapkan akan memudahkan entitas privat dalam mengakses pembiayaan dan investasi, karena laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan.

Penggantian SAK ETAP dengan SAK Entitas Privat merupakan langkah signifikan dalam upaya modernisasi standar akuntansi di Indonesia, agar lebih relevan dengan perkembangan global dan kebutuhan lokal entitas privat.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN KEUANGAN

2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

FASB (Financial Accounting Standards Boards) memberikan pengertian tentang kerangka konseptual sebagai suatu sistem pemahaman tentang beberapa tujuan dan landasan terpadu yang mampu merintis standar yang konsisten. Menjelaskan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka Konseptual Laporan Keuangan berisi konsep-konsep dasar yang melandasi penyusunan Standar Akuntansi Keuangan. Kerangka Konseptual bukan merupakan Standar Akuntansi Keuangan, dalam praktik yang harus diutamakan adalah Standar Akuntansi Keuangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan (arus kas) suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomis.

2.2 Kerangka Konseptual Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipatuhi agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pengguna. Berikut adalah asumsi-asumsi utama yang biasanya diterapkan:

1) Asumsi Entitas Berkelanjutan (*Going Concern*)

Pengertian:

Asumsi Entitas Berkelanjutan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas dan tidak berniat atau tidak terpaksa untuk menghentikan operasionalnya dalam waktu dekat.

Implikasi:

- Aset dan kewajiban diukur dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan akan terus beroperasi, sehingga tidak perlu dilakukan penilaian likuidasi;
- Kewajiban jangka panjang dan aset berjangka panjang dilaporkan dengan asumsi bahwa perusahaan akan dapat memenuhi kewajiban dan memanfaatkan aset tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

2) Asumsi Dasar Akuntansi Akrual (*Accrual Basic*)

Pengertian:

Asumsi akrual mengharuskan bahwa pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Ini berarti pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi, meskipun kas mungkin belum berpindah tangan.

Implikasi:

- Pendapatan dan beban dicatat pada periode akuntansi pada saat terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayar;
- Memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan pada periode tersebut.

3) Asumsi Konsistensi (*Consistency*)

Pengertian:

Asumsi konsistensi mengharuskan perusahaan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten dari periode ke periode, kecuali jika perubahan kebijakan diperlukan dan dijelaskan dengan jelas.

Asumsi:

Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi memungkinkan perbandingan laporan keuangan dari waktu ke waktu, memberikan informasi yang lebih dapat diandalkan bagi para pengguna.

4) Asumsi Kesenambungan (*Continuity*)

Pengertian:

Asumsi berkesinambungan merujuk pada pengakuan bahwa perusahaan akan melanjutkan operasinya dalam waktu yang tidak terbatas, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa perusahaan akan menghadapi penutupan atau likuidasi.

Implikasi:

- Aset dan kewajiban dilaporkan berdasarkan nilai historis dan tidak perlu disesuaikan untuk nilai likuidasi;
- Biaya dan pendapatan diakui dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu dekat.

5) Asumsi Entitas Ekonomi (*Economic Entity*)

Pengertian:

Asumsi entitas ekonomi menyatakan bahwa transaksi dan kegiatan harus dipisahkan dari transaksi pribadi pemilik atau entitas lain.

Implikasi:

Laporan keuangan perusahaan hanya mencakup transaksi yang terkait dengan kegiatan perusahaan itu sendiri, tanpa mencampur adukkan dengan transaksi pribadi pemilik atau pihak lain.

6) Asumsi Penilaian Historis (*Historical Cost*)

Pengertian:

Asumsi penilaian historis mengharuskan bahwa aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya perolehan asli pada saat transaksi terjadi.

Implikasi:

Aset dicatat pada nilai historisnya, dan tidak disesuaikan untuk perubahan nilai pasar atau inflasi, kecuali jika ada standar akuntansi yang memperbolehkan penilaian ulang atau pengukuran nilai wajar.

7) Asumsi Materialitas (*Materiality*)

Pengertian:

Asumsi materialitas menyatakan bahwa informasi yang relevan dan signifikan harus diungkapkan dalam laporan keuangan, sedangkan informasi yang tidak signifikan atau material dapat diabaikan.

Implikasi:

Pengungkapan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya informasi bagi pengguna laporan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak terlalu membebani dengan detail yang tidak relevan.

8) Asumsi Kewajaran (*Fair Presentation*)

Pengertian:

Asumsi kewajaran mengharuskan laporan keuangan untuk disajikan dengan cara yang wajar dan tidak menyesatkan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Implikasi:

Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan secara akurat, tanpa menyembunyikan informasi penting atau memberikan gambaran yang menyesatkan.

2.3 Komponen Laporan Keuangan

Untuk mencapai tujuan di atas laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan dan informasi penjelasan lain yang berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;
- f. Laporan posisi keuangan pada akhir periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang restropektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.4 Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan dan manajemen entitas anak perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami pembaca, isi informasi harus berpedoman pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP), laporan keuangan haruslah memenuhi beberapa karakteristik berikut:

1) Relevan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan haruslah relevan dengan kebutuhan penggunaannya untuk bisa dijadikan dasar proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, karakteristik laporan keuangan berisi evaluasi mengenai tiap transaksi bisnis selama periode akuntansi.

2) Materialitas

Salah satu karakteristik laporan keuangan berdasarkan SAK-EP adalah materialitas artinya besarnya nilai informasi akuntansi yang jika salah saji atau hilang, mungkin dapat mengubah dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

3) Keandalan

Informasi pada laporan keuangan haruslah berkualitas andal, dalam arti tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan material, serta menyajikan hal yang tulus dan jujur. Untuk itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan peraturan yang baku.

4) Dapat Dipahami

Karakteristik laporan keuangan yang baik selanjutnya adalah dapat dipahami. Pastinya, laporan keuangan yang sulit dimengerti pengguna akan menghambat proses pengambilan keputusan. Untuk itu, semua informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunanya, tidak hanya pihak manajemen saja.

Meskipun begitu, pengguna diasumsikan mempunyai ilmu yang memadai mengenai kegiatan serta lingkungan operasi entitas pelaporan. Selain itu, pengguna juga diharapkan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Dengan membuat laporan keuangan yang bisa dipahami, maka manfaat pembuatannya tercapai karena dapat membantu proses pengambilan keputusan.

5) Disajikan Dengan Jujur

Informasi dalam laporan keuangan yang tidak disajikan dengan jujur tentunya akan menghasilkan risiko atau dampak negatif. Oleh karena itu, penyajian secara jujur merupakan salah satu karakteristik laporan keuangan yang harus diterapkan.

6) Netral

Karakteristik laporan keuangan yang harus diterapkan selanjutnya adalah netralitas informasi di dalamnya. Karena laporan keuangan dibuat untuk kebutuhan umum, maka informasi yang ada di dalamnya tidak boleh berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

7) Disusun Dengan Pertimbangan Yang Sehat

Informasi dalam laporan keuangan harus disusun dengan pertimbangan yang sehat dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, informasi di dalamnya harus

memiliki manfaat untuk menghadapi adanya suatu kondisi tertentu atau ketidakpastian ekonomi, seperti ketertagihan piutang yang diragukan. Jadi, aset atau pendapatan yang ditetapkan dalam laporan keuangan tidak ditulis terlalu tinggi. Selain itu, kewajiban juga tidak dibuat terlalu rendah. Meskipun begitu, penggunaan pertimbangan yang sehat juga bukan berarti memperbolehkan penetapan aset atau pendapatan terlalu rendah dan kewajiban terlampau tinggi. Sebab jika begitu, informasi dalam laporan keuangan nantinya menjadi tidak netral dan tidak dapat diandalkan.

8) Penyajian Informasi Lengkap

Karakteristik laporan keuangan haruslah berisi informasi yang lengkap, mencakup harta, utang, modal, pendapatan, kewajiban, serta beban perusahaan. jika informasi dalam laporan keuangan disajikan secara lengkap, maka isinya pun dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang penting. Informasi yang sekiranya akan dibutuhkan pengguna ataupun pembaca laporan keuangan bisa diletakkan pada bagian depan atau catatan.

9) Dapat Dibandingkan

Agar bisa mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, salah satu karakteristik laporan keuangan untuk dipenuhi adalah isinya yang dapat dibandingkan dengan entitas pelaporan lain pada umumnya. Oleh karena itu pedoman, sistem, serta kebijakan prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan haruslah sama.

Kebijakan prinsip dasar akuntansi bisa saja mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut haruslah lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan. Selain itu, laporan keuangan perlu disajikan dalam dua periode.

10) Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Karakteristik laporan keuangan yang baik terakhir adalah substansi mengungguli bentuk formal. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, substansi mengungguli bentuk formal berarti laporan keuangan disajikan dengan memuat informasi atau peristiwa yang wajar sesuai substansi dan realitas ekonomi.

Jika ada penyajian informasi yang inkonsisten atau tidak sama dengan aspek formalitasnya, maka hal itu perlu diutarakan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

2.6 Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Dasar Akrua

Dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali Laporan Arus Kas menggunakan dasar akrual. Pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban.

2) Periode Laporan

- a. Tahun buku mencakup periode satu tahun, apabila dalam keadaan luar biasa, tahun buku dapat berubah sehingga Laporan Keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, untuk itu harus diungkapkan;
- b. Alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun;
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan;
- d. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan induk perusahaan.

3) Saling Hapus (*Offsetting*)

Akun Aset dan Liabilitas, serta akun pendapatan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh ketentuan SAK – EP.

4) Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian yang menghasilkan penyajian lebih tepat atas transaksi atau peristiwa.
- b. Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK – EP.

Apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila

reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi harus diungkapkan.

5) Informasi Komparatif

Dalam rangka penyampaian laporan berkala, Laporan Keuangan tahunan disajikan perbandingan untuk 1 (satu) tahun terakhir. Sedangkan untuk Laporan Keuangan interim disajikan perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain interim juga mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode terakhir yang dilaporkan.

2.7 Laporan Keuangan Interim

Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periode lain yang kurang dari satu tahun.

Laporan keuangan interim lengkap terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan;
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.8 Laporan Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasi menggabungkan Laporan Keuangan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan. Pengendalian dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui anak perusahaan).

Meskipun induk perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

- a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor atau pemegang saham lainnya. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian;

- b. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- c. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan dalam hal:

- a. Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek;
- b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.

Anak perusahaan yang bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau tidak ada hubungannya dengan jenis usaha induk perusahaan, Laporan Keuangan anak perusahaan tersebut tetap dimasukkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Dalam menyusun Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi, Laporan Keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari Aset, Liabilitas dan Ekuitas, Pendapatan dan Beban.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk setiap transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. Apabila tidak digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi, maka penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut harus diungkapkan.

Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian yang menghasilkan penyajian lebih tepat atas transaksi atau peristiwa.

Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK – EP, apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasan dan sifat perubahan senadainya dilakukan reklasifikasi harus diungkapkan.

2.9 Informasi Komparatif

Dalam rangka penyampaian laporan berkala, Laporan Keuangan tahunan disajikan perbandingan untuk 1 (satu) tahun terakhir. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Interim disajikan perbandingan dengan periode sama pada tahun sebelumnya. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain juga mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode terakhir yang dilaporkan.

BAB III

SIKLUS AKUNTANSI

3.1 Pendahuluan

Akuntansi sebagai sistem yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, mempunyai disiplin tersendiri yang harus dipahami dengan baik, untuk dapat memproses data menjadi informasi akuntansi secara efektif dan efisien.

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan sebagaimana kelaziman suatu sistem mempunyai tujuan, unsur-unsur yang terkelola menurut tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi konsep, prinsip, standar, peristilahan teknis, dokumen, media prosedur, dan proses yang terkoordinasi dan tertata secara tertib.

3.2 Terminologi Dasar Proses Akuntansi

Transaksi (*Transaction*): adalah kejadian yang melibatkan dua atau lebih pihak yang mempunyai dampak ekonomi dan keuangan, misalnya : jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, mengikat kontrak perjanjian, menerima dan membayar, dan lain-lain.

Kejadian (*Event*): adalah peristiwa yang terjadi dalam internal entitas yang mempunyai dampak ekonomi dan keuangan bagi entitas. Misal proses produksi, turunnya nilai suatu aset karena susut, rusak, atau usang, perubahan kurs valuta asing, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain.

Akun (*Account*): adalah wadah untuk mencatat dampak setiap transaksi dan kejadian atas rincian setiap unsur aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban. Akun tersusun dan diberikan kode secara sistematis dalam suatu daftar perkiraan atau daftar akun (*chart of accounts*). Akun dapat dikatakan merupakan sel yang membentuk organ laporan akuntansi. Beberapa contoh akun yang paling sering dikenal dalam sistem dan laporan akuntansi suatu perusahaan : Kas, Piutang Usaha, Persediaan, Liabilitas, Modal Saham, Pendapatan Usaha, Gaji Karyawan dan lain sebagainya.

Akun Posisi Keuangan/Neraca (*Financial Position/Balance Sheet/Real Account*): adalah akun-akun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (Neraca) yakni : Aset, Liabilitas dan Ekuitas.

Akun Laba Rugi (*Income Statement/Nominal Account*): adalah akun yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi yaitu Penghasilan dan Beban, termasuk Keuntungan dan Kerugian.

Akun Penghasilan Komprehensif (*Comprehensive Income Account*): adalah akun yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, yang meliputi akun Laba Rugi dan akun Penghasilan Komprehensif Lain.

Akun Penghasilan Komprehensif Lain (*Other Comprehensive Income Account*) : adalah akun yang dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain, yaitu kenaikan dan penurunan ekuitas yang tidak dilaporkan dalam laba rugi, yaitu meliputi selisih surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud, keuntungan dan kerugian aktuarial atas imbalan kerja, selisih transaksi laporan keuangan, bagian efektif lindung nilai arus kas, selisih penilaian aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih nilai wajar liabilitas keuangan akibat perubahan risiko kredit, serta selisih nilai waktu kontrak opsi, elemen *forward* kontrak *forward*, dan basis *spread* valuta asing instrumen keuangan.

Ayat Jurnal (*Journal Entries*): adalah pembukuan paling dasar yang dilakukan atas suatu transaksi atau kejadian. Dalam tata buku berpasangan, jurnal dilakukan dengan mendebit dan mengkredit pasangan akun dalam keseimbangan jumlah debit dan kredit.

Ayat Jurnal Penyesuaian (*Adjusting Entries*): adalah ayat jurnal yang dilakukan ketika penutupan buku untuk memutakhirkan data atau pembukuan agar laporan keuangan dapat tersusun lebih akurat sesuai dengan keadaan untuk periode dan pada tanggal pelaporan.

Ayat Jurnal Koreksi (*Correcting Entries*): adalah ayat jurnal yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kesalahan pembukuan yang telah dilakukan.

Ayat Jurnal Penutup (*Closing Entries*): adalah ayat jurnal yang dilakukan untuk menutup semua akun laba rugi dalam proses perhitungan laba rugi selama suatu periode tertentu. Dengan demikian, semua akun laba rugi untuk periode yang bersangkutan akan bersaldo nihil, dan siap untuk mulai membukukan penghasilan dan beban untuk periode usaha yang baru.

Ayat Jurnal Balik (*Reversing Entries*): adalah ayat jurnal yang dilakukan untuk mengembalikan ayat jurnal penyesuaian yang telah dilakukan ketika penutupan buku. Ayat jurnal balik, tidak mutlak perlu dilakukan dan hanya dilakukan dalam keadaan tertentu bila dipandang perlu setelah selesainya penyusunan laporan keuangan.

Jurnal (*Journal*): sering juga disebut Buku Harian, yaitu wadah dimana setiap kejadian atau transaksi pertama-tama dibukukan. Ikhtisar pembukuan jurnal kemudian diteruskan (diposting) ke buku besar dan buku pembantu.

Posting: adalah pemindahan data pembukuan dari jurnal ke buku besar dan atau buku tambahan.

Buku Besar (*Ledger/General Ledger*): adalah kumpulan akun aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, baik berbentuk buku, kumpulan kartu, atau cetakan komputer (*computer print out*).

Buku Tambahan / Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger/Subledger*): adalah media berbentuk buku, kumpulan kartu, atau cetakan komputer (*computer print out*) untuk memperinci suatu akun tertentu dari buku besar (sebagai *controlling account*), dirinci lebih lanjut dalam buku tambahan Piutang Usaha/utang Usaha atas masing-masing debitur: A, B, C dan seterusnya. Selain buku tambahan Piutang Usaha/utang Usaha, juga terdapat buku tambahan untuk persediaan dan aset tetap.

Neraca Saldo (*Trial Balance*): pengertian neraca disini dimaksudkan sebagai lajur keseimbangan. Neraca Saldo adalah suatu kertas kerja dengan lajur berpasangan debit dan kredit, untuk menguji keseimbangan pembukuan yang telah dilakukan selama suatu periode tertentu. Neraca saldo disusun berdasarkan nilai (angka) dari akun buku besar.

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan (*Adjusted Trial Balance*): adalah neraca saldo yang disusun kembali setelah dimasukkan juga ayat jurnal penyesuaian.

Neraca Saldo Setelah Ayat Jurnal Penutup (*Post-Closing Trial Balance*): adalah neraca saldo yang disusun setelah dilakukan ayat jurnal penutup. Neraca Saldo ini disusun untuk menguji kebenaran keseimbangan debit dan kredit neraca dan laporan laba rugi yang akan disusun.

Laporan Keuangan (*Financial Statement*): adalah laporan utama yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi yang terdiri atas: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif, penyajian kembali, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

3.3 Persamaan Akuntansi

ASET	=	LIABILITAS	+	EKUITAS
-------------	----------	-------------------	----------	----------------

Persamaan dasar akuntansi di atas menjelaskan bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau diinvestasikan entitas, sedangkan liabilitas dan ekuitas merupakan sumber pendanaan atas aset tersebut. Nilai aset yang dimiliki atau diinvestasikan harus sama dengan nilai total sumber pendanaannya.

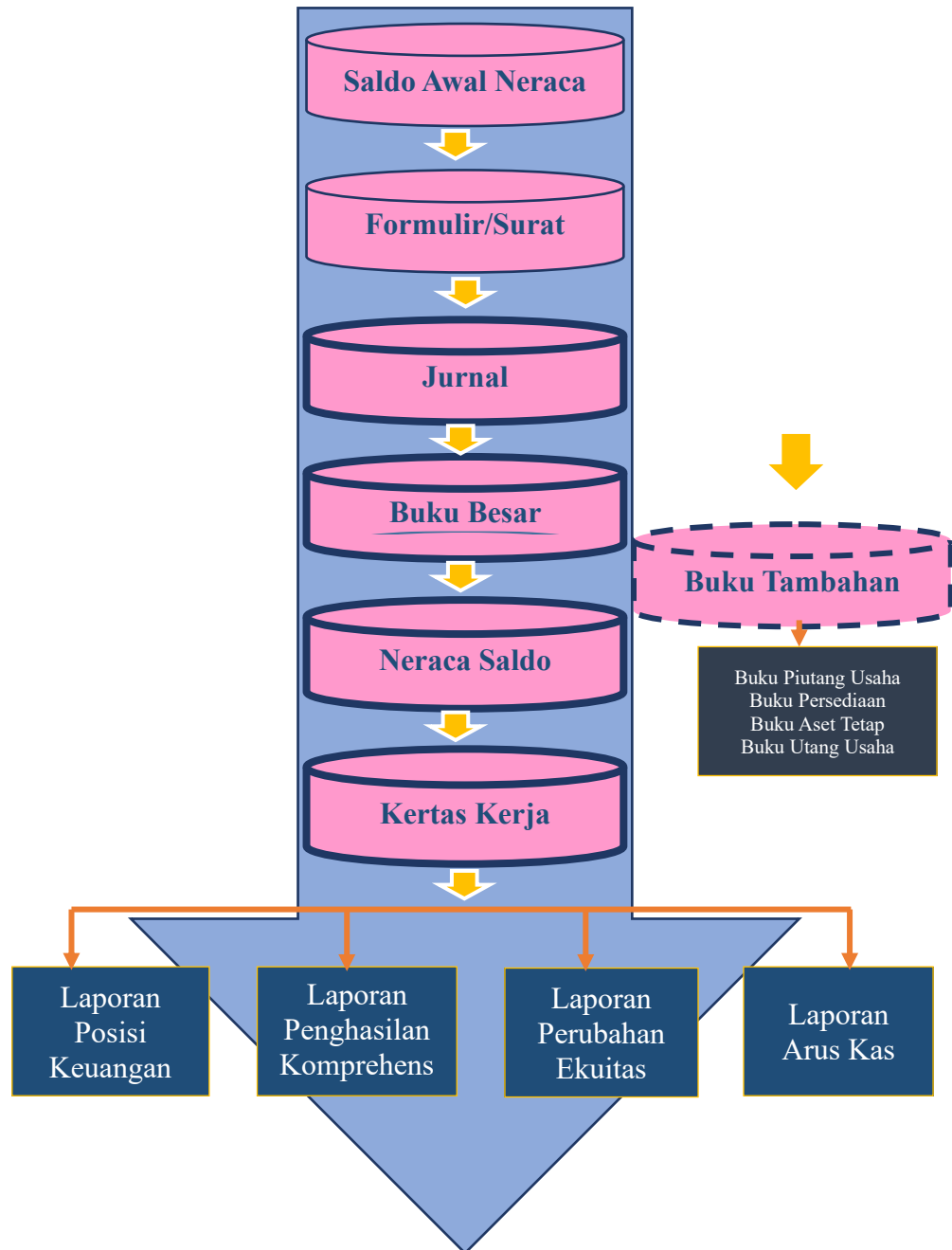
Misalnya Mr. X membuka usaha dengan modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,-. Untuk membelanjai modal kerja tersebut, Mr. X menyetor tunai dari tabungan sendiri sejumlah Rp750.000.000,- dan sisanya Rp250.000.000,- dari pinjaman bank. Maka penyetoran modal awal tersebut dapat digambarkan dalam persamaan akuntansi sebagai berikut:

ASET	=	LIABILITAS	+	EKUITAS
Kas/Bank	=	Utang Bank	+	Modal Sendiri
Rp1.000.000.000,-	=	Rp250.000.000,-	+	Rp750.000.000,-

Persamaan dasar di atas yang semula hanya memuat tiga unsur neraca : Aset, Liabilitas, dan Ekuitas, dapat diperluas dengan memasukkan dua unsur Laporan Laba Rugi yakni Penghasilan dan Beban. Dengan demikian persamaan dasar akuntansi dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

$$\text{ASET} = \text{LIABILITAS} + \text{EKUITAS} + (\text{PENGHASILAN} - \text{BEBAN})$$

3.4 Arus Jaringan Data Menjadi Laporan Keuangan

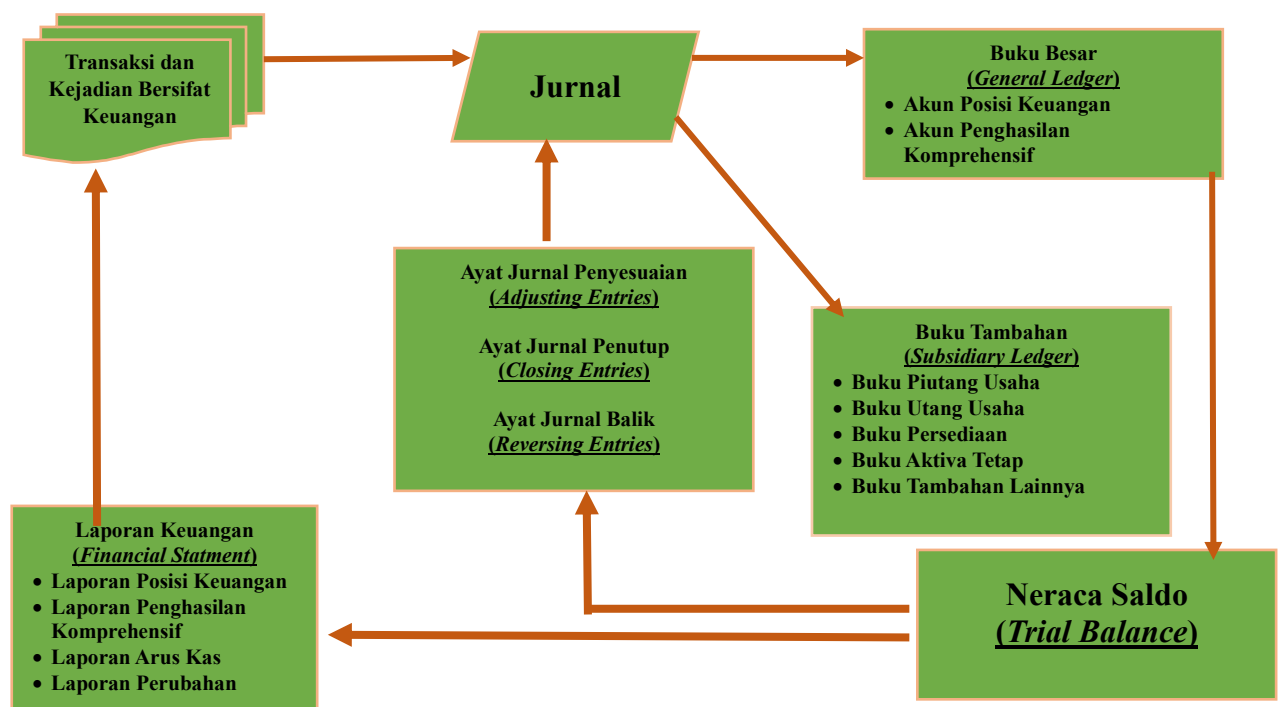


3.5 Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu lingkaran proses akuntansi untuk membukukan transaksi dan kejadian, selama satu periode akuntansi tertentu sampai tersusun laporan keuangan. Dengan diawali dari proses mengidentifikasi transaksi dan kejadian yang harus dibukukan

dan atau diperhitungkan dalam berbagai media akuntansi sampai akhirnya tersusun laporan keuangan untuk suatu periode tertentu dan kemudian dilanjutkan proses akuntansi untuk periode berikutnya.

Gambar ini menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Keseluruhan proses ini menjadi dasar bagi pemrogram (*programmer*) dalam mendesain suatu perangkat lunak akuntansi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing siklus.



Siklus Akuntansi

Bukti Pendukung Transaksi

TRANSAKSI ATAU KEJADIAN	BUKTI INTERNAL	BUKTI EKSTERNAL
Penerimaan Kas/Bank	Kuitansi	• Bukti Pembayaran • Bukti Setoran • Kredit Memo Bank
Pengeluaran Kas/Bank	Bukti Pembayaran	• Faktur • Debit Memo Bank
Pembelian	• Surat Order Pembelian • Bukti Penerimaan Barang • Bukti Penerimaan Jasa	• Faktur • Bukti Pengiriman Barang
Penjualan	• Surat Perintah Pengiriman Barang • Faktur	• Surat Order Pembelian • Bukti Penerimaan Barang • Bukti Penerima Jasa
Depresiasi	Bukti Pembukuan Internal	
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	Bukti Pembukuan Internal	
Penggunaan Bahan Baku	Bukti Permintaan Barang	
Rupa-rupa Kejadian Lainnya	Rupa-rupa Bukti Internal Yang Khusus Dirancang	

BAB IV

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan bertujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) agar dapat dibandingkan langsung dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya ataupun dengan Laporan Keuangan entitas lain. Laporan Keuangan yang disajikan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

4.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Dalam Laporan Posisi Keuangan, Aset Lancar disajikan terpisah dari Aset Tidak Lancar. Liabilitas Lancar terpisah dari Liabilitas Tidak Lancar, kecuali untuk industri tertentu yang diatur secara khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas, sedangkan Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Komponen Utama Laporan Posisi Keuangan:

1) Aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang mempunyai manfaat ekonomi. Dengan dikelolanya sumber daya tersebut diperkirakan akan memperoleh manfaat dimasa yang akan datang.

Yang termasuk dalam kategori Aset adalah:

1.1) Aset Lancar

Aset yang diklasifikasikan sebagai Aset Lancar adalah sebagai berikut:

- Direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan.
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan direalisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset Lancar dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:

- Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.
- Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

b. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang dari penjualan yang timbul dalam hubungannya dengan kegiatan normal perusahaan, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Saldo masing-masing piutang dan penurunan nilai piutang tak tertagih harus disajikan.

c. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan tagihan perusahaan pada pihak ketiga yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan dalam akun piutang usaha.

Piutang ini disajikan sejumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedangkan persediaan dalam proses produksi atau dalam perjalanan yang berbentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost or net realizable value*) setelah memperhitungkan penurunan nilai persediaan.

e. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan Aset pajak kini yaitu kelebihan Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut. Aset pajak kini harus di kompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Laporan Posisi Keuangan.

Kompensasi ini tidak dapat dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasi.

Kelebihan pembayaran pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan ditagihkan kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, dari transaksi tertentu. PPh Pasal 23 ini biasanya dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada pihak yang menerima penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan secara periodik oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. PPh Pasal 25 ini bertujuan untuk meringankan beban pajak tahunan Wajib Pajak dengan cara membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dan teratur sepanjang tahun.

f. Beban Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar, namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang seperti premi asuransi yang telah dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka.

g. Aset Lancar Lain-lain

Akun ini mencakup Aset Lancar yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam poin a sampai dengan f di atas, termasuk pembayaran dimuka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu 1 (satu) tahun atau siklus operasi normal perusahaan.

1.2) Aset Tidak Lancar

Yang termasuk dalam klasifikasi aset tidak lancar adalah:

a. Piutang Hubungan Istimewa

Akun ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk akun yang telah ditentukan penyajiannya yaitu Kas setara kas, serta Piutang Usaha. Piutang Hubungan Istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan. Jika dibentuk penyisihan untuk piutang hubungan istimewa, maka harus diungkapkan alasan, dasar pembentukan penyisihan dan penjelasan terjadinya piutang hubungan istimewa tersebut.

b. Aset Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai Aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Aset pajak tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Liabilitas pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Laporan Posisi Keuangan. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasi.

c. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

Akun ini merupakan investasi pada perusahaan asosiasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi pada perusahaan asosiasi (kepemilikan saham perusahaan 20% sampai dengan 50% bagian ekuitas perusahaan), disajikan menggunakan metode ekuitas.

d. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Akun ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi ini berbentuk investasi dalam surat berharga utang dan surat berharga ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya. Investasi dalam surat berharga ekuitas (memiliki kurang dari 20% saham perusahaan), harus

diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.

Investasi dalam surat berharga utang, harus diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.

Investasi pada surat berharga yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi surat berharga tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.

Investasi dalam properti, harus disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar harga perolehan.

Investasi pada Kerja Sama Operasi (hak bagi pendapatan/*sharing profit*) berupa aset yang diserahkan pada KSO, disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

Apabila suatu investasi jangka panjang disajikan sebesar biaya, namun jumlah yang dapat dipulihkan ternyata kurang dari nilai tercatat (penurunan nilai permanen), maka nilai tercatat investasi tersebut harus dikurangi sampai jumlah yang dapat dipulihkan tersebut. Pengurangan ini adalah kerugian penurunan nilai, yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif.

1.3) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, melalui pembelian atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Yang termasuk dalam Aset Tetap adalah Aset Tetap pemilikan langsung, Aset Sewa Guna Usaha, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Kerjasama Operasi (KSO).

a. Pemilikan Langsung

Akun ini merupakan Aset Tetap yang siap pakai, transaksinya telah selesai, dan menjadi hak perusahaan. aset ini dinyatakan sebesar harga perolehan.

b. Aset Sewa Guna Usaha

Akun ini merupakan Aset Tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*).

Aset sewa guna usaha dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha pada masa akhir sewa guna usaha.

c. Aset Dalam Penyelesaian

Dalam akun ini dibukukan semua biaya dalam rangka pembangunan aktiva tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Pada saat pengerjaan selesai jumlah yang terakumulasi dalam perkiraan ini dipindahkan ke perkiraan aktiva tetapnya masing-masing. Termasuk pula dalam perkiraan ini adalah mesin-mesin dan peralatan untuk pekerjaan konstruksi yang baru tiba dan belum dikelompokkan ke dalam jenis-jenisnya.

d. Aset Kerjasama Operasi (KSO)

Akun ini merupakan Aset Tetap yang dibangun dalam rangka kerjasama operasi yang dikelola oleh perusahaan.

Aset KSO dinyatakan sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih mana yang obyektif atau paling berdaya uji.

Aset Tetap disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi depresiasinya (kecuali tanah). Biaya perolehan di atas harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi Aset Tetap yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.
- Penurunan nilai Aset Tetap (*impairment*).
- Penilaian kembali Aset Tetap.

1.4) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah Aset non moneter dan tidak memiliki wujud fisik, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau pemasokan barang/jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif lainnya.

Termasuk dalam Aset Tak Berwujud antara lain hak paten, hak cipta, waralaba (*franchise*), merek dagang, dan *goodwill*.

Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai Aset Tidak Berwujud.

1.5) Aset Lain-lain

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok Aset di atas yang disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain.

Akun ini mencakup antara lain:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan lagi.
- b. Aset dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual.
- c. Beban tangguhan, misalnya: biaya yang timbul untuk pengurusan legal tanah dan biaya perluasan usaha. Beban tangguhan diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing jenis beban. Saldo beban tangguhan sesudah amortisasi yang berkaitan dengan suatu Liabilitas, harus dihapuskan secara proporsional, bila sebagian dari Liabilitas tersebut dilunasi atau diselesaikan. Beban tangguhan disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai.
- d. Beban akrual yaitu pembayaran di muka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan.

2) Liabilitas

Liabilitas merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya membutuhkan sumber dana perusahaan.

Liabilitas disajikan sebesar jumlah yang harus dibayar, sesuai dengan tingkat kecepatan penyelesaian kewajibannya. Liabilitas diklasifikasikan sebagai berikut:

2.1) Liabilitas Lancar

Kewajiban perusahaan diklasifikasikan sebagai Liabilitas Lancar jika akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Laporan Posisi Keuangan atau satu siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas lancar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal perusahaan, baik kewajiban kepada pihak ketiga maupun kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo masing-masing utang tersebut harus disajikan.

b. Utang Pajak

Akun ini merupakan kewajiban pajak perusahaan dan pajak lainnya yang belum dibayar. Liabilitas pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Liabilitas pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan Aset Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Laporan Posisi Keuangan. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasi.

c. Pinjaman Jangka Pendek

Akun ini merupakan Liabilitas perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

d. Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Akun ini merupakan bagian dari Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Laporan Posisi Keuangan. Akun ini disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dengan rincian antara lain: pinjaman jangka panjang, dan Utang Sewa Guna Usaha.

e. Beban Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan kumpulan dari beberapa jenis beban yang telah menjadi Liabilitas perusahaan namun belum jatuh tempo.

f. Liabilitas Lancar Lain-lain

Akun ini mencakup seluruh Liabilitas lancar lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam poin a sampai dengan e di atas.

2.2) Liabilitas Tidak Lancar

Semua Liabilitas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Liabilitas Lancar merupakan Liabilitas Tidak Lancar. Liabilitas tidak lancar antara lain:

a. Utang Hubungan Istimewa

Akun ini merupakan Liabilitas yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di luar kegiatan normal perusahaan.

b. Liabilitas Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Aset Pajak Tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Laporan Posisi Keuangan. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasi.

c. Pinjaman Jangka Panjang

Akun ini merupakan Liabilitas perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperkirakan penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal Laporan Posisi Keuangan.

d. Utang Sewa Guna Usaha

Akun ini merupakan Liabilitas perusahaan kepada perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) sehubungan dengan perolehan aset perusahaan. akun ini disajikan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dikurangi angsuran pokok.

e. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Akun ini mencakup kewajiban tidak lancar lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam poin a sampai dengan d di atas.

Penyajian ini dalam Laporan Posisi Keuangan disesuaikan dengan urutan jatuh temponya.

Liabilitas berbunga jangka panjang meskipun akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Laporan Posisi Keuangan tetap diklasifikasikan sebagai Liabilitas tidak lancar apabila:

- Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

- Perusahaan bermaksud membiayai kembali liabilitasnya dengan pendanaan jangka panjang.
- Maksud tersebut pada huruf b didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

3) **Hak Minoritas**

Akun ini merupakan bagian set neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

4) **Ekuitas**

Akun ini merupakan hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara Aset dan Liabilitas yang ada. Penyajian Ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan, berupa:

a. Modal Saham

Pada akun ini disajikan nilai nominal untuk setiap jenis saham, jumlah saham serta nominal per saham. Untuk itu pemisahan pada akun ini disajikan sebagai berikut:

- Modal Dasar: jumlah saham untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran perusahaan.
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: jumlah saham untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

b. Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid in Capital*)

Tambahan modal disetor disajikan di Laporan Posisi Keuangan dengan menjumlahkan akun Agio Saham, yang merupakan kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal.

c. Perubahan Transaksi Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi

Akun ini merupakan perbedaan nilai investasi perusahaan pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi sebagai akibat adanya perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara perusahaan dengan anak perusahaan/perusahaan asosiasi tersebut.

d. Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan.

e. Cadangan Umum

Cadangan umum adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan dari keuntungannya untuk tujuan tertentu yang bersifat umum, tidak spesifik. Cadangan ini berfungsi sebagai penyangga keuangan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial perusahaan.

f. Cadangan Bertujuan

Cadangan bertujuan adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan dari keuntungannya untuk tujuan tertentu yang spesifik. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan atau proyek tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Berbeda dengan cadangan umum yang bersifat lebih fleksibel, cadangan bertujuan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik.

g. Saldo Laba

Akun ini merupakan akumulasi hasil usaha periode setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba rugi periode lalu.

4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya.

Komponen Utama laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Komponen utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya, berdasarkan metode beban fungsional adalah:

1) Pendapatan Usaha

Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas utama dari entitas yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini mencakup jumlah bruto dari manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas selama satu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas biasa entitas, seperti penjualan barang dan jasa.

2) Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan (BPP) menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa yang dijual oleh entitas selama periode akuntansi. BPP mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang yang dijual atau untuk menghasilkan jasa yang disediakan.

Komponen Beban Pokok Penjualan:

- Bahan Baku : biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi barang atau jasa.
- Tenaga Kerja Langsung : gaji dan upah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi barang atau penyediaan jasa.
- *Overhead* Pabrik : biaya tidak langsung yang berkaitan dengan produksi, seperti biaya penyusutan peralatan pabrik, utilitas pabrik, dan biaya perawatan.
- Barang Dalam Proses : biaya yang terkait dengan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir periode akuntansi.
- Barang Jadi : biaya barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual.

3) Beban Usaha

Beban usaha adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas dalam rangka operasional usahanya yang tidak termasuk dalam Beban Pokok Penjualan (BPP). Beban usaha meliputi biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan dan mendukung kegiatan utama perusahaan, seperti pemasaran, administrasi, dan operasional lainnya.

Jenis-jenis Beban Usaha :

- Beban Penjualan dan Pemasaran : biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran dan penjualan, termasuk iklan, promosi, gaji tenaga penjualan, dan komisi.
- Beban Umum dan Administrasi : biaya yang terkait dengan pengelolaan perusahaan, termasuk gaji staf administrasi, biaya kantor, biaya depresiasi peralatan kantor, utilitas, dan biaya profesional.
- Beban Riset dan Pengembangan : biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan produk atau jasa baru.
- Beban Depresiasi dan Amortisasi : biaya yang terkait dengan depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan.
- Beban Operasional Lainnya : biaya operasional yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti biaya sewa, asuransi, dan biaya transportasi.

4) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang dihasilkan oleh entitas dari aktivitas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama operasionalnya. Pendapatan ini

merupakan tambahan terhadap pendapatan usaha utama dan dapat berasal dari berbagai sumber yang bersifat insidental atau tidak rutin.

Sumber Pendapatan Lain-lain :

- Pendapatan Bunga : pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam bentuk deposito atau surat berharga.
- Pendapatan Dividen : pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan saham di perusahaan lain.
- Keuntungan Penjualan Aset : pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset tetap atau aset tidak lancar lainnya yang bukan bagian dari kegiatan operasional utama.
- Pendapatan Sewa : pendapatan yang diperoleh dari penyewaan properti atau aset lainnya yang dimiliki oleh entitas.
- Pendapatan Royalti : pendapatan yang diperoleh dari penggunaan hak paten, merek dagang, atau kekayaan intelektual lainnya oleh pihak ketiga.
- Pendapatan Lain Yang Bersifat Insidental : termasuk pendapatan dari denda keterlambatan, kompensasi asuransi, dan lainnya.

5) Beban Lain-lain

Beban lain-lain adalah beban yang timbul dari aktivitas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama entitas. Beban ini mencakup biaya yang bersifat insidental atau tidak rutin dan tidak termasuk dalam kategori beban pokok penjualan, beban penjualan, atau beban administrasi umum.

Sumber beban lain-lain :

- Kerugian Penjualan Aset : kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap atau aset tidak lancar lainnya.
- Kerugian dari Investasi : kerugian yang timbul dari investasi, seperti penurunan nilai investasi atau kerugian penjualan investasi.
- Beban Bunga : biaya bunga yang harus dibayar atas pinjaman atau utang perusahaan.
- Kerugian Kurs Mata Uang Asing : kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
- Biaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa : biaya yang terkait dengan litigasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa hukum.

- Kerugian Dari Bencana Alam atau Peristiwa Luar Biasa : kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam atau kebakaran.

6) Beban Keuangan

Akun ini menampung biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan aktivitas fungsi keuangan, meliputi biaya bunga dan biaya keuangan lainnya.

7) Beban Pajak Penghasilan Kini

Beban Pajak Penghasilan Kini adalah jumlah pajak yang terutang untuk periode akuntansi berjalan berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku. Beban ini mencerminkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh entitas untuk pajak penghasilan yang terkait dengan laba kena pajak tahun berjalan.

Komponen Beban Pajak Penghasilan Kini:

- Pajak Terutang : Jumlah Pajak yang harus dibayar pada tahun pajak berjalan.
- Penyesuaian Pajak : Penyesuaian terhadap pajak yang terutang berdasarkan perubahan dalam peraturan perpajakan atau estimasi yang sebelumnya dibuat.

8) Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan

Penghasilan atau beban pajak tangguhan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) adalah pengaruh pajak yang timbul akibat perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan penghitungan pajak yang dapat menyebabkan penangguhan kewajiban pajak atau pendapatan pajak di masa depan. Ini terkait pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan kewajiban dilaporkan keuangan dan basis pajak mereka.

Pengertian pajak tangguhan :

- Pajak Tangguhan Positif : Aset pajak tangguhan yang diakui ketika ada perbedaan temporer yang menyebabkan pengurangan kewajiban pajak di masa depan atau peningkatan pendapatan pajak.
- Pajak Tangguhan Negatif : Liabilitas pajak tangguhan yang diakui ketika ada perbedaan temporer yang menyebabkan kewajiban pajak lebih besar di masa depan atau pengurangan pendapatan pajak.

9) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Dari Operasi

Selisih pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan/ diperhitungkan.

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan Aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan :

- a. Laba (rugi) bersih periode pelaporan.
- b. Setiap akun pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Contoh akun ini antara lain keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar. Pengaruh kumulatif ini disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, antara lain berupa penyetoran modal saham dan pembagian deviden.
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Saldo ini disajikan dengan memisahkan :
 - Telah ditentukan penggunaannya (cadangan). Dalam akun ini dilakukan pemisahan antara jumlah yang telah ditentukan penggunaannya oleh perusahaan dan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
 - Belum ditentukan penggunaannya. Akun ini merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan.
 - Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan akun-akun ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

4.4 Laporan Arus kas

Laporan ini menunjukan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Komponen Utama Laporan Arus Kas :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Merupakan arus kas yang diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, arus kas ini berasal dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) bersih.

Arus kas dari aktivitas operasi antara lain berupa arus kas dari transaksi penjualan, pembayaran kepada pemasok, karyawan, bunga, beban operasional lainnya dan pajak penghasilan.

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Arus kas dari aktivitas investasi antara lain berasal dari transaksi pembelian dan penjualan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain, serta uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Tidak termasuk penempatan dana perusahaan untuk jangka pendek seperti deposito yang kurang dari satu tahun dan investasi pada surat berharga untuk diperdagangkan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan pemegang saham perusahaan dan kreditur.

Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain berupa pembayaran deviden, serta pelunasan pinjaman.

4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan akun-akun laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap akun dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan :

- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- Informasi yang diwajibkan dalam SAK EP tetapi tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
- Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan laporan Arus Kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Untuk akun-akun yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk akun-akun yang bersifat khusus untuk industri tertentu harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.

Untuk akun yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk Piutang, Utang, Penjualan atau Pendapatan dan Beban.

Aset yang dijaminakan diungkapkan dalam penjelasan masing-masing akun. Apabila aset perusahaan diasuransikan, maka diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.

Pedoman ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan.

Gambaran umum yang harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan :

- a. Pendirian Perusahaan
 - Riwayat ringkas perusahaan

- Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan atau nomor tanggal Berita Negara yang bersangkutan.
- Bidang usaha utama perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan kegiatan utama perusahaan pada periode pelaporan
- Tempat kedudukan perusahaan dan lokasi utama kegiatan usaha.
- Tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara komersial.

Apabila perusahaan melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau penciutan perusahaan.

b. Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan

Menjelaskan struktur perusahaan yang menggambarkan perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan tersebut mencakup :

- Nama perusahaan.
- Tempat Kedudukan Perusahaan.
- Jenis Usaha.
- Persentase Kepemilikan.
- Total Aset.
- Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti alasan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan anak perusahaan, dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda oleh anak perusahaan dan proporsi unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut.
- Nama Anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan kesalahan mendasar, diperlakukan sebagai berikut :

5.1 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, atau jika perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan. Apabila jumlah pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dapat ditentukan secara wajar maka ditetapkan secara *retrospektif*, sebaliknya apabila jumlah pengaruh perubahan kebijakan akuntansi tidak dapat ditentukan secara wajar maka diterapkan secara *prospektif*.

5.2 Perubahan Estimasi Akuntansi

Estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman dan perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara *prospektif*.

5.3 Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar yang diperlakukan secara *retrospektif*, dengan menyajikan kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya pada masa sebelum periode penyajian sebagai suatu penyesuaian saldo laba awal periode.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN AKUN-AKUN PELAPORAN

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, basis, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan ini sangat penting karena mempengaruhi cara suatu entitas melaporkan informasi keuangannya, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan.

6.1 Kebijakan Akuntansi Akun-akun Laporan Posisi Keuangan

1. Kas dan Setara Kas

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:

- a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.
- b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Pengakuan :

Kas dan Setara Kas diakui dalam Laporan Posisi Keuangan ketika entitas memiliki kendali atas kas tersebut dan terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas.

Pengukuran :

Kas diukur pada nilai nominal, sedangkan Setara Kas diukur pada nilai wajar. Setara Kas termasuk instrumen keuangan jangka pendek yang sangat likuid dengan jatuh tempo yang sangat pendek (umumnya tiga bulan atau kurang dari

tanggal perolehannya), yang mudah dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Pengungkapan :

- 1) Unsur Kas dan Setara Kas pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
- 2) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang.
- 3) Kisaran tingkat bunga dari Setara Kas selama periode pelaporan.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dijual dalam waktu dekat dan biasanya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang. Investasi ini biasanya likuid dan mudah dipindahtangankan dengan harga yang dapat diukur secara andal.

Pengakuan :

Investasi jangka pendek diakui dalam Laporan Keuangan ketika entitas memiliki hak atas manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut, dan terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat tersebut akan mengalir ke entitas. Investasi ini biasanya dimaksudkan untuk dijual atau ditahan selama periode waktu yang relatif singkat (biasanya dalam waktu satu tahun atau kurang).

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, investasi jangka pendek diukur pada nilai wajar, yang biasanya setara dengan harga transaksi atau biaya perolehan, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan aset tersebut.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi : investasi jangka pendek yang dimaksudkan untuk diperdagangkan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam lampiran laba rugi periode berjalan.

- 2) Investasi yang diukur pada biaya perolehan : jika investasi tidak memiliki kuota harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, jika ada.

Pengungkapan :

- 1) Untuk deposito, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama bank
 - b. Rincian jenis dan jumlah penempatan dana
 - c. Kisaran tingkat bunga
- 2) Pengelompokan Surat Berharga sesuai kategori (diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual) dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang harus diungkapkan :
 - a. Nilai wajar agregat (*marked to market*)
 - b. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Surat Berharga
 - c. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari pemilikan Surat Berharga tersedia untuk dijual
 - d. Biaya perolehan termasuk jumlah premi dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo
 - e. Metode amortisasi yang digunakan
 - f. Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok Surat Berharga.

3. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang hak tagih yang timbul dari transaksi penjualan air, penjualan non air dan penjualan lainnya yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang.

Piutang Usaha yaitu piutang yang timbul dari transaksi penjualan air dan non air.

Piutang Non Usaha yaitu piutang yang timbul dari transaksi lainnya selain transaksi penjualan air dan non air.

Saldo masing-masing piutang dari penurunan piutang tak tertagih harus disajikan.

Pengakuan :

Piutang Usaha diakui dengan terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD) Air dan Daftar Piutang Non Air.

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, piutang usaha diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima, yang umumnya setara dengan jumlah faktur yang akan diterima dari pelanggan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Biaya perolehan yang diamortisasi : setelah pengakuan awal, piutang usaha biasanya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif, jika berlaku. Namun, untuk piutang usaha jangka pendek, biaya perolehan yang diamortisasi seringkali sama dengan nilai nominalnya, mengingat dampak diskonto waktu biasanya tidak signifikan.
- 2) Penurunan nilai : setiap indikasi penurunan nilai piutang usaha harus dipertimbangkan. Jika terdapat bukti objektif bahwa piutang tidak dapat ditagih seluruhnya, entitas harus mengakui penyisihan penurunan nilai. Penurunan nilai diukur dengan selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Penurunan nilai ini biasanya diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Pengungkapan :

- 1) Piutang Usaha diakui dengan terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD) Air dan Daftar Piutang/Tagihan Non Air.
- 2) Piutang Non Usaha diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa yang akan datang mengalir ke perusahaan dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
- 3) Jumlah piutang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 4) Jumlah piutang menurut umur.
- 5) Jumlah penurunan piutang ragu-ragu, beban penurunan dan penghapusan piutang.

4. Penurunan Nilai Piutang Usaha

Pembentukan Penyisihan Piutang Rekening Air dilakukan pada saat akhir tahun setelah perusahaan melakukan opname rekening air dan melakukan penghitungan penyisihan piutang secara *time series* (rata-rata piutang tidak tertagih dalam satu tahun buku selama 3 periode).

Piutang yang di atas 2 (dua) tahun dan status pelanggan telah diputus, dapat diklasifikasikan sebagai piutang tidak tertagih. Piutang tersebut dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi tetap dicatat secara *extra comptabel* dan tetap diusahakan penagihannya.

Jika terdapat pembayaran atas piutang – piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.

Penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih dapat dihapuskan (*write-off*) setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal kejadian-kejadian khusus, misalnya adanya pembongkaran daerah pemukiman tertentu untuk tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas.

Pengakuan :

Penurunan nilai piutang diakui ketika ada bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Bukti objektif tersebut dapat mencakup:

- 1) Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur.
- 2) Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau menunggak
- 3) Kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan bangkrut atau melakukan reorganisasi keuangan
- 4) Hilangnya pasar aktif untuk piutang terkait
- 5) Data yang dapat diamati menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam arus kas masa depan estimasian dari kelompok piutang keuangan sejak pengakuan awal

Pengakuan Kerugian Penurunan Nilai

Jika nilai tercatat piutang lebih tinggi dari kini arus kas masa depan yang diharapkan, selisih tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai ini dicatat sebagai penyisihan penurunan nilai piutang, yang mengurangi nilai tercatat piutang di laporan posisi keuangan.

Pemulihan Nilai Piutang

Jika di periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai menurun dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai diakui (misalnya, membaiknya situasi keuangan debitur), maka pemulihan penurunan nilai dapat diakui. Jumlah pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui.

Pengukuran :

Setelah ada indikasi penurunan nilai, piutang diukur sebagai berikut :

- 1) Nilai Tercatat : piutang diukur pada nilai tercatat sebelum pengakuan penurunan nilai
- 2) Nilai Kini Arus Kas Masa Depan : penurunan nilai diukur dengan membandingkan nilai tercatat piutang dengan nilai kini arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima, didiskontokan pada suku bunga efektif awal dari piutang tersebut
- 3) Jika piutang adalah jangka pendek, dan dampak diskonto waktu tidak signifikan, pengukuran penurunan nilai dapat didasarkan pada jumlah nominal yang tidak akan tertagih

Pengungkapan :

- 1) Rincian jenis dan jumlah piutang
- 2) Jumlah penurunan nilai piutang usaha, beban penurunan dan penghapusan piutang

Pencatatan penyisihan kerugian piutang usaha pelanggan masih aktif

Saldo piutang rekening air PDAM Kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 20x2

sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Saldo per 31/12/20x2 Rp
Sosial	50.000.000
Rumah Tangga R1	100.000.000
Rumah Tangga R2	40.000.000
Rumah Tangga R3	200.000.000
Instansi Pemerintah	50.000.000
TNI/POLRI	50.000.000
Niaga Kecil	50.000.000
Niaga Menengah	50.000.000
Niaga Besar	200.000.000
Industri	500.000.000

Kelompok Pelanggan	Saldo per 31/12/20x2 Rp
Pelabuhan	10.000.000
Total	1.300.000.000

Berdasarkan pengalaman selama tiga tahun terakhir, kemungkinan tidak tertagihnya

Kelompok Pelanggan	Tahun 2009 (Rp/juta)			Tahun 20x0 (Rp/juta)			Tahun 20x1 (Rp/juta)			Rata - Rata
	Piutang 31 Des 2008 + DRD 2009	Ter tagih selama 2009	%Tak Tertagih	Piutang 31 Des 2009 + DRD 20x0	Ter tagih selama 20x0	%Tak Tertagih	Piutang 31 Des 20x0 + DRS 20x1	Ter tagih selama 20x1	%Tak Tertagih	
Sosial	40	30	25%	40	40	0%	50	45	10%	12%
Rumah Tangga R1	75	70	7%	80	75	6%	95	92	3%	5%
Rumah Tangga R2	30	29	3%	36	35	3%	38	37	3%	3%
Rumah Tangga R3	175	175	0%	180	180	0%	195	195	0%	0%
Inst Pemerintah	50	50	0%	50	50	0%	50	50	0%	0%
TNI/POLRI	45	40	11%	46	45	2%	48	46	4%	6%
Niaga Kecil	50	50	0%	50	50	0%	50	49	2%	1%
Niaga Menengah	50	50	0%	50	50	0%	50	50	0%	0%
Niaga Besar	200	200	0%	200	200	0%	200	200	0%	0%
Industri	500	500	0%	500	500	0%	500	490	2%	1%
Pelabuhan	10	10	0%	10	10	0%	10	10	0%	0%

Pada tanggal 31 Desember 20x2, PDAM Kota Bengkulu harus membukukan beban penyisihan kerugian piutang usaha sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Per 31/12/20x2	%	Besar
	Rp		Penvisihan Rp
Sosial	50.000.000	12%	6.000.000
Rumah Tangga R1	100.000.000	5%	5.000.000
Rumah Tangga R2	40.000.000	3%	1.200.000
Rumah Tangga R3	200.000.000	0%	0
Instansi Pemerintah	50.000.000	0%	0
TNI/POLRI	50.000.000	6%	3.000.000
Niaga Kecil	50.000.000	1%	500.000
Niaga Menengah	50.000.000	0%	0
Niaga Besar	200.000.000	0%	0
Industri	500.000.000	1%	5.000.000
Pelabuhan	10.000.000	0%	0
Total	1.300.000.000		20.700.000

Pada akhir tahun 20x1, saldo akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha sebesar Rp19.000.000,00, sehingga beban yang harus dicatat pada akhir tahun 20x2 hanya sebesar Rp1.700.000,00 (Rp20.700.000-19.000.000).

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 31 Desember 20x2		
Dokumen Surat Keputusan Direksi dan Persetujuan Dewan Pengawas		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Beban penyisihan kerugian piutang usaha	Rp 1.700.000
Kredit :	Akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha	Rp 1.700.000

Seandainya pada akhir tahun 2011, saldo akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha sebesar Rp25.000.000,00, maka akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha yang harus dilakukan pendebitan sebesar Rp.4.300.000,00 (Rp25.000.000-20.700.000).

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 31 Desember 20x2		
Dokumen Surat Keputusan Direksi dan Persetujuan Dewan Pengawas		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha	Rp 4.300.000
Kredit :	Keuntungan pemulihan penyisihan	Rp 4.300.000

5. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah tagihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu kepada pihak, yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha atau piutang dagang. Piutang lain-lain biasanya timbul dari transaksi yang bersifat tidak rutin atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama bisnis. Contoh piutang lain-lain termasuk pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada pihak ketiga, klaim asuransi, dan uang muka yang diberikan kepada pemasok atau pihak lain.

Pengakuan :

Piutang lain-lain diakui ketika entitas memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga atas transaksi yang telah terjadi. Pengakuan dilakukan pada saat transaksi atau peristiwa yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran telah terjadi dan terdapat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait akan mengalir ke entitas.

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, piutang lain-lain diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar ini biasanya setara dengan jumlah nominal yang diharapkan akan diterima dari pihak ketiga.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Biaya perolehan yang diamortisasi : setelah pengakuan awal, piutang lain-lain biasanya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Namun, untuk piutang lain-lain jangka pendek, nilai tercatatnya biasanya sama dengan nilai nominalnya, mengingat dampak diskonto waktu biasanya tidak signifikan.
- 2) Penurunan nilai : jika terdapat indikasi bahwa piutang lain-lain tidak akan tertagih sepenuhnya, entitas harus mengakui kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Kerugian ini diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Pengungkapan :

- 1) Rincian jenis dan jumlah piutang lain-lain
- 2) Jumlah penurunan piutang lain-lain, beban penurunan dan penghapusan piutang lain-lain.

6. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan / perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

Persediaan BUMD Air Minum meliputi persediaan Bahan Kimia, Persediaan Bahan Operasi Lainnya, Persediaan Barang Cetak, dan Persediaan bahan Instalasi (Water meter, Pipa-pipa, aksesoris dan suku cadang).

Persediaan diukur pada biaya perolehan yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan alokasi yang diinginkan.

Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak, biaya pengangkutan dan biaya penanganan.

Persediaan usang dan rusak direklasifikasi ke aktiva lain-lain:

- Total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat menurut klasifikasi barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan pembantu, serta bahan persediaan lain.
- Jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan.
- Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
- Jumlah penurunan atau penghapusan persediaan rusak atau usang.
- Penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadi penurunan atau kerugian tersebut.

Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap beban persediaan pada periode terjadi pemulihan tersebut.

Pengakuan :

Persediaan diakui sebagai aset ketika:

- 1) Entitas menguasai persediaan tersebut
- 2) Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan persediaan tersebut akan mengalir ke entitas
- 3) Nilai persediaan dapat diukur dengan andal

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, persediaan diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan meliputi:

- 1) Biaya pembelian : termasuk harga pembelian, bea masuk, pajak pembelian lain (selain yang dapat dipulihkan), biaya angkut, penanganan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh persediaan hingga berada dalam kondisi dan lokasi yang siap digunakan.
- 2) Biaya konversi : termasuk biaya yang secara langsung terkait dengan unit produksi seperti biaya tenaga kerja langsung dan *overhead* produksi tetap dan variabel yang dialokasikan.

- 3) Biaya lainnya : jika ada, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Biaya Perolehan atau Nilai Realisasi Neto (NRV), mana yang lebih rendah : setelah pengakuan awal, persediaan diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.
- 2) Nilai Realisasi Neto (NRV) : nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan yang diperlukan.

Pengungkapan :

- 1) Total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat menurut klasifikasi barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan pembantu, serta bahan persediaan lain.
- 2) Jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan.
- 3) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
- 4) Jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang.
- 5) Penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya biasa.

7. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka merupakan pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor atau vendor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya, atau pembayaran sebagian dari harga yang disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya-biaya belum merupakan kewajiban untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu seperti premi asuransi, sewa dan lain-lainnya.

1) Uang Muka

Pengakuan :

Uang Muka diakui sebagai aset ketika entitas melakukan pembayaran di muka kepada pemasok atau pihak lain untuk barang atau jasa yang akan diterima di masa

mendatang. Uang Muka biasanya diakui sebagai aset lancar jika barang atau jasa tersebut diharapkan akan diterima dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal entitas, mana yang lebih lama.

Pengukuran :

Pada pengakuan awal, uang muka diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Ini mencerminkan jumlah kas yang dikeluarkan oleh entitas untuk memperoleh hak atas barang atau jasa di masa mendatang.

Setelah pengakuan awal, uang muka tetap diukur pada nilai tercatatnya (jumlah yang dibayarkan), sampai saat barang atau jasa tersebut diterima atau diserahkan.

Ketika barang atau jasa yang dibayar di muka diterima, jumlah yang diakui sebagai uang muka dipindahkan dari aset lancar ke biaya dalam Laporan Laba Rugi atau ke akun aset lain yang sesuai.

Pengungkapan :

Uang muka biasanya disajikan sebagai aset lancar di Laporan Posisi Keuangan jika barang atau jasa diharapkan akan diterima dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal entitas.

2) Biaya Dibayar Dimuka

Pengakuan :

Biaya dibayar dimuka diakui sebagai aset ketika entitas melakukan pembayaran untuk biaya-biaya yang seharusnya akan diakui sebagai beban di masa mendatang, karena barang atau jasa yang terkait belum diterima atau digunakan pada saat pembayaran dilakukan.

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, biaya dibayar dimuka diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Ini biasanya mencerminkan biaya kas yang dikeluarkan oleh entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

Biaya dibayar dimuka diukur pada nilai tercatatnya (jumlah yang dibayarkan) dan diamortisasi sebagai beban selama periode di mana manfaat ekonomi dari biaya tersebut diperoleh. Amortisasi dilakukan secara sistematis selama periode yang mana

biaya tersebut terkait, misalnya biaya sewa yang dibayar di muka akan diamortisasi selama periode sewa.

Pengungkapan :

Yang diungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah biaya dibayar dimuka disajikan sebagai aset lancar di Laporan Posisi Keuangan, jika manfaat ekonomi dari biaya tersebut diharapkan akan dikonsumsi dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal entitas. Jika tidak, biaya dibayar dimuka disajikan sebagai aset tidak lancar.

8. Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka terdiri dari pajak penghasilan dibayar dimuka dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu :

- 1) Kelebihan pembayaran pajak Perusahaan, misalnya PPN yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya.
- 2) Kelebihan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibayarkan perusahaan pada periode berjalan dan periode sebelumnya (baik melalui pembayaran dimuka maupun pemotongan pajak oleh pihak ketiga) dari jumlah pajak terutang untuk periode-periode berikut.
- 3) PPN masukan adalah pajak perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga yang akan diperhitungkan dengan PPN keluarannya.

Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka adalah pembayaran dimuka atas pajak penghasilan perusahaan yang akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir, termasuk diantaranya PPh Pasal 25.

Pajak dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain melakukan transaksi dengan perusahaan atau pada saat dilakukan pembayaran oleh perusahaan ke kas negara, berdasarkan bukti potong pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP).

Pengakuan :

- 1) Pajak dibayar dimuka diakui sebagai aset ketika entitas telah melakukan pembayaran pajak lebih awal dari periode yang sesuai dengan pengakuan beban pajak. Ini terjadi ketika pajak telah dibayar lebih dari yang seharusnya terutang berdasarkan pendapatan atau laba yang dilaporkan untuk suatu periode tertentu.

- 2) Pajak dibayar dimuka juga diakui jika terjadi kelebihan pembayaran pajak dalam suatu periode yang akan dikompensasikan dengan kewajiban pajak di periode mendatang.

Pengukuran :

Pengukuran Awal:

Pajak dibayar dimuka diukur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada otoritas pajak. Ini mencerminkan kas atau sumber daya lain yang telah dikeluarkan oleh entitas untuk memenuhi kewajiban pajak di masa mendatang.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Pajak dibayar dimuka tetap diukur pada nilai tercatatnya (jumlah yang dibayarkan) sampai dapat direalisasikan, misalnya ketika di- *offset* dengan kewajiban pajak di masa depan atau ketika diakui sebagai pengembalian pajak.
- 2) Jika ada indikasi bahwa sebagian atau seluruh pajak dibayar dimuka tidak dapat digunakan atau tidak dapat direalisasikan, entitas perlu mengakui penurunan nilai atas aset pajak tersebut. Penurunan nilai ini diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Pengungkapan :

- 1) Rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya
- 2) Uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya

9. Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya adalah kategori aset yang mencakup berbagai jenis aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar utama seperti kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Aset lancar lainnya terdiri dari aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau dikonsumsi dalam waktu kurang dari satu tahun atau dalam siklus operasional normal entitas.

Pengakuan :

Aset lancar lainnya diakui ketika :

- 1) Entitas memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan yang akan diperoleh dari aset tersebut
- 2) Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan tersebut akan mengalir ke entitas
- 3) Nilai aset dapat diukur dengan andal

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Aset lancar lainnya biasanya diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan mencerminkan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Aset lancar lainnya biasanya tetap diukur pada nilai tercatatnya, yaitu biaya perolehan awal dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai, jika ada.
- 2) Jika terdapat indikasi bahwa nilai tercatat dari aset tersebut tidak dapat sepenuhnya dipulihkan (penurunan nilai), maka entitas harus mengukur aset tersebut pada nilai terpulihkan, yang merupakan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Pengungkapan :

- 1) Aset lancar lainnya disajikan sebagai pos tersendiri dalam bagian aset lancar di Laporan Posisi Keuangan, atau diklasifikasikan bersama dengan aset lancar lain yang sejenis jika dianggap lebih relevan atau dapat diandalkan.
- 2) Jika aset lancar lainnya tidak termasuk dalam kategori aset utama yang biasanya disajikan secara terpisah (seperti kas, piutang, persediaan, atau biaya dibayar dimuka), maka aset tersebut dapat digabungkan dalam satu pos “Aset Lancar Lainnya” dengan penjelasan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

10. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Mengacu pada kepemilikan saham atau bagian dalam perusahaan yang tidak dikendalikan secara penuh, tetapi di mana investor memiliki pengaruh sangat signifikan. Pengaruh signifikan ini biasanya didefinisikan sebagai kepemilikan antara 20% hingga 50% dari hak suara entitas tersebut.

Pengakuan :

Investasi pada entitas asosiasi diakui sebagai aset ketika entitas investor memperoleh kepemilikan yang memberikan pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasional entitas asosiasi. Pengakuan dilakukan pada tanggal ketika pengaruh signifikan diperoleh.

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, investasi pada entitas asosiasi diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian investasi tersebut, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya hukum, biaya *due diligence*, dan biaya broker.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

1) Metode Ekuitas :

- a. Menurut SAK EP, investasi pada entitas asosiasi umumnya diukur menggunakan metode ekuitas
- b. Dalam metode ekuitas, nilai tercatat dari investasi disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor dalam laba atau rugi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan.
- c. Investor mengakui bagiannya dalam laba atau rugi entitas asosiasi dalam Laporan Laba Rugi, dan bagian dari Laba atau Rugi tersebut menambah atau mengurangi nilai tercatat investasi
- d. Jika entitas asosiasi membagikan deviden jumlah deviden tersebut dikurangi dari nilai tercatat investasi, karena pembayaran deviden dianggap sebagai pengembalian investasi.
- e. Jika terdapat perubahan yang diakui langsung dalam ekuitas entitas asosiasi (misalnya revaluasi aset tetap), bagian investor dalam perubahan tersebut juga diakui langsung dalam ekuitas investor.

2) Penurunan Nilai

- a. Jika terdapat indikasi bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai, entitas perlu menilai apakah ada penurunan nilai yang perlu diakui.
- b. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat investasi melebihi jumlah terpulihkan, yang merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.
- c. Kerugian penurunan nilai diakui dalam Laporan Laba Rugi, dan jika nilai investasi kemudian pulih, pemulihan tersebut diakui hingga sebesar kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui.

Pengungkapan :

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, entitas harus mengungkapkan informasi yang cukup mengenai investasi pada entitas asosiasi, termasuk metode pengukuran yang digunakan, jumlah bagian dalam laba atau rugi entitas asosiasi, deviden yang diterima, dan setiap kerugian penurunan nilai yang diakui.

11. Investasi Pada Ventura Bersama

BUMD Air Minum menentukan jenis Ventura Bersama dimana BUMD Air Minum tersebut terlibat di dalamnya. Klasifikasi bersama sebagai Operasi Bersama atau Ventura Bersama tergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan.

Operator bersama mengakui hal-hal berikut dengan kepentingan dalam operasi bersama :

- a. Aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama.
- b. Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi bersama.
- c. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama.
- d. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama.
- e. Beban mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan Metode Ekuitas.

Pengakuan :

Pengakuan awal :

Investasi pada ventura bersama diakui sebagai aset pada saat entitas memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam ventura bersama. Pengakuan awal dilakukan pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh hak atas ventura bersama dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung.

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, investasi pada ventura bersama diukur pada biaya perolehan yang mencakup harga pembelian investasi dan biaya transaksi terkait.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Metode Pengakuan Proporsional (*Proportional Consolidation*) :

- a. Dalam metode ini, bagian dari aset, liabilitas, pendapatan, dan beban ventura bersama diakui secara proporsional dalam Laporan Keuangan investor. Ini berarti bahwa investor mengakui proporsi dari aset dan liabilitas ventura bersama dalam Laporan Posisi Keuangan, serta proporsi pendapatan dan beban dalam Laporan Laba Rugi.
 - b. Metode ini memberikan gambaran yang terperinci tentang kontribusi ventura bersama terhadap posisi keuangan dan hasil operasi investor.
- 2) Metode Ekuitas :
- a. Alternatif lainnya adalah metode ekuitas, di mana investasi pada ventura bersama diukur menggunakan metode ekuitas, sama seperti pada entitas asosiasi. Dalam hal ini, nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mencerminkan bagian investasi dalam Laba atau Rugi ventura bersama setelah tanggal perolehan.
 - b. Investor mengakui bagian dalam laba atau ventura bersama dalam Laporan Laba Rugi dan mengurangi nilai tercatat investasi dengan deviden yang diterima.
 - c. Jika terdapat penurunan nilai, nilai investasi disesuaikan dengan nilai terpulihkan.

Pengungkapan :

1. Investasi pada ventura bersama disajikan sebagai aset tidak lancar dalam Laporan Posisi Keuangan, mengingat sifatnya yang biasanya dipegang untuk jangka panjang.
2. Dalam Laporan Laba Rugi, proporsi pendapatan dan beban ventura bersama yang relevan diakui sesuai dengan metode yang digunakan.
3. Entitas harus mengungkapkan informasi yang cukup mengenai ventura bersama dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk:
 - a. Metode pengukuran yang digunakan
 - b. Proporsi kepemilikan dan pengaruh entitas dalam ventura bersama.
 - c. Bagian dalam Laba atau Rugi ventura bersama.
 - d. Informasi mengenai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban ventura bersama menggunakan metode konsolidasi proporsional.
 - e. Setiap kerugian penurunan nilai yang diakui dan dasar pengukurannya.

12. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa/*lessee* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee* melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Biaya perolehan untuk Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Properti Investasi pada awalnya diukur sebesar Biaya Perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Pengakuan :

Properti investasi diakui sebagai aset pada saat diperoleh. Pada pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh properti tersebut, seperti biaya notaris, biaya legal, dan biaya broker.

Pengukuran :

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Model Biaya :
 - a. Setelah pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.
 - b. Penyusutan dihitung berdasarkan umur ekonomis properti investasi menggunakan metode sistematis dan rasional. Umur ekonomis harus ditentukan berdasarkan estimasi masa manfaat properti.
- 2) Model Nilai Wajar (Jika Diizinkan) :

- a. Sebagai alternatif, entitas dapat memilih untuk mengukur properti investasi pada nilai wajar. Dalam hal ini, properti investasi diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dan perubahan nilai wajar diakui dalam Laporan Laba Rugi.
- b. Nilai wajar adalah harga jual yang dapat diterima pada tanggal pelaporan jika properti investasi dijual dalam transaksi yang wajar antara pihak yang memiliki pengetahuan dan bersedia untuk membeli.
- c. Pengukuran dengan model nilai wajar memerlukan pengungkapan yang lebih rinci mengenai dasar pengukuran nilai wajar, serta dampak dari perubahan nilai wajar terhadap Laporan Keuangan.

Pengungkapan :

- 1. Properti investasi disajikan sebagai aset tidak lancar dalam Laporan Posisi Keuangan mengingat sifatnya yang biasanya dipegang untuk jangka panjang.
- 2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, entitas harus mengungkapkan informasi yang cukup mengenai properti investasi, termasuk :
 - a. Metode pengukuran yang digunakan (model biaya atau model nilai wajar).
 - b. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk properti investasi.
 - c. Jika menggunakan model biaya, informasi mengenai umur ekonomis dan metode penyusutan yang digunakan.
 - d. Jika menggunakan model nilai wajar, informasi mengenai dasar, penilaian nilai wajar, termasuk asumsi yang digunakan, dan dampak perubahan nilai wajar.
 - e. Informasi mengenai sewa yang diterima atau terutang, serta ketentuan sewa jangka panjang atau perjanjian sewa yang relevan.

13. Aset Tetap

Aset tetap adalah jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aset ini biasanya memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau mendukung operasional perusahaan. Aset tetap dapat berupa barang berwujud (*tangible*).

Penetapan Umur Ekonomis dan Batasan mengenai Harga Perolehan Minimum yang dapat diperlakukan sebagai penambahan nilai aset tetap persatuan/unit untuk Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Umur	Biaya Perolehan
1	Tanah dan Penyempurnaan Tanah		Tidak Terbatas
2	Instalasi Sumber Air	20 tahun	Rp25.000.000,-
3	Instalasi Pompa	16 tahun	Rp25.000.000,-
4	Instalasi Pengelolaan Air	20 tahun	Rp25.000.000,-
5	Instalasi Transmisi & Distribusi	20 tahun	Rp25.000.000,-
6	Bangunan & Gedung	20 tahun	Rp50.000.000,-
7	Peralatan & Perlengkapan	4 tahun	Rp5.000.000,-
8	Kendaraan & Alat Pengangkutan	4 tahun	Rp20.000.000,-
9	Inventaris Perabot kantor	4 tahun	Rp2.000.000,-

Pengakuan :

Aset Tetap pada awalnya diakui sebagai Biaya Perolehan yang meliputi harga perolehan dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya Perolehan Aset Tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.
2. Biaya Perolehan dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Berdasarkan pertimbangan materialitas, suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap diakui/dikapitalisasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal :

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan aset dikapitalisasi dan diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset tetap sebagai berikut:

- Biaya perawatan sehari-hari dari aset tetap diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya.
- Biaya lainnya yang dikeluarkan selama penggunaan aset tetap (biaya perbaikan, biaya penggantian, dan biaya penambahan). Biaya tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap jika memenuhi kriteria berikut:
 - Besar kemungkinan perusahaan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.
 - Biaya tersebut dapat diukur secara andal.
- Batasan kapitalisasi aset tetap telah dijabarkan dalam Daftar Aset Tetap. Jika biaya perolehan atas aset tetap di bawah nilai pada tabel di atas, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan. Dalam menentukan batasan atas biaya kapitalisasi suatu aset tetap, perusahaan memutuskan bahwa biaya kapitalisasi yang telah ditentukan tidak mengikat pada setiap aset tetap dan biaya kapitalisasi tersebut dapat ditentukan dari sifat dan tujuan dari aset tetap itu sendiri.

Pengungkapan :

1. Aset tetap disajikan sebagai aset tidak lancar dalam Laporan Posisi Keuangan, mengingat sifatnya yang diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Dalam Catatan Atas Laporan, entitas harus mengungkapkan informasi mengenai:
 - a. Kebijakan Akuntansi : metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat ekonomis, dan kebijakan akuntansi terkait.
 - b. Nilai Tercatat dan Perolehan : Biaya perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai tercatat pada awal dan akhir periode.
 - c. Revaluasi : jika menggunakan model revaluasi, informasi tentang dasar penilaian nilai wajar, tanggal penilaian, dan dampak perubahan nilai wajar.
 - d. Kerugian Penurunan Nilai : Jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui, serta dasar pengukurannya.

Depresiasi Aset Tetap :

Depresiasi Aset Tetap dimulai ketika aset digunakan dan berakhir ketika aset dihentikan pengakuannya. Depresiasi tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya (aset tidak produktif), kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Beban Depresiasi harus diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Pengelompokan untuk Depresiasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :

a. Bukan Bangunan

1) Kelompok 1

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 (empat) tahun.

2) Kelompok 2

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.

3) Kelompok 3

Harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 (delapan) tahun dan tidak lebih dari 16 (enam belas) tahun.

4) Kelompok 4

Harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 (enam belas) tahun.

b. Bangunan

1) Permanen

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 20 (dua puluh) tahun.

2) Tidak Permanen

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 10 (sepuluh) tahun.

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau amortisasi Harta Tak Berwujud dikelompokkan jenis-jenis Aset Tetap untuk keperluan tarif depresiasi sebagai berikut:

Uraian	Umur	Garis Lurus
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 tahun	25%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%

Uraian	Umur	Garis Lurus
Kelompok 4	20 tahun	5%
Bangunan		
Permanen	20 tahun	5%
Tidak Permanen	10 tahun	10%

14. Akuntansi Model Revaluasi Aset Tetap

Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap yang berada dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Suatu aset tetap dikatakan berada dalam kelompok yang sama dilihat dari sifat kegunaan yang berupa dalam operasi normal entitas.

Pengakuan :

- a. Sama dengan model biaya, aset tetap diakui pada saat diperoleh jika entitas memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.
- b. Pada pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran :

- a. Model Revaluasi :
 - 1) Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih untuk mengukur aset tetap pada nilai wajar jika nilai wajar dapat diukur secara andal.
 - 2) Nilai Wajar : nilai wajar adalah harga jual yang dapat diterima untuk aset pada tanggal penilaian dalam transaksi yang wajar antara pihak yang berpengetahuan dan bersedia.
 - 3) Penilaian : penilaian ulang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara signifikan dari nilai wajar pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.
- b. Pengukuran Pada Tanggal Revaluasi :
 - 1) Pada tanggal revaluasi, aset tetap diukur pada nilai wajar yang ditentukan oleh penilai independen atau metode penilaian yang sesuai.
 - 2) Nilai tercatat baru setelah revaluasi adalah nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

c. Pengakuan Kenaikan dan Penurunan Nilai :

- 1) Kenaikan Nilai : kenaikan nilai wajar yang melebihi nilai tercatat sebelum revaluasi diakui sebagai surplus revaluasi dalam ekuitas, di bawah akun “Revaluasi Surplus” (jika tidak dapat diimbangi dengan kerugian sebelumnya yang diakui dalam Laporan Laba Rugi).
- 2) Penurunan Nilai : penurunan nilai yang mengakibatkan nilai tercatat di bawah nilai wajar diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi, kecuali jika penurunan nilai melebihi surplus revaluasi yang sebelumnya diakui dalam ekuitas untuk aset tersebut.

d. Penyusutan Setelah Revaluasi :

Setelah revaluasi, penyusutan dihitung berdasarkan nilai tercatat baru dari aset. Masa manfaat ekonomis yang diperbarui mungkin perlu dievaluasi setelah revaluasi.

Pengungkapan :

Pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung adalah :

- a. Rincian Aset Tetap menurut jenis dan akumulasi depresiasi, serta jumlah depresiasi pada tahun berjalan.
- b. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang dijamin dan nama pihak yang menerima jaminan Nilai Aset Tetap yang diasuransikan, nilai pertanggungan.
- c. Asuransi dan risiko yang ditutup.
- d. Jika dilakukan penilaian kembali pada periode yang disajikan harus diungkapkan.
- e. Dasar hukum.
- f. Tanggal surat (persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak).
- g. Nama penilai independen.
- h. Dasar/metode yang digunakan untuk menentukan nilai revaluasi.
- i. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.
- j. Selisih penilaian kembali setiap jenis Aset Tetap, pengungkapan menurut jenis Aset Tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan atau metode depresiasi.
- k. Pengungkapan nilai buku, hasil penjualan bersih, keuntungan (kerugian) dari Aset Tetap yang dijual.
- l. Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai, rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan

dan komponen Laporan Laba Rugi Komprehensif dimana kerugian tersebut dilaporkan Pemulihan kerugian tersebut dilaporkan.

15. Aset Pajak Tangguhan

Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan / atau akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan (dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan), diakui dan dicatat sebagai Aset Pajak Tangguhan.

Aset Pajak Tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset Pajak Tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum kompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau Liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan :

- a. Aset pajak tangguhan diakui jika ada kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh keuntungan pajak di masa depan yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak masa depan. Ini berarti entitas harus dapat membuktikan adanya laba yang cukup yang akan memungkinkan pemanfaatan aset pajak tangguhan tersebut.
- b. Aset pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer yang dapat dipulihkan antara nilai tercatat aset atau liabilitas dan nilai yang diakui untuk tujuan pajak.

Pengukuran :

a. Pengukuran Awal

Aset pajak tangguhan diukur pada nilai terpulihkan, yaitu jumlah yang diharapkan akan diklaim atau dipulihkan di masa depan. Nilai terpulihkan biasanya didasarkan pada tarif pajak yang berlaku pada saat pajak tersebut dipulihkan.

b. Penurunan Nilai

Aset pajak tangguhan harus dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah nilai tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan. Jika nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, maka entitas harus mengakui penurunan nilai. Penurunan nilai diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Penurunan nilai dapat diakui jika entitas tidak mengharapkan menghasilkan laba yang cukup untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan.

c. Tarif Pajak

Aset pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat pemulihan diperkirakan akan terjadi. Jika tarif pajak yang berlaku di masa depan diperkirakan akan berbeda dari tarif saat ini, tarif yang diharapkan digunakan untuk mengukur aset pajak tangguhan.

Pengungkapan :

- a. Rincian mengenai jumlah aset pajak tangguhan yang diakui dan sifat perbedaan temporer yang menghasilkan aset pajak tangguhan.
- b. Tarif pajak yang digunakan untuk mengukur aset pajak tangguhan dan perubahan tarif pajak yang signifikan yang dapat mempengaruhi pengukuran.
- c. Penjelasan mengenai asumsi dan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai terpulihkan dari aset pajak tangguhan.
- d. Jika ada penurunan nilai aset pajak tangguhan, harus diungkapkan alasan dan jumlah penurunan nilai yang diakui.

16. Aset Tidak Berwujud Selain *Goodwill*

Aset tidak berwujud selain goodwill adalah kategori aset tidak berwujud yang tidak termasuk dalam kategori goodwill. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang kepada entitas. Aset tidak berwujud tersebut seringkali berasal dari hak-hak atau keuntungan yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Pengakuan :

Aset tidak berwujud diakui jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Kemungkinan Manfaat ekonomi : entitas mengharapkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.
- b. Kontrol : entitas memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset tersebut.
- c. Biaya Dapat Diukur Secara Andal : biaya perolehan atau biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset dapat diukur secara andal.

Aset tidak berwujud diakui pada biaya perolehan jika diperoleh secara terpisah, atau pada nilai wajar jika diperoleh melalui akuisisi (misalnya dalam akuisisi bisnis).

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada saat pengakuan awal, aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan, yang mencakup harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk mendapatkan aset tersebut dalam kondisi dan lokasi yang siap untuk digunakan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

Model Biaya :

- a. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
- b. Amortisasi : aset tidak berwujud diamortisasi selama masa manfaat ekonomisnya yang dapat diestimasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode sistematis yang mencerminkan pola manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aset.
- c. Kerugian penurunan nilai : aset tidak berwujud harus dievaluasi secara berkala untuk penurunan nilai. Jika nilai tercatat melebihi jumlah terpulihkan, kerugian penurunan nilai harus diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Model Revaluasi :

- a. Jika aset tidak berwujud memiliki pasar aktif : jika aset tidak berwujud memiliki pasar aktif dimana harga dapat ditentukan secara andal, entitas dapat memilih untuk mengukur aset tidak berwujud pada nilai wajar setelah pengakuan awal.
- b. Pengukuran dan pengakuan : aset tidak berwujud diukur pada nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Setiap kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui sesuai dengan kebijakan pengukuran yang diterapkan.

Pengungkapan :

Informasi mengenai aset tidak berwujud :

- a. Kebijakan Akuntansi : metode amortisasi yang digunakan dan masa manfaat ekonomis yang diterapkan.
- b. Biaya perolehan dan nilai tercatat : biaya perolehan, akumulasi amortisasi, dan nilai tercatat pada awal dan akhir periode.
- c. Kenaikan dan penurunan nilai : jika menggunakan metode revolusi, informasi tentang dasar penilaian wajar, termasuk metode dan asumsi yang digunakan, serta dampak perubahan nilai wajar.
- d. Kerugian penurunan nilai : jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui, dan dasar pengukurannya.

17. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis dan *goodwill* adalah proses akuisisi atau penggabungan dua atau lebih entitas bisnis menjadi satu entitas yang lebih besar atau baru. Proses ini dapat terjadi melalui merger, akuisisi, atau penggabungan bisnis.

Jenis kombinasi bisnis :

- a. Merger : dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru, dan perusahaan yang ada sebelumnya menghilang sebagai entitas hukum.
- b. Akuisisi : satu perusahaan membeli saham atau aset perusahaan lain untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Perusahaan yang diakuisisi mungkin tetap ada sebagai entitas hukum, tetapi dikendalikan oleh perusahaan pembeli.
- c. Penggabungan : entitas baru dibentuk dari penggabungan dua atau lebih entitas yang ada. Biasanya, perusahaan yang terlibat dalam penggabungan akan membentuk entitas baru.

Goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul saat satu entitas mengakuisisi entitas lain dan membayar lebih dari nilai wajar bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih. *Goodwill* mencerminkan nilai tambah yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dan mencakup elemen seperti reputasi, hubungan pelanggan, dan kekuatan merek.

Pengakuan :

Pada saat kombinasi bisnis, entitas yang memperoleh kontrol atas entitas lain diidentifikasi sebagai pembeli.

Goodwill diakui sebagai selisih antara biaya perolehan akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh pada tanggal akuisisi.

- a. Biaya perolehan : biaya perolehan mencakup harga pembelian, biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung, dan biaya lain yang terkait dengan akuisisi.
- b. Nilai wajar aset bersih : aset bersih yang diperoleh diukur pada nilai wajar, dikurangi liabilitas yang diambil alih.
- c. $Goodwill = \text{biaya perolehan} - \text{nilai wajar aset bersih yang diperoleh}$.

Pengukuran :

Pengukuran Awal :

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi, liabilitas, dan kewajiban kontinjensi dari entitas yang diakuisisi diukur pada nilai wajar. Ini mencakup :

- a. Aset : aset yang diperoleh diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.
- b. Liabilitas : liabilitas yang diambil alih diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.
- c. Kewajiban kontinjensi : kewajiban kontinjensi yang diidentifikasi harus diukur pada nilai wajar.

Pengukuran Awal : *Goodwill* diakui sebagai aset tidak berwujud pada tanggal akuisisi.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- a. *Goodwill* : setelah pengakuan awal, *goodwill* tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai secara tahunan atau lebih sering jika ada indikasi penurunan nilai.
- b. Penurunan nilai : *goodwill* diuji untuk penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang terkait. Jika nilai tercatat melebihi jumlah terpulihkan, kerugian penurunan nilai diakui.

Pengungkapan :

- a. Kombinasi Bisnis :
 - 1) Detail Kombinasi : informasi tentang tanggal akuisisi, alasan kombinasi bisnis, dan cara akuisisi dilakukan (misalnya : pembelian saham, merger).
 - 2) Aset dan Liabilitas yang diakuisisi : rincian mengenai nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.
 - 3) Biaya perolehan dan *Goodwill* : jumlah biaya perolehan, nilai wajar aset bersih yang diperoleh, dan jumlah *goodwill* yang diakui.
- b. *Goodwill* :
 - 1) Pengukuran : metode pengukuran dan dasar penilaian yang digunakan untuk mengukur *goodwill*.

- 2) Uji penurunan nilai : kebijakan yang diterapkan untuk pengujian penurunan nilai *goodwill*, serta hasil uji penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai yang diakui, jika ada.

18. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset sewaan kepada grup. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Hak aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan diakui sebagai aset grup pada nilai wajar aset sewaan (atau, jika lebih rendah, pada nilai kini pembayaran sewa minimum) pada inisiasi sewa. Liabilitas kepada pesewa tercakup dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai kewajiban sewa pembiayaan. Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya keuangan dan pengurang kewajiban sewa sehingga tercapai tingkat bunga konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan dikurangkan dalam mengukur laba atau rugi. Aset yang dikuasai dalam sewa pembiayaan termasuk dalam aset tetap, didepresiasi dan dinilai untuk kerugian penurunan nilai dengan cara yang sama seperti aset yang dimiliki. Utang sewa dalam sewa operasi dibebankan ke laba rugi.

Pengakuan :

a. Sewa Operasi :

Pengakuan awal : dalam sewa operasi, penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas sewa di Laporan Posisi Keuangan. Sebagai gantinya, sewa dibayar secara periodik dan biaya sewa diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi selama periode sewa.

b. Sewa Pembiayaan :

Pengakuan awal : dalam sewa pembiayaan, penyewa mengakui aset sewa dan liabilitas sewa pada Laporan Posisi Keuangan. Aset sewa diukur pada nilai wajar aset sewa pada awal sewa atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum, mana yang lebih rendah.

Pengukuran :

Beban sewa diakui dengan jumlah yang dibayar atau terutang dalam periode akuntansi, tanpa mengakui aset dan liabilitas sewa di Laporan Posisi Keuangan.

Pengukuran Awal :

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa minimum yang belum dibayar. Pembayaran sewa yang termasuk pembayaran bunga dan pokok dikurangkan dari liabilitas sewa.

Amortisasi dan Beban Bunga :

Aset sewa diamortisasi selama periode sewa atau masa manfaat ekonomis aset, mana yang lebih pendek. Beban bunga dihitung berdasarkan tingkat diskonto yang berlaku untuk liabilitas sewa.

Pengungkapan :

- Detail sewa : jenis sewa, metode pengukuran yang digunakan, dan masa sewa.
- Jadwal pembayaran sewa : rincian pembayaran sewa minimum yang terutang dalam jangka waktu tertentu.
- Kebijakan Akuntansi : kebijakan yang diterapkan dalam akuntansi sewa, termasuk metode amortisasi dan tingkat diskonto yang digunakan.

19. Provisi dan Kontinjensi

Provisi dan Kontinjensi adalah istilah akuntansi yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran kewajiban yang mungkin timbul di masa depan. Keduanya diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dengan tujuan untuk memastikan Laporan Keuangan mencerminkan kewajiban yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Provisi adalah kewajiban yang diakui pada neraca ketika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah atau waktu pelunasannya. Provisi diakui ketika memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam SAK EP.

Kontinjensi adalah potensi kewajiban atau aset yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kontinjensi dapat dikategorikan sebagai kontinjensi kewajiban atau kontinjensi aset.

Pengakuan :

1. Provisi

- a. Provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini (baik yang bersifat hukum atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

- b. Terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Jumlah kewajiban tersebut dapat disetisasi secara andal.

2. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam Laporan Keuangan karena kewajiban tersebut tergantung pada peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali entitas.

3. Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi tidak diakui dalam Laporan Keuangan karena pendapatan yang mungkin dihasilkan dari aset tersebut tidak pasti.

Pengukuran :

1. Provisi

- a. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada akhir periode pelaporan.
- b. Jika efek dari nilai waktu yang signifikan, jumlah provisi harus merupakan nilai kini dari pengeluaran yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban.

2. Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Ini berarti tidak ada pengukuran aset kontinjensi yang diharuskan dalam laporan keuangan. Aset kontinjensi hanya diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas di masa depan.

Pengungkapan :

1. Provisi

- a. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan sifat kewajiban, perkiraan waktu penyelesaian, indikasi ketidakpastian terkait jumlah atau waktu arus kas yang terkait, dan penjelasan tentang perubahan jumlah provisi selama periode pelaporan.
- b. Pengungkapan tambahan mungkin diperlukan jika ada potensi risiko yang material.

2. Aset Kontinjensi

- a. Aset kontinjensi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas.
- b. Pengungkapan mencakup sifat dari aset kontinjensi.

20. Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya mencakup berbagai aset yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap, aset tidak berwujud, atau investasi jangka panjang. Aset ini tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar dan biasanya memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tidak Lancar Lainnya mengacu pada aset jangka panjang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori aset tetap atau aset tidak berwujud yang spesifik. Ini sering kali mencakup berbagai aset yang tidak sesuai dengan definisi kategori utama lainnya tetapi tetap memiliki nilai dan manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Pengakuan :

Aset tidak lancar lainnya diakui dalam laporan keuangan jika :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi masa depan : ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas.
- b. Biaya atau nilai wajar dapat diukur secara andal : biaya perolehan atau nilai wajar aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengukuran :

- a. Pengukuran awal : aset tidak lancar lainnya umumnya diukur pada biaya perolehan saat pengakuan awal. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, termasuk pajak pembelian, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai dengan tujuannya.
- b. Pengukuran setelah pengakuan awal : setelah pengakuan awal, aset tidak lancar lainnya dapat diukur dengan salah satu dari dua model, tergantung pada jenis aset dan kebijakan akuntansi entitas.
 - Model biaya : aset tidak lancar lainnya diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (jika berlaku) dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
 - Model revaluasi : aset tidak lancar lainnya diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan (jika berlaku) dan akumulasi kerugian penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Pengungkapan :

Entitas harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai aset tidak lancar lainnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur aset tidak lancar lainnya.
- b. Jumlah tercatat dari setiap kategori aset tidak lancar lainnya pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.
- c. Rincian penyusutan atau amortisasi dan penurunan nilai yang diakui selama periode pelaporan.
- d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, menunjukkan penambahan, pelepasan, penyesuaian, dan perubahan lainnya selama periode tersebut.
- e. Informasi tentang penilaian kembali jika entitas menggunakan model revaluasi, termasuk kapan penilaian kembali dilakukan dan nilai wajar yang digunakan.
- f. Aset yang disusutkan sepenuhnya tetapi masih digunakan.

21. Utang Usaha

Utang Usaha merupakan liabilitas jangka pendek yang diakui pada saat timbulnya suatu kewajiban dari suatu transaksi normal perusahaan, dimana barang dan jasa telah diterima dan dibuktikan dengan adanya suatu Berita Acara Serah Terima, namun pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian.

Pengakuan :

Utang usaha diakui sebagai kewajiban dalam Laporan Keuangan ketika :

- a. Kewajiban kini : entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, seperti penerimaan barang atau jasa dari pemasok.
- b. Arus keluar sumber daya : terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Nilai kewajiban dapat diukur dengan andal : jumlah utang dapat diukur dengan andal, misalnya, sesuai dengan faktur yang diterima dari pemasok.

Pengukuran :

- a. Pengukuran awal : utang usaha diukur pada nilai nominal atau biaya perolehan pada saat pengakuan awal. Ini biasanya merupakan jumlah yang tercatat dalam faktur yang diterima dari pemasok atau harga kontraktual yang telah disepakati.
- b. Pengukuran setelah pengakuan awal :

- Setelah pengakuan awal, utang usaha diukur pada nilai tercatat atau jumlah yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, yang merupakan nilai nominal dikurangi pembayaran yang telah dilakukan atau penyesuaian lainnya.
- Utang usaha tidak memerlukan pengukuran lebih lanjut kecuali ada perubahan dalam jumlah yang harus dibayar, seperti diskon atau penyesuaian akibat sengketa dengan pemasok.

Pengungkapan :

Entitas harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai utang usaha dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk :

- Jumlah tercatat dari utang usaha yang diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar.
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur utang usaha.
- Jatuh tempo dari utang usaha, termasuk rincian mengenai utang usaha yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- Informasi tentang diskon yang diperoleh atau diberikan jika ada, dan bagaimana hal tersebut diakui dalam Laporan Keuangan.
- Jumlah utang usaha dalam mata uang asing jika ada, beserta kebijakan konversi mata uang yang digunakan.
- Perubahan signifikan dalam jumlah utang usaha dari satu periode pelaporan ke periode berikutnya, jika diperlukan penjelasan lebih lanjut.

22. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Adalah kewajiban yang timbul dari dana yang dipinjamkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu dan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembiayaan operasional, investasi, atau ekspansi bisnis, di mana perusahaan menerima dana dari lembaga keuangan dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Pengakuan :

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan diakui sebagai kewajiban dalam Laporan Keuangan ketika :

- a. Kewajiban kini : entitas memiliki kewajiban kini untuk membayar kembali pinjaman, yang timbul dari perjanjian pinjaman yang telah disepakati dengan bank atau lembaga keuangan.
- b. Arus keluar sumber daya : terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi di masa depan.
- c. Nilai kewajiban dapat diukur dengan andal : jumlah pinjaman, termasuk bunga yang terakumulasi, dapat diukur secara andal berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pengukuran :

- a. Pengukuran awal :

Pada saat pengakuan awal, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan diukur pada nilai wajar dari jumlah kas atau setara kas yang diterima. Jika ada biaya transaksi langsung yang terkait dengan perolehan pinjaman, biaya tersebut juga harus diperhitungkan dalam pengukuran awal pinjaman.

- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :

- 1) Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Ini berarti pinjaman diukur pada jumlah yang harus dibayar kembali, dikurangi dengan pembayaran pokok yang telah dilakukan dan ditambah dengan akumulasi amortisasi dari setiap perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan jumlah yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo.
- 2) Bunga yang terakumulasi diakui sebagai beban bunga dalam Laporan Laba Rugi selama periode pinjaman berjalan.

Pengungkapan :

- a. Jumlah tercatat dari pinjaman bank dan lembaga keuangan, yang dibedakan antara kewajiban lancar dan tidak lancar berdasarkan waktu jatuh tempo.
- b. Jadwal jatuh tempo dari pembayaran pinjaman, termasuk pembayaran pokok dan bunga.
- c. Suku bunga efektif yang digunakan untuk mengukur biaya pinjaman dan setiap perubahan dalam suku bunga yang berlaku selama periode pelaporan.
- d. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran pinjaman, termasuk metode amortisasi biaya pinjaman.

- e. Jaminan atau agunan yang diberikan untuk mendapatkan pinjaman, jika ada, termasuk nilai wajar dari jaminan tersebut.
- f. Ketentuan penting lainnya dalam perjanjian pinjaman, seperti ketentuan yang memungkinkan percepatan pembayaran, penalti untuk pelunasan awal, atau persyaratan lain yang dapat mempengaruhi kewajiban entitas.
- g. Pinjaman dalam mata uang asing, jika ada termasuk risiko terkait fluktuasi nilai tukar dan kebijakan lindung nilai yang diterapkan.

23. Utang Sewa Guna Usaha

Utang sewa guna usaha (*leasing*) adalah kewajiban keuangan yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha antara penyewa (*lessee*) dan pemberi sewa (*lessor*). Dalam konteks ini, perusahaan atau individu menyewa aset dari pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala, biasanya bulanan atau tahunan.

Pengakuan :

Utang sewa guna usaha diakui sebagai kewajiban dalam Laporan Keuangan pada tanggal dimulainya sewa, yaitu ketika aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh penyewa. Pada saat yang sama, aset hak guna (*right-of-use asset*) juga diakui di neraca. Pengakuan ini terjadi jika perjanjian sewa memenuhi kriteria tertentu, seperti sewa guna usaha pembiayaan (*finance lease*) yang secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa.

Pengukuran :

a. Pengukuran awal :

Pada saat pengakuan awal, utang sewa guna usaha diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pengukuran ini menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika dapat ditentukan, atau jika tidak dapat ditentukan, menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.

Pembayaran sewa minimum yang dimasukkan dalam pengukuran utang sewa guna usaha meliputi :

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansial).
- Pembayaran variabel yang tergantung pada indeks atau tingkat.
- Jumlah yang diharapkan akan dibayar oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa.
- Harga eksekusi opsi beli (jika secara wajar dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dieksekusi).

- Penalti karena penghentian awal sewa (jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melakukan opsi tersebut).
- b. Pengukuran setelah pengakuan awal :
 - 1) Setelah pengakuan awal, utang sewa guna usaha diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
 - 2) Utang sewa guna usaha disesuaikan untuk mencerminkan pembayaran sewa yang dilakukan, dan beban bunga yang terakumulasi diakui selama masa sewa.
 - 3) Jika ada perubahan dalam estimasi jumlah pembayaran yang akan dilakukan atau modifikasi dalam perjanjian sewa, utang sewa guna usaha mungkin perlu diukur kembali dengan menyesuaikan aset hak guna secara proporsional.

Pengungkapan :

- a. Nilai tercatat dari sewa guna usaha pada akhir periode pelaporan, yang dibedakan antara kewajiban lancar dan tidak lancar.
- b. Rincian pembayaran sewa minimum yang akan dilakukan dalam periode satu tahun, lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun, dan lebih dari lima tahun.
- c. Beban bunga yang diakui terkait dengan utang sewa guna usaha selama periode pelaporan.
- d. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur utang sewa guna usaha dan aset hak guna.
- e. Informasi mengenai modifikasi sewa yang mempengaruhi jumlah utang sewa guna usaha yang diakui.
- f. Risiko yang timbul dari perjanjian sewa, termasuk risiko suku bunga dan risiko likuiditas.
- g. Penjelasan mengenai ketentuan dalam perjanjian sewa yang dapat berdampak signifikan terhadap pengukuran utang sewa guna usaha, seperti opsi pembelian, perpanjangan, atau penghentian sewa lebih awal. Ikatan–ikatan penting yang diprasyarkan dalam perjanjian sewa guna usaha (*major covenants*).

24. Utang Pajak

Jumlah pajak kini yang belum dibayar, termasuk liabilitas untuk menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut / dipotong dari pihak ketiga diakui dan dicatat sebagai utang pajak.

Pengakuan :

Utang pajak diakui sebagai kewajiban dalam Laporan Keuangan ketika :

- a. Kewajiban kini : entitas memiliki kewajiban kini kepada otoritas pajak berdasarkan hukum pajak yang berlaku, yang muncul dari peristiwa masa lalu, seperti penghasilan kena pajak.
- b. Arus keluar sumber daya : terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi di masa depan.
- c. Jumlah kewajiban dapat diukur dengan andal : jumlah utang pajak, baik pajak kini (*current tax*) maupun pajak tangguhan (*deferred tax*), dapat diukur dengan andal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengukuran :

- a. Pengukuran utang pajak kini :
 - Utang pajak kini diukur berdasarkan jumlah pajak yang terutang kepada otoritas pajak, dihitung dari Laba Kena Pajak (*taxable profit*) selama periode berjalan. Jumlah ini mencerminkan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar dalam periode pelaporan.
 - Jika terdapat perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak karena perbedaan waktu atau pengakuan pendapatan dan beban, maka hal ini dapat menimbulkan utang pajak tangguhan.
- b. Pengukuran utang pajak tangguhan :
 - Utang pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan, yang akan diterapkan pada periode ketika aset pajak tangguhan direalisasikan atau kewajiban pajak tangguhan diselesaikan.
 - Pajak tangguhan muncul karena perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak untuk aset dan kewajiban tersebut.

Pengungkapan :

- a. Jumlah utang pajak kini pada akhir periode pelaporan, yang mencakup kewajiban pajak yang harus dibayar kepada otoritas pajak.
- b. Jumlah utang pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan, beserta rincian mengenai sumber perbedaan temporer yang menyebabkan pengakuan utang pajak tangguhan.

- c. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur pajak kini dan pajak tangguhan, termasuk tarif pajak yang berlaku dan metode yang digunakan untuk mengukur aset dan kewajiban pajak tangguhan.
- d. Rekonsiliasi laba akuntansi dengan laba kena pajak, yang menjelaskan perbedaan utama antara keduanya dan dampaknya terhadap pengakuan utang pajak.
- e. Rincian mengenai ketidakpastian pajak. Jika terdapat ketidakpastian mengenai perlakuan pajak, entitas harus mengungkapkan kemungkinan dampaknya terhadap utang pajak.
- f. Perubahan signifikan dalam utang pajak dari satu periode ke periode berikutnya, termasuk perubahan dalam tarif pajak atau peraturan perpajakan yang mempengaruhi jumlah utang pajak.
- g. Kontinjensi pajak jika ada, yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak di masa depan, serta informasi mengenai potensi dampak dari sengketa pajak atau pemeriksaan pajak yang sedang berlangsung.

25. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul dari biaya yang sudah terjadi namun belum dibayar pada akhir periode Laporan Keuangan. Biaya ini diakui sebagai kewajiban dalam Laporan Keuangan untuk mencerminkan kewajiban yang harus dibayar di masa depan terkait dengan biaya yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan selama periode pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Biaya yang masih harus dibayar diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban untuk membayar suatu jumlah tertentu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh entitas, tetapi belum dibayar pada akhir periode pelaporan.
- 2) Liabilitas ini niatnya timbul ketika entitas telah menerima barang atau jasa, atau ketika suatu kontrak telah dilaksanakan, tetapi pembayaran belum dilakukan.

Pengukuran :

- a. Biaya yang masih harus dibayar diukur sebesar jumlah nominal kewajiban yang harus dibayar oleh entitas.
- b. Jika biaya yang masih harus dibayar memiliki komponen bunga (misalnya, kewajiban jangka panjang), biaya tersebut harus diukur pada nilai kini dari jumlah yang akan dibayar.

- c. Pengukuran biaya ini harus mempertimbangkan setiap potensi diskon atau penalti yang mungkin terkait dengan pembayaran yang tertunda.

Pengungkapan :

- 1) Biaya yang masih harus dibayar harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan, terutama dalam neraca sebagai bagian dari liabilitas lancar jika kewajiban tersebut jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam siklus operasi normal entitas.
- 2) Jika relevan, rincian tambahan mengenai sifat dan jumlah biaya yang masih harus dibayar, serta ketentuan pembayaran yang terkait, juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Pengungkapan juga harus mencakup informasi yang relevan jika terdapat ketidakpastian dalam pengukuran atau waktu pembayaran biaya tersebut.

26. Hibah Pemerintah

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) adalah dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada entitas untuk tujuan tertentu. Hibah ini biasanya diberikan untuk mendukung kegiatan operasional atau investasi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hibah pemerintah tidak perlu dibayar kembali dan sering kali digunakan untuk tujuan yang mendukung kepentingan publik atau kegiatan yang berhubungan dengan program-program pemerintah.

Hibah Pemerintah adalah transfer dana atau peralatan atau tanah dari pemerintah kepada entitas, baik itu perusahaan, organisasi non profit, atau lembaga publik, dengan tujuan tertentu. Hibah ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur, penelitian, pelatihan, atau proyek sosial.

Pengakuan :

- 1) Hibah pemerintah diakui sebagai pendapatan atau aset ketika terdapat kepastian yang memadai bahwa :
 - a. Entitas akan memenuhi kondisi yang terkait dengan hibah tersebut.
 - b. Hibah akan diterima entitas.
- 2) Jika hibah tersebut diberikan untuk mendanai biaya tertentu atau pembelian aset tertentu, hibah pemerintah diakui sebagai pendapatan pada periode yang sama ketika biaya yang terkait diakui atau ketika aset tersebut digunakan.

Pengukuran :

- a. Hibah pemerintah diukur sebesar nilai wajar pada saat diterima atau pada saat hak atas hibah tersebut timbul.

- b. Jika hibah diberikan dalam bentuk aset non-moneter (misalnya tanah atau peralatan), maka hibah tersebut diukur sebesar nilai wajar dari aset yang diterima.

Pengungkapan :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui dan mengukur hibah pemerintah.
- 2) Sifat dan jumlah dari setiap hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan.
- 3) Kondisi atau ketentuan yang terkait dengan hibah tersebut, termasuk apakah ada ketidakpastian mengenai pemenuhan kondisi tersebut.
- 4) Pengaruh hibah pemerintah terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

27. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja yang terutang dan akan diberikan kepada pegawai dan direksi setelah menyelesaikan masa kerjanya/pensiun. Terdapat dua macam program tunjangan pensiun pegawai/direksi yaitu :

- 1) Apabila perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti :
 - a) Gambaran umum tentang program pensiun, pengelola dana pensiun, persentase iuran yang menjadi kontribusi perusahaan, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun dan lain-lain.
 - b) Jumlah beban (iuran) pensiun periode berjalan dan jumlah iuran pensiun yang masih harus dibayar.
 - c) Hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan program pensiun yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.
- 2) Apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti :
 - a) Gambaran umum tentang program pensiun, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, dan pengelolaannya.
 - b) Kebijakan pendanaan.
 - c) Rincian beban pensiun yang terdiri dari beban jasa kini, amortisasi beban jasa lalu, amortisasi.
 - d) Koreksi dan bunga atas beban pensiun yang masih harus dibayar, jangka waktu amortisasi beban jasa lalu.

- e) Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan aktuaris, nilai wajar aset bersih dana pensiun dan selisih lebih (kurang) antara liabilitas aktuarial dan nilai wajar aset bersih.
- f) Rekonsiliasi beban pensiun yang masih harus dibayar (dibayar dimuka)
- g) Bila dilakukan perubahan metode aktuarial, alasan perubahan, jumlah penyesuaian.
- h) Perubahan terhadap Laporan Keuangan periode sajian, dan jumlah penyesuaian.
- i) Berhubungan dengan masa sebelum periode sajian tanggal penilaian aktuarial terakhir, nama aktuaris, dan frekuensi penilaian dilakukan.
- j) Hal-hal penting lain yang berhubungan dengan manfaat pensiun termasuk dampak.
- k) Pembubaran, pengurangan peserta yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dihitung mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pengakuan :

- a) Imbalan pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan ketika karyawan telah memberikan jasanya dan entitas memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk memberikan imbalan pasca kerja di masa depan.
- b) Jenis imbalan pasca kerja yang umum mencakup pensiun, tunjangan kesehatan setelah pensiun, atau imbalan lainnya yang diberikan setelah masa kerja berakhir.

Pengukuran :

- a) Kewajiban imbalan pasca kerja diukur menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Metode ini mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan serta asumsi keuangan seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat pengembalian aset program (jika ada).
- b) Liabilitas imbalan pasca kerja diukur pada nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan, dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada).
- c) Jika ada keuntungan atau kerugian aktuarial (perubahan dalam asumsi aktuarial atau perbedaan antara asumsi dan kenyataan), entitas harus memilih kebijakan akuntansi

apakah akan mengakui keuntungan atau kerugian ini langsung dalam laba rugi atau sebagai bagian dari pendapatan komprehensif.

Pengungkapan :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk imbalan pasca kerja.
- b) Rekonsiliasi liabilitas imbalan pasti yang mencakup saldo awal dan akhir, kontribusi dari majikan, manfaat yang dibayarkan, dan setiap penyesuaian lainnya.
- c) Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan, seperti tingkat diskonto, kenaikan gaji, tingkat inflasi, dan asumsi demografis.
- d) Dampak dari perubahan asumsi aktuarial terhadap liabilitas imbalan pasti.
- e) Jika ada, nilai wajar aset program yang terkait dengan kewajiban imbalan pasca kerja dan bagaimana aset ini diinvestasikan.

28. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah kewajiban pajak yang timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas di laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan mencerminkan pajak yang harus dibayar di masa depan karena perbedaan temporer yang menghasilkan kewajiban pajak yang akan dikenakan pada masa depan.

Pengakuan :

- a) Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika ada perbedaan temporer yang dapat dikenakan pajak di masa depan. Perbedaan ini timbul dari perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas di laporan keuangan dengan basis pajaknya.
- b) Liabilitas pajak tangguhan diakui jika timbul dari :
 - Perbedaan temporer kena pajak, seperti perbedaan antara nilai buku aset dan liabilitas dengan basis pajaknya yang lebih rendah.
 - Kewajiban pajak penghasilan yang belum dibayar yang timbul dari perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan atau beban di laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Pengukuran :

- a) Liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang diharapkan berlaku pada periode ketika liabilitas pajak tangguhan akan direalisasikan atau diselesaikan.

- b) Pengukuran harus memperhitungkan tarif pajak yang berlaku pada saat liabilitas tersebut diperkirakan akan dikenakan, dengan mempertimbangkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Pengungkapan :

- a) Jumlah dan sifat dari perbedaan temporer yang menjadi dasar pengakuan liabilitas pajak tangguhan.
- b) Rincian dari liabilitas pajak tangguhan, termasuk perbedaan antara liabilitas pajak tangguhan yang diharapkan direalisasikan dalam satu tahun dan yang akan terjadi setelah satu tahun.
- c) Tarif pajak yang digunakan untuk mengukur liabilitas pajak tangguhan.
- d) Perubahan signifikan dalam liabilitas pajak tangguhan selama periode pelaporan.

29. Penyertaan Pemerintah Daerah

Penyertaan Pemerintah Daerah untuk BUMD Air Minum yang Berbadan Hukum

Perumda :

- a) Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan, merupakan semua penyertaan modal dari pemerintah setempat berupa uang, barang dan peralatan, biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan bentuk lainnya yang bersumber dari anggaran belanja maupun pembangunan.
- b) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek air bersih yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan.
- c) Modal hibah, merupakan penerimaan barang-barang atau peralatan yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterikatan apapun.
- d) Cadangan umum adalah dana atau akumulasi yang dipisahkan dari laba perusahaan untuk menghadapi kemungkinan risiko atau kewajiban yang mungkin timbul di masa depan. Dalam konteks akuntansi, cadangan umum berfungsi sebagai bentuk perlindungan finansial yang disiapkan untuk mengatasi ketidakpastian atau potensi kerugian yang tidak dapat diukur dengan tepat saat ini.
- e) Laba ditahan (akumulasi kerugian), dalam perkiraan ini dibukukan sisa laba tahun-tahun lalu yang ditahan, akumulasi kerugian tahun-tahun lalu, dan sisa laba tahun berjalan setelah dikurangi pajak penghasilan atau rugi tahun berjalan.

- f) Saldo laba tahun berjalan, adalah jumlah laba yang tersisa setelah dikurangi seluruh beban dan pajak dari total pendapatan perusahaan.

Pengakuan :

- a. Penyertaan modal pemerintah diakui sebagai ekuitas atau sebagai bagian dari ekuitas jika pemerintah memberikan dana atau aset dengan tujuan untuk meningkatkan modal entitas atau untuk mendukung kegiatan operasional entitas.
- b. Pengakuan dilakukan pada saat entitas memperoleh hak atas penyertaan modal tersebut dan penyertaan tersebut memenuhi kriteria pengakuan.

Pengukuran :

- a. Penyertaan modal pemerintah diukur pada nilai wajar atau nilai nominal dari dana atau aset yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Jika penyertaan modal berupa uang tunai, maka jumlah yang diakui adalah jumlah uang tunai yang diterima.
- c. Jika penyertaan modal berupa aset non-moneter (seperti tanah atau peralatan), maka penyertaan tersebut diukur sebesar nilai wajar dari aset yang diterima pada saat diterima.

Pengungkapan :

- a. Jumlah dan sifat dari penyertaan modal pemerintah yang diterima.
- b. Rincian tentang kondisi atau ketentuan yang mungkin terkait dengan penyertaan modal tersebut.
- c. Pengaruh penyertaan modal terhadap struktur ekuitas dan posisi keuangan entitas.
- d. Perubahan dalam penyertaan modal pemerintah selama periode pelaporan, termasuk kontribusi baru, penarikan, atau perubahan lainnya.

30. Saldo Laba

Yang diungkapkan antara lain adalah alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada), perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait, misalnya jumlah deviden yang dibayarkan, saldo laba yang ditentukan penggunaannya, dan lain-lain.

Pengungkapan :

Rincian menurut jenis dan jumlah

31. Kepentingan Non Pengendali

Merujuk pada bagian kepemilikan saham atau hak atas aset dalam suatu entitas anak yang dimiliki oleh pihak-pihak selain pemilik pengendali (biasanya entitas induk). Dalam konteks konsolidasi laporan keuangan, kepentingan non pengendali adalah proporsi dari ekuitas anak yang tidak dimiliki oleh entitas induk, melainkan oleh pemegang saham eksternal atau investor lain.

Pengungkapan :

Rincian menurut jenis dan jumlah.

6.2 Kebijakan Akuntansi Akun-akun Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

1. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Usaha dan Pendapatan Non Usaha. Pendapatan Usaha meliputi Pendapatan Penjualan Air (baik diproduksi sendiri atau dibeli untuk dijual kembali), dan Pendapatan Non Air seperti Sambungan Baru, Pemeriksaan Laboratorium, Penyambungan Kembali. Sedangkan Pendapatan Non Operasional meliputi pendapatan Bunga Deposito, Jasa Giro, Sewa, Royalti dan Deviden.

Pendapatan Penjualan Air, merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan air. Diakui dengan terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD).

Pendapatan Penjualan Non Air, yang berasal dari sambungan baru diakui setelah pekerjaan selesai dilakukan dengan diterbitkannya daftar piutang/tagihan non air atau penerimaan kas/bank. Dalam pengakuan pendapatan sambungan baru, pembebanan Harga Pokok Penjualan harus diakui dengan konsep *matching cost against revenue*.

Pendapatan Non Usaha diakui dalam Laporan Laba Rugi jika timbul hak untuk memperoleh pendapatan dengan andal.

Pengakuan :

Pendapatan diakui ketika :

- a) Kewajiban pelaporan terpenuhi : pendapatan diakui pada saat entitas telah memenuhi kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan.
- b) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke entitas.
- c) Biaya yang berkaitan dengan transaksi dapat diukur dengan andal.

- Pendapatan dari penjualan barang biasanya diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli dan risiko serta manfaat kepemilikan telah berpindah.
- Pendapatan dari penyediaan jasa diakui berdasarkan kemajuan penyelesaian jasa, biasanya dengan menggunakan metode persentase penyelesaian.
- Pendapatan dari bunga, deviden, dan sewa diakui pada saat hak entitas untuk menerima pembayaran diakui.

Pengukuran :

- a) Pendapatan diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan sebagai imbalan untuk barang atau jasa yang diberikan.
- b) Pengukuran ini harus mempertimbangkan diskon, retur, dan potongan lain yang mungkin mempengaruhi jumlah yang diterima.
- c) Untuk pendapatan dari kontrak jangka panjang, seperti konstruksi, metode persentase penyelesaian dapat digunakan untuk mengukur pendapatan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilakukan.

Pengungkapan :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan.
- b) Klasifikasi pendapatan menurut jenis, seperti penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, deviden, dan sewa.
- c) Jumlah pendapatan yang diakui selama periode pelaporan.
- d) Sumber pendapatan yang signifikan, seperti pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.
- e) Estimasi dan asumsi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan, terutama jika menggunakan metode persentase penyelesaian untuk kontrak jangka panjang.
- f) Pengaruh perubahan dalam kebijakan akuntansi atau estimasi terhadap pendapatan yang diakui.

2. Beban

Beban adalah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam rangka menjalankan operasional bisnisnya dan untuk menghasilkan pendapatan. Beban mencakup berbagai jenis pengeluaran yang mempengaruhi laba bersih perusahaan, dan biasanya diakui dalam Laporan Laba Rugi.

a) Beban Langsung. Yang diungkapkan antara lain:

1) Terdiri dari Beban Pokok Produksi yang dirinci :

- Beban Sumber Air
- Beban Pengolahan Air
- Beban Transmisi dan Distribusi

2) Beban Harga Pokok Sambungan Baru

b) Beban Tidak langsung (Beban Administrasi dan Umum)

Pengakuan :

Biaya keuangan diakui dalam Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya, kecuali jika standar mengharuskan atau mengizinkan kapitalisasi biaya keuangan sebagai bagian dari aset tertentu.

- a) Biaya bunga : biaya bunga diakui sebagai beban selama periode di mana biaya tersebut timbul, terlepas dari kapan pembayaran bunga dilakukan.
- b) Kapitalisasi biaya keuangan : biaya keuangan yang dapat langsung diatribusikan pada perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasikan (seperti properti, pabrik, atau peralatan yang membutuhkan waktu lama untuk siap digunakan atau dijual) dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset tersebut.
- c) Biaya transaksi : biaya yang terkait dengan penerbitan utang atau memperoleh pinjaman diakui sebagai bagian dari utang tersebut dan diamortisasi selama umur utang dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengukuran :

- a) Biaya bunga : diukur berdasarkan tingkat bunga efektif atau tingkat bunga nominal tergantung pada apakah entitas menggunakan metode amortisasi biaya yang terpengaruh oleh suku bunga efektif.
- b) Kapitalisasi biaya keuangan : diukur berdasarkan biaya yang sebenarnya terjadi selama periode perolehan aset kualifikasian, dengan mempertimbangkan jumlah pinjaman yang digunakan dan tingkat bunga yang berlaku.
- c) Biaya transaksi : diukur dan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif dari utang yang terkait.

Pengungkapan :

- a) Total biaya keuangan : harus diungkapkan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai bagian dari total beban selama periode tersebut.

- b) Rincian biaya keuangan : termasuk bunga atas pinjaman, biaya transaksi yang diamortisasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan. Rincian ini memberikan transparansi mengenai komponen biaya keuangan yang dikenakan kepada entitas.
- c) Kapitalisasi biaya keuangan : jika ada biaya keuangan yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset kualifikasian, entitas harus mengungkapkan jumlah biaya yang dikapitalisasi selama periode tersebut serta aset yang bersangkutan.
- d) Kebijakan akuntansi : harus diungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dalam pengakuan dan pengukuran biaya keuangan, termasuk kebijakan kapitalisasi biaya keuangan dan metode amortisasi biaya transaksi.
- e) Pinjaman atau utang terkait : pengungkapan informasi tentang pinjaman atau utang yang terkait dengan biaya keuangan, termasuk rincian tentang suku bunga, jatuh tempo, dan syarat pembayaran.
- f) Pengungkapan tambahan : jika ada pengaturan atau kondisi khusus yang mempengaruhi biaya keuangan, seperti kesepakatan pembayaran kembali yang berbeda dari ketentuan pinjaman standar, entitas harus mengungkapkan informasi tersebut.

3. Biaya Keuangan

Biaya Keuangan adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pendanaan atau pembiayaan perusahaan. Biaya ini mencakup berbagai biaya yang timbul dari penggunaan atau peminjaman dana, baik dalam bentuk utang maupun modal. Biaya keuangan berperan dalam mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola pendanaan dan dapat mempengaruhi profitabilitas serta kesehatan finansial perusahaan.

Pengakuan :

- a. Biaya keuangan diakui dalam Laporan Laba Rugi pada periode dimana biaya tersebut terjadi.
- b. Biaya keuangan mencakup biaya bunga yang timbul dari pinjaman, kewajiban sewa, diskonto dari penerbitan obligasi, dan biaya terkait lainnya.
- c. Jika biaya keuangan terkait dengan aset yang memenuhi syarat (misalnya aset yang memerlukan waktu substansial untuk siap digunakan atau dijual), biaya bunga dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut.

Pengukuran :

- a. Biaya keuangan diukur sebesar jumlah yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atau berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari pinjaman atau instrumen keuangan yang terkait.
- b. Untuk biaya bunga, suku bunga efektif digunakan untuk menghitung biaya keuangan terkait, yang mencerminkan nilai waktu dari uang serta risiko yang terkait dengan instrumen tersebut.
- c. Jika biaya keuangan dikapitalisasi, biaya tersebut diukur sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang memenuhi syarat, berdasarkan biaya bunga yang terjadi selama periode pembangunan atau pembuatan aset tersebut.

Pengungkapan :

- a. Jumlah total biaya keuangan yang diakui selama periode pelaporan.
- b. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan dan pengukuran biaya keuangan, termasuk apakah ada biaya keuangan yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang memenuhi syarat.
- c. Jika ada biaya keuangan yang dikapitalisasi, rincian tentang jumlah yang dikapitalisasi dan aset yang terkait juga harus diungkapkan.
- d. Sumber biaya keuangan utama, seperti pinjaman, obligasi, atau kewajiban sewa, dan suku bunga efektif yang digunakan.
- e. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi atau estimasi yang berdampak pada biaya keuangan yang diakui.

4. Pajak Penghasilan Kini

Pajak penghasilan kini adalah pajak yang harus dibayar atau dibayar dimuka oleh perusahaan atau individu atas penghasilan yang diperoleh selama periode akuntansi saat ini. Pajak penghasilan kini mencakup kewajiban pajak yang timbul dari penghasilan yang diakui dalam Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan harus dibayar kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Pengakuan :

Pajak penghasilan kini diakui sebagai kewajiban (utang pajak) dalam Laporan Keuangan ketika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar pajak yang timbul dari laba kena pajak untuk periode berjalan. Jika jumlah

pajak yang sudah dibayar untuk periode berjalan melebihi jumlah yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset (pajak dibayar dimuka).

- a. Pengakuan utang pajak kini : diakui pada akhir periode pelaporan untuk semua pajak yang masih terutang kepada otoritas pajak.
- b. Pengakuan pajak dibayar di muka : diakui jika pajak yang sudah dibayar melebihi kewajiban.

Pengukuran :

- a. Dasar pengukuran : pajak penghasilan kini diukur berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan.
- b. Perhitungan laba kena pajak : laba kena pajak dihitung dengan melakukan penyesuaian terhadap laba akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang mungkin termasuk pengurangan dan penambahan tertentu yang diakui atau diakui kemudian dalam perhitungan laba akuntansi.
- c. Koreksi pajak : jika terdapat koreksi atau penyesuaian terhadap jumlah pajak yang terutang di periode sebelumnya, maka penyesuaian tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan.

Pengungkapan :

- a. Jumlah pajak penghasilan kini : diungkapkan sebagai bagian dari total beban pajak dalam Laporan Laba Rugi komprehensif, yang menunjukkan beban pajak yang timbul dari laba kena pajak periode tersebut.
- b. Rekonsiliasi tarif pajak : penyajian rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak dengan beban pajak kini, yang menunjukkan bagaimana tarif pajak efektif diterapkan pada laba akuntansi untuk menghitung pajak kini. Ini termasuk penjelasan mengenai perbedaan yang signifikan, seperti penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau biaya yang tidak dapat dikurangkan.
- c. Kebijakan akuntansi : pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan kini, termasuk metode perhitungan dan penyesuaian yang dibuat untuk menghitung laba kena pajak.
- d. Pajak dibayar dimuka atau utang pajak : jika entitas memiliki pajak dibayar dimuka atau utang pajak, jumlah ini harus diungkapkan di neraca sebagai aset atau kewajiban lancar.

- e. Informasi tentang sengketa pajak atau kontinjensi : jika terdapat sengketa pajak atau kontinjensi pajak yang material, entitas harus mengungkapkan potensi dampaknya terhadap kewajiban pajak di masa depan.
- f. Dampak perubahan tarif pajak atau peraturan pajak : jika ada perubahan signifikan dalam tarif pajak atau peraturan pajak yang mempengaruhi kewajiban pajak kini, dampak perubahan tersebut harus diungkapkan.

5. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Adalah konsep akuntansi yang berkaitan dengan perbedaan antara pajak yang diakui dalam Laporan Laba Rugi dan pajak yang sebenarnya dibayar atau diterima. Ini berkaitan dengan pengakuan pajak atas perbedaan temporer yang timbul dari perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan atau beban untuk tujuan akuntansi dan pengakuan untuk tujuan perpajakan.

Pengakuan :

Pendapatan atau beban pajak tangguhan diakui dalam Laporan Laba Rugi ketika terdapat perbedaan temporer yang akan berbalik pada periode mendatang dan mempengaruhi laba kena pajak. Pengakuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak dari pemulihan atau penyelesaian nilai tercatat aset dan kewajiban yang diakui dalam Laporan Keuangan.

- a. Aset pajak tangguhan : diakui ketika terdapat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, jika besar kemungkinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk memanfaatkan perbedaan tersebut.
- b. Kewajiban pajak tangguhan : diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Kecuali jika perbedaan tersebut timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau dari pengakuan awal aset atau kewajiban dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak.

Pengukuran :

- a. Penghasilan Komprehensif Lainnya diukur sesuai dengan standar akuntansi terkait yang berlaku untuk jenis transaksi atau peristiwa yang menghasilkan penghasilan tersebut.
- b. Pengukuran Penghasilan Komprehensif Lainnya biasanya dilakukan pada nilai wajar atau jumlah yang diukur ulang dari aset atau kewajiban yang bersangkutan.

- c. Setiap perubahan dalam nilai wajar atau jumlah tercatat yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya harus didasarkan pada standar akuntansi spesifik, seperti SAK untuk instrumen keuangan, aset tetap, atau program imbalan pasti.

Pengungkapan :

Pengungkapan ini meliputi :

- a. Komponen penghasilan komprehensif lainnya : harus diungkapkan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi atau peristiwa yang menyumbang pada *Other Comprehensive Income* (OCI). Misalnya, penyesuaian penilaian kembali aset tetap harus diungkapkan terpisah dari penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan.
- b. Total penghasilan komprehensif lainnya : harus diungkapkan baik untuk periode berjalan maupun periode sebelumnya jika disajikan secara komparatif.
- c. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir komponen ekuitas : yang terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya, misalnya saldo awal dan akhir dari surplus revaluasi aset atau cadangan penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri.
- d. Dampak pajak : jika ada, entitas harus mengungkapkan jumlah sebelum pajak dan dampak pajak terkait untuk setiap komponen penghasilan komprehensif lainnya.
- e. Realisasi penghasilan komprehensif lainnya : jika penghasilan komprehensif lain yang sebelumnya diakui di ekuitas kemudian diakui dalam laba rugi (misalnya, saat aset dijual atau instrumen lindung nilai jatuh tempo), entitas harus mengungkapkan jumlah dan penyebab realisasi tersebut.
- f. Kebijakan akuntansi : yang digunakan untuk mengukur dan mengakui penghasilan komprehensif lainnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Penghasilan Komprehensif Lainnya

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) penghasilan komprehensif lainnya adalah komponen dari Laporan Keuangan yang mencakup semua pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam Laporan Laba Rugi, tetapi mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Penghasilan komprehensif lainnya memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan dalam ekuitas selain dari laba bersih yang dihasilkan selama periode pelaporan.

Pengakuan :

Penghasilan komprehensif lainnya diakui ketika transaksi atau peristiwa terjadi yang menghasilkan perubahan dalam nilai aset atau kewajiban, tetapi belum diakui dalam Laporan Laba Rugi. Komponen yang biasanya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya meliputi :

- a. Keuntungan dan kerugian aktuarial dari program imbalan pasti (misalnya, perubahan nilai wajar aset program dan perubahan kewajiban imbalan pasti).
- b. Keuntungan dan kerugian dari penilaian kembali aset tetap atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar.
- c. Keuntungan dan kerugian selisih kurs dari penjabaran Laporan Keuangan operasi luar negeri.
- d. Keuntungan dan kerugian dari instrumen lindung nilai yang efektif, terutama yang terkait dengan lindung nilai arus kas.
- e. Penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pengukuran :

- a. Penghasilan komprehensif lainnya diukur sesuai dengan standar akuntansi terkait yang berlaku untuk jenis transaksi atau peristiwa yang menghasilkan penghasilan tersebut.
- b. Pengukuran penghasilan komprehensif lainnya biasanya dilakukan pada nilai wajar atau jumlah yang diukur ulang dari aset atau kewajiban yang bersangkutan.
- c. Setiap perubahan dalam nilai wajar atau jumlah tercatat yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya harus didasarkan pada standar akuntansi spesifik, seperti SAK untuk instrumen keuangan, aset tetap, atau program imbalan pasti.

Pengungkapan :

Pengungkapan ini meliputi :

- a. Komponen penghasilan komprehensif lainnya : harus diungkapkan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi atau peristiwa yang menyumbang pada OCI. Misalnya, penyesuaian penilaian kembali aset tetap harus diungkapkan terpisah dari penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan.
- b. Total penghasilan komprehensif lainnya : harus diungkapkan baik untuk periode berjalan maupun periode sebelumnya jika disajikan secara komparatif.

- c. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir komponen ekuitas : yang terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya, misalnya saldo awal dan akhir dari surplus revaluasi aset atau cadangan penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri.
- d. Dampak pajak : jika ada, entitas harus mengungkapkan jumlah sebelum pajak dan dampak pajak terkait untuk setiap komponen penghasilan komprehensif lainnya.
- e. Realisasi penghasilan komprehensif lainnya : jika penghasilan komprehensif lain yang sebelumnya diakui di ekuitas kemudian diakui dalam laba rugi (misalnya, saat aset dijual atau instrumen lindung nilai jatuh tempo), entitas harus mengungkapkan jumlah dan penyebab realisasi tersebut.
- f. Kebijakan akuntansi : yang digunakan untuk mengukur dan mengakui penghasilan komprehensif lainnya harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Laba Per Saham

Laba Per Saham (LPS) adalah ukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan jumlah laba bersih yang dihasilkan untuk setiap lembar saham yang beredar. Laba Per Saham digunakan untuk memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan dan untuk membantu investor dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan potensi keuntungan.

Laba Per Saham (LPS) adalah rasio yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini memberikan informasi tentang seberapa banyak laba yang dihasilkan per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Pengakuan :

Laba per saham diakui dan disajikan dalam Laporan Laba Rugi komprehensif jika entitas memilih untuk mengungkapkan informasi ini. *Earning Per Share* (EPS) terutama dihitung untuk saham biasa (*ordinary shares*) dan bertujuan memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diatribusikan kepada setiap saham yang beredar selama periode pelaporan.

Pengukuran :

- a. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa : langkah pertama dalam menghitung EPS adalah menentukan laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa. Laba bersih ini dapat disesuaikan

dengan pengaruh dari saham preferen, seperti deviden preferen, yang harus dikurangi dari laba sebelum menghitung EPS.

- b. Jumlah saham biasa yang beredar :
 - 1) EPS dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode pelaporan.
 - 2) Jika ada perubahan dalam jumlah saham yang beredar selama periode pelaporan (misalnya karena penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, atau deviden saham), entitas harus menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar.
 - 3) Laba per saham dasar dan dilusi.
 - Laba per saham dasar : dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode.
 - Laba per saham dilusi : dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk memperhitungkan dampak dari instrumen potensial yang dapat dilutif, seperti opsi saham, waran, atau obligasi konversi, yang jika dilaksanakan akan meningkatkan jumlah saham biasa yang beredar.

Pengungkapan :

Jika entitas memutuskan untuk mengungkapkan laba per saham, maka harus mengungkapkan informasi berikut :

- a. Laba per saham dasar dan dilusi harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif untuk setiap periode pelaporan.
- b. Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusi harus diungkapkan, termasuk rincian tentang bagaimana angka tersebut dihitung.
- c. Penyesuaian yang dilakukan terhadap laba bersih yang digunakan dalam perhitungan EPS, seperti deviden preferen atau penyesuaian untuk instrumen yang berpotensi dilutif.
- d. Instrumen yang berpotensi dilutif : jika ada, entitas harus mengungkapkan efek dari instrumen yang berpotensi dilutif terhadap perhitungan laba per saham dilusi.

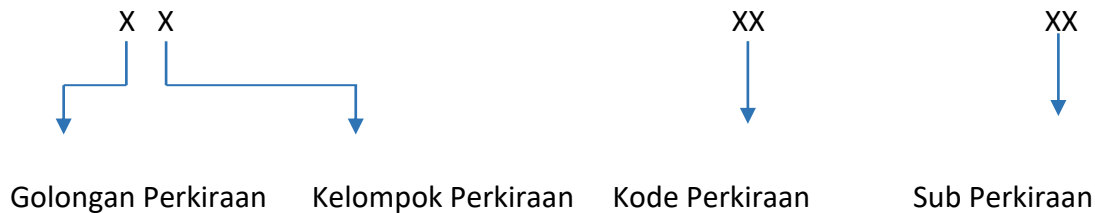
- 
- e. Perubahan dalam metode pengukuran. Jika ada perubahan dalam metode pengukuran atau perhitungan EPS dibandingkan dengan periode sebelumnya, entitas harus mengungkapkan alasan perubahan tersebut dan dampaknya terhadap perhitungan laba per saham.

BAB VII

KODE AKUN/ PERKIRAAN AKUNTANSI

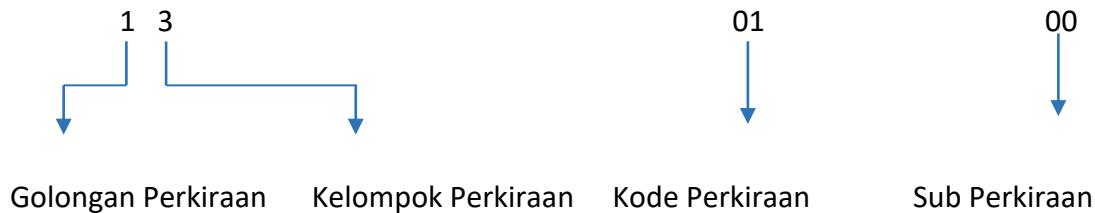
7.1 Sistematika Penomoran Kode Akun / Perkiraan

Sistematika penomoran kode akun / perkiraan rekening, terdiri dari 6 digit dengan penjelasan sebagai berikut :



Contoh kode akun/perkiraan/rekening :

13.01.00 adalah kode perkiraan untuk Piutang Usaha



Selanjutnya piutang usaha tersebut masih dapat dibagi ke dalam beberapa jenis kelompok pelanggan. Sebagai contoh :

13.01.10 = Piutang rekening hidran/WC/Kran Umum

13.01.11 = Piutang Kelompok Sosial A (IA)

7.2 Media Pencatatan

Media pencatatan transaksi yang digunakan terdiri dari harian/jurnal, buku besar dan buku pembantu.

1. Jurnal

Buku harian/jurnal yang biasa juga disebut sebagai buku/media pencatatan transaksi pertama (*book of original entry*), dilakukan secara harian dan ditutup setiap akhir bulan. Buku harian harian/jurnal tersebut terdiri dari :

1) DVUD (Daftar Voucher Utang yang harus Dibayar)

Setiap transaksi biaya dan pembelian yang telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, harus segera dibuatkan bukti/pengakuan utang yang sah (voucher) yang merupakan dasar pencatatan ke dalam DVUD.

2) JR (Jurnal Rekening)

Dipergunakan untuk menjurnal semua rekening/penjurnalan air dan pendapatan non air yang diterbitkan, termasuk semua koreksi atas rekening penjualan air dan pendapatan non air.

3) JPK (Jurnal Penerimaan Kas)

Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi penerimaan kas/bank.

4) JBK (Jurnal Bayar Kas)

Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi pembayaran kas/bank.

5) JPBIK (Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia)

Dipergunakan untuk menjurnal semua pemakaian/pengeluaran bahan, alat dan perlengkapan dan menjurnal semua koreksi atas pengeluaran bahan, alat dan perlengkapan.

6) JU (Jurnal Umum)

Tidak semua transaksi keuangan dapat dicatat pada buku harian/jurnal khusus yang ada. Oleh karena itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam buku-buku harian/jurnal khusus dipergunakan untuk menjurnal tersebut digunakan Buku Harian/Jurnal Umum.

2. Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat di dalam buku-buku jurnal/harian pada tiap akhir bulan diposting (dibukukan berdasarkan perkiraannya masing-masing) ke dalam buku besar. Untuk transaksi yang dicatat ke dalam buku jurnal umum, posting dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pencatatan ke dalam jurnal umum tersebut. Angka-angka saldo buku besar selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Neraca Lajur.

3. Buku Pembantu

Rincian Buku Besar ini harus dibuat sebagai Buku Besar untuk perkiraan-perkiraan tentu. Dari Buku Pembantu yang ada dibuatkan daftar saldo pada setiap akhir bulan untuk dicocokkan dengan saldo perkiraan buku besar yang bersangkutan. Transaksi yang telah dicatat di dalam buku-buku jurnal/harian pada tiap akhir bulan diposting (dibukukan) berdasarkan perkiraannya.

7.3 Kode Perkiraan Akuntansi Laporan Posisi Keuangan

Kode	Uraian
1	ASET LANCAR
11	KAS DAN BANK
11.01	KAS / BANK
11.01.10	Kas Besar - Rupiah
11.01.11	Kas Besar - Valas
11.01.xx	Bank xxxxx
12	INVESTASI JANGKA PENDEK
12.01	DEPOSITO
12.01.01	Investasi Jangka Pendek
12.01.02	Deposito Rupiah
12.02	SURAT BERHARGA
12.02.01	Surat Berharga
12.02.90	Akumulasi Penurunan Nilai Surat Berharga

Kode	Uraian
13	PIUTANG USAHA
13.01	PIUTANG REKENING AIR
13.01.09	Piutang Rekening
13.01.10	Piutang Rekening Hidran/WC/Kran Umum
13.01.11	Piutang Sosial A (Kelompok IA)
13.01.12	Piutang Sosial B (Kelompok IB)
13.01.13	Piutang Sosial A (Kelompok 1a)
13.01.14	Piutang Sosial B (Kelompok 1b)
13.01.20	Piutang Rekening Tempat Ibadah / Sekolah / Sosial
13.01.30	Piutang Rek. Pelanggan Non Niaga – Rumah Tangga
13.01.31	Piutang Rumah Tangga A (Kelompok IIA)
13.01.32	Piutang Rumah Tangga B (Kelompok IIB)
13.01.33	Piutang Rumah Tangga C (Kelompok IIC)
13.01.34	Piutang Rumah Tangga A (Kelompok 2a)

Kode	Uraian
13.01.35	Piutang Rumah Tangga B (Kelompok 2b)
13.01.36	Piutang Rumah Tangga C (Kelompok 2c)
13.01.40	Piutang Rekening Home Industry / Warung / Bengkel
13.01.41	Piutang Niaga Kecil/Toko/Ruko
13.01.42	Piutang Niaga Kecil (Kelompok IIIA)
13.01.43	Piutang Niaga Besar (Kelompok IIIB)
13.01.44	Piutang Niaga Kecil (Kelompok 3a)
13.01.45	Piutang Niaga Sedang (Kelompok 3b)
13.01.46	Piutang Niaga Besar (Kelompok 3c)
13.01.50	Piutang Rudin / Instansi Tk.I,II,III
13.01.51	Piutang Asrama TNI/Polri/Brimob/Kompi
13.01.52	Piutang Instansi/Dinas (Kelompok IIIC)
13.01.53	Piutang Instansi/Dinas (Kelompok 3d)
13.01.60	Piutang BUMN/BUMD/Bank Pemerintah
13.01.61	Piutang Hotel/Industri Besar
13.01.62	Piutang BUMN/BUMD/Bank (Kelompok IIID)
13.01.63	Piutang Asrama TNI/Polri (Kelompok IIIE)
13.01.64	Piutang Industri/Usaha Besar/Hotel (Kelompok IIIF)
13.01.65	Piutang BUMN/BUMD/Bank (Kelompok 3e)
13.01.66	Piutang Asrama TNI/Polri (Kelompok 3f)
13.01.67	Piutang Industri/Usaha Besar/Hotel (Kelompok 3g)
13.01.70	Piutang Kelompok Khusus/Pelabuhan
13.01.71	Piutang Kelompok Khusus/Pelabuhan (Kelompok IV)
13.01.72	Piutang Kelompok Khusus/Pelabuhan (Kelompok 4)
13.01.80	Piutang Air Tangki
13.01.90	Rekening Air lainnya
13.02	PIUTANG REKENING NON AIR
13.02.10	Piutang Rekening Sambungan Baru
13.02.20	Piutang Rekening Sewa Instalasi
13.02.30	Piutang Rekening Non Air Lainnya

Kode	Uraian
13.02.90	Piutang Pendapatan Air Limbah / Tinja
13.03	PIUTANG KEMITRAAN
13.03.10	Piutang Kemitraan
13.09	PENYISIHAN PIUTANG USAHA
13.09.10	Cadangan Penyisihan Piutang Rekening Air/Tangki
13.09.30	Cadangan Penyisihan Piutang Rekening Non Air/Limbah

Kode	Uraian
14	PIUTANG LAIN-LAIN
14.01	TAGIHAN NON USAHA
14.01.10	Piutang Lain-lain Non Usaha
14.01.20	Pinjaman Pegawai Direksi
14.01.30	Pinjaman Pegawai Kepala Bagian
14.01.40	Pinjaman Pegawai Pelaksana
14.01.50	Pinjaman Pegawai Pihak III
14.01.60	Pinjaman Pegawai Pihak III - Barang
14.01.90	Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai
14.02	PIUTANG PAJAK
14.02.10	Piutang Pajak Penghasilan (PPh 21)
14.02.20	Piutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
14.03	PENDAPATAN YANG BELUM DITERIMA
14.03.04	Pendapatan Yang Akan Diterima
14.03.10	Pendapatan Bunga
14.03.20	Pendapatan Sewa Rumah Dinas
14.03.30	Pendapatan Sewa Tanah
14.03.40	Pendapatan Sewa Peralatan
14.03.90	Pendapatan Sewa Lain-lain
14.09	RUPA-RUPA PIUTANG LAINNYA
14.09.10	Pinjaman Sementara
14.09.11	Piutang Dalam Proses Hukum

Kode	Uraian
14.09.20	Pinjaman Pegawai Pertanggungjawaban UMK
14.09.30	Piutang Lainnya
14.09.90	Cadangan Penyisihan Rupa-rupa Piutang lainnya

Kode	Uraian
15	PERSEDIAAN
15.01	PERSEDIAAN BAHAN OPERASI KIMIA
15.01.01	Persediaan Aluminium Sulfat
15.01.02	Persediaan Kaporit
15.01.03	Persediaan PAC
15.01.04	Persediaan Soda Ash
15.01.05	Persediaan Kapur Tohor
15.02	PERSEDIAAN BAHAN OPERASI LAINNYA
15.02.10	Bahan Pembantu
15.02.20	Bahan Bakar & Minyak Pelumas
15.02.30	Suku Cadang
15.02.70	Alat Tulis dan Cetak
15.02.90	Rupa-rupa Persediaan Bahan Operasi Lain
15.02.91	Akumulasi Penurunan Persediaan
15.03	PERSEDIAAN BAHAN INSTALASI
15.03.10	Pipa-pipa
15.03.20	Water Meter
15.03.30	Aksesoris SR
15.03.90	Bahan Instalasi
15.09	PERSEDIAAN LAIN-LAIN
15.09.10	Persediaan Dalam Perjalanan
15.09.20	Persediaan Bahan Penolong AMDK
15.09.90	Rupa-rupa Persediaan Lainnya

Kode	Uraian
16	PEMBAYARAN DIMUKA
16.01	BIAYA DIBAYAR DIMUKA
16.01.10	Sewa Dibayar Dimuka - Rumah
16.01.20	Sewa Dibayar Dimuka - Kantor
16.01.30	Sewa Dibayar Dimuka - Tanah
16.02	UANG MUKA KERJA
16.02.10	Uang Muka Operasi
16.02.11	Uang Muka Operasi Umum
16.02.12	Uang Muka Operasi Keuangan
16.02.13	Uang Muka Operasi Hubungan Langganan
16.02.14	Uang Muka Operasi SPI
16.02.15	Uang Muka Operasi Perencana Teknik
16.02.16	Uang Muka Operasi Transmisi Distribusi
16.02.17	Uang Muka Operasi PKA
16.02.18	Uang Muka Operasi IPA Nelas
16.02.19	Uang Muka Operasi IPA Surabaya
16.02.20	Uang Muka Perjalanan Dinas
16.02.30	Uang Muka Pengobatan
16.02.90	Uang Muka Kerja Lainnya
16.02.91	Akumulasi Penurunan Nilai Uang Muka Kerja
16.03	UANG MUKA PEMBELIAN
16.03.10	Uang Muka Pembelian Lokal
16.03.20	Uang Muka Pembelian Import
16.04	UANG MUKA KEPADA KONTAKTOR
16.04.10	Uang Muka Kontraktor Konstruksi
16.04.20	Uang Muka Kontraktor Pengadaan

Kode	Uraian
16.05	PEMBAYARAN DIMUKA PAJAK
16.05.10	PPh Ps.21

Kode	Uraian
16.05.20	PPh Ps.22
16.05.30	PPh Ps.23
16.05.40	PPh Ps.25

3 AKTIVA TETAP

31 AKTIVA TETAP PRODUKTIF

31.01 TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH

31.01.10	Tanah dan Hak Atas Tanah
31.01.20	Penyempurnaan Tanah

31.02 INSTALASI SUMBER AIR

31.02.10	Bangunan dan Perbaikannya
31.02.20	Reservoir Penampungan Air
31.02.30	Danau, Sungai & Sumber Air Lainnya
31.02.40	Mata Air dan Terowongan
31.02.50	Sumur-sumur
31.02.60	Pipa Supply Utama
31.02.90	Instalasi Sumber Air Lainnya

31.03 INSTALASI POMPA

31.03.10	Bangunan dan Perbaikannya
31.03.20	Pembangkit Tenaga Listrik
31.03.30	Peralatan Pompa
31.03.90	Instalasi Perpompaan Lainnya

Kode	Uraian
31.04	INSTALASI PENGOLAHAN AIR
31.04.10	Bangunan dan Perbaikannya
31.04.20	Alat-alat Pengolahan Air

Kode	Uraian
31.04.30	Reservoir/Penampungan Air
31.04.90	Instalasi Pengolahan Air Lainnya

31.05 INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

31.05.10	Bangunan dan Perbaikannya
----------	---------------------------

Kode	Uraian
31.05.20	Reservoir, Tandon dan Menara Air
31.05.30	Pipa Transmisi dan Distribusi
31.05.40	Pipa Dinas
31.05.50	Meter Air Yang Terpasang
31.05.60	Ledeng Umum
31.05.61	Terminal Air
31.05.70	Saluran Air Pemadam Kebakaran
31.05.80	Jembatan Pipa
31.05.90	Instalasi Transmisi dan Distribusi lain

31.06 BANGUNAN / GEDUNG

31.06.10	Bangunan Kantor
31.06.20	Bangunan Laboratorium
31.06.30	Bangunan Gedung Peralatan
31.06.40	Bangunan Bengkel
31.06.90	Bangunan Rumah Dinas

31.07 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

31.07.10	Alat-alat Pergudangan
31.07.11	Peralatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
31.07.20	Alat-alat Laboratorium
31.07.30	Alat-alat Perhubungan / Telekomunikasi
31.07.40	Alat-alat Perbengkelan
31.07.50	Alat-alat Berat
31.07.90	Rupa-rupa Alat dan Perlengkapan Lain

Kode	Uraian
31.08	KENDARAAN / ALAT PENGANGKUTAN
31.08.10	Kendaraan Roda 4 (Empat)
31.08.20	Kendaraan Roda 2 (Dua)
31.08.30	Kendaraan Penumpang
31.08.40	Kendaraan Angkut Barang/Material
31.08.50	Kendaraan Tangki Air

Kode	Uraian
31.08.60	Perahu Motor Tangki
31.08.70	Kendaraan Tidak Bermesin
31.09	INVENTARIS / PERABOTAN KANTOR
31.09.10	Meubelair Kantor
31.09.20	Mesin-mesin Kantor
31.09.90	Rupa-rupa Inventaris/Perabot Kantor Lain
31.10	AKUMULASI PENYUSUTAN
31.10.10	Akumulasi Penyusutan Instalasi Sumber Air
31.10.20	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa
31.10.30	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Air
31.10.31	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Air Nelas
31.10.40	Akumulasi Penyusutan Instalasi Transmisi & Distribusi
31.10.50	Akumulasi Penyusutan Bangunan/Gedung
31.10.60	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perlengkapan
31.10.70	Akumulasi Penyusutan Kendaraan / Alat pengangkutan
31.10.80	Akumulasi Penyusutan Inventaris / Perabot Kantor
4	AKTIVA LAIN-LAIN
41	AKTIVA LAIN-LAIN BERWUJUD
41.01	AKTIVA TETAP DALAM PENYELESAIAN
41.01.10	Penyempurnaan Tanah
41.01.30	Instalasi Pompa

Kode	Uraian
41.01.40	Instalasi Pengolahan Air
41.01.50	Instalasi Transmisi & Distribusi
41.01.60	Bangunan / Gedung
41.01.70	Aktiva Tetap Lain-lain Dalam Penyelesaian
41.05	AKTIVA TETAP YANG TIDAK BERFUNGSI
41.05.10	Aktiva Yang Tidak Berfungsi
41.05.90	Akumulasi Aktiva Tidak Berfungsi

Kode	Uraian
41.08	PEMBAYARAN DIMUKA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
41.08.10	Uang Muka Kepada Pemda
41.08.90	Akumulasi Penurunan Uang Muka Kepada Pemda
5	LIABILITAS
50	LIABILITAS JANGKA PENDEK
50.01	UTANG USAHA
50.01.10	Utang Usaha
50.02	UTANG NON USAHA
50.02.10	Utang Non Usaha
50.03	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
50.03.10	Bunga Pinjaman Yang Belum Dibayar
50.03.20	Premi Asuransi Yang Belum Dibayar
50.03.30	Sewa Yang Belum Dibayar
50.03.40	Rekening Listrik Yang Belum Dibayar
50.03.50	Rekening Telepon Yang Belum Dibayar
50.03.60	Iuran Pensiun Yang Belum Dibayar
50.03.90	Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya

Kode	Uraian
50.04	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
50.04.10	Pendapatan Diterima Dimuka
50.04.20	Pendapatan Sambungan Baru Diterima Dimuka
50.04.30	Pendapatan Air Diterima Dimuka
50.05	PINJAMAN JANGKA PENDEK
50.05.10	Pinjaman/Kredit Bank Jangka Pendek
50.05.90	Pinjaman Jangka Pendek lainnya
50.06	UTANG PAJAK
50.06.10	Utang PPh Pasal 21
50.06.20	Utang PPh Pasal 22

Kode	Uraian
50.06.30	Utang PPh Pasal 23
50.06.40	Utang PPh Pasal 25
50.06.50	Utang PPh Pasal 26
50.06.60	Utang PPh Pasal 29
50.06.70	PPN Masukan Yang Ditahan
50.06.80	Pinjaman Jangka Pendek Lainnya
50.06.81	Uang Muka Pemasangan Air Pelanggan
50.06.82	Uang Tanggungan Instalatir
50.06.83	Utang Kepada Leveransir
50.07	UTANG JANGKA PANJANG JATUH TEMPO
50.07.10	Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo
50.07.20	Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo-Dalam Negeri
50.07.30	Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo-Luar Negeri (IBRD)
50.07.31	Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo-Luar Negeri (RDI)
50.07.80	Utang Leasing Jatuh Tempo
Kode	Uraian
50.08	UTANG BUNGA
50.08.10	Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
50.08.20	Utang Bunga-Pinjaman Luar Negeri
50.08.80	Utang Bunga-Leasing
50.09	UTANG IURAN PENSIUN
50.09.10	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
50.11	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
50.11.10	Uang Muka Pemasangan Air dari Langganan
50.11.20	Uang Tanggungan Dari Instalatir
50.11.30	Sambungan Yang Masih Harus Dipasang
50.11.40	Titipan BPJS Kesehatan Karyawan
50.11.90	Rupa-rupa Utang Jangka Pendek Lainnya
6	LIABILITAS JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN

Kode	Uraian
61	LIABILITAS JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN
61.01	PINJAMAN DALAM NEGERI
61.01.01	Pinjaman Pemerintah Pusat
61.01.02	Bunga Pinjaman Yang Belum Jatuh Tempo
61.01.03	Pinjaman Dengan Pembiayaan Pendahuluan
61.02	PINJAMAN LUAR NEGERI
61.02.10	Kredit Bank Jangka Panjang
61.02.11	Kredit Bank Jangka Panjang-BBD
61.02.12	Kredit Bank Jangka Panjang -ADB
61.02.14	Kredit Bank Jangka Panjang-BPD
61.03	BUNGA MASA TENGGANG
61.03.10	Bunga Masa Tenggang-Pinjaman Dalam Negeri
61.03.20	Bunga Masa Tenggang-Pinjaman Luar Negeri

Kode	Uraian
62	KEWAJIBAN LAIN-LAIN
62.02	CADANGAN DANA METER
62.02.40	Jaminan Pemeliharaan
62.03	CADANGAN DANA
62.03.10	Cadangan Dana Produksi
62.03.20	Cadangan Dana Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan
62.03.30	Cadangan Dana Pensiun dan Sokongan
62.03.40	Cadangan Dana Asuransi
62.03.50	Cadangan Dana Lainnya
62.03.60	Bagian Laba Pemda Yang Belum Dibayar
62.04	RUPA-RUPA KEWAJIBAN LAINNYA
62.04.01	Titipan Retribusi
62.04.02	Jaminan Langganan
62.04.30	Kewajiban Kepada Pelanggan

7	MODAL DAN CADANGAN
70	MODAL DAN CADANGAN
70.01	KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN
70.01.10	Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah
70.01.20	Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah
70.02	PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT
70.02.10	Penyertaan Yang Telah Ditetapkan Statusnya
70.02.20	Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya
70.02.30	Penyertaan Asal Kredit Pemerintah Pusat
70.03	MODAL
70.03.10	Modal

Kode	Uraian
70.04	MODAL HIBAH
70.04.10	Modal Hibah
70.05	SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
70.05.10	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
70.06	CADANGAN
70.06.10	Cadangan Umum
70.06.20	Cadangan Tujuan
70.07	LABA DITAHAN / (AKUMULASI KERUGIAN)
70.07.10	Laba Ditahan / (Akumulasi Kerugian)
70.09	LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
70.09.10	Laba (Rugi) Periode Berjalan

8	PENDAPATAN
81	PENDAPATAN USAHA
81.01	PENDAPATAN PENJUALAN AIR
81.01.10	Harga air
81.01.11	Beban Tetap
81.01.20	Jasa Administrasi
81.01.21	Dana Meter

Kode	Uraian
81.01.30	Pendapatan Air Tengki
81.01.90	Pendapatan Penjualan Air Lainnya
81.02	PENDAPATAN NON AIR
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru
81.02.11	Pendapatan Pendaftaran
81.02.12	Pendapatan Pemasangan Pipa Sub Instalasi
81.02.20	Pendapatan Sewa Instalasi

Kode	Uraian
81.02.30	Pendapatan Pemeriksaan Air Lab
81.02.31	Pendapatan Dana Pengujian
81.02.32	Pendapatan Ukur Gambar
81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali
81.02.50	Pendapatan Denda
81.02.51	Pendapatan Balik Nama
81.02.60	Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan
81.02.70	Pendapatan Penggantian Meter Rusak
81.02.80	Pendapatan Penggantian Pipa Persil
81.02.90	Pendapatan Non Air Lainnya
81.02.91	Diskon Pendapatan Pemasangan Pipa Sub Distribusi
81.10	PENDAPATAN KEMITRAAN
81.10.10	Pendapatan Royalti
81.10.20	Pembagian Pendapatan Dari Kemitraan
81.10.30	Pembagian Produksi Dari Kemitraan
81.10.40	Pembagian Keuntungan Dari Kemitraan
81.10.50	Deviden
81.20	PENDAPATAN AIR LIMBAH
81.20.10	Retribusi Air Limbah
81.20.90	Pendapatan Air Limbah Lainnya

88	PENDAPATAN DILUAR USAHA
-----------	--------------------------------

88.01	PENDAPATAN LAIN-LAIN
--------------	-----------------------------

88.01.10	Pendapatan Bunga Deposito
88.01.20	Pendapatan Jasa Giro
88.01.21	Pendapatan Adm Rekening Air

Kode	Uraian
-------------	---------------

88.01.30	Penjualan Barang-barang Bekas
88.01.40	Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap
88.01.50	Keuntungan Atas Transaksi Valuta Asing
88.01.60	Penerimaan Piutang Yang Sudah Disisihkan/Dihapus
88.01.70	Keuntungan Pemulihan Penyisihan Piutang
88.01.71	Pendapatan Penjualan AMDK
88.01.90	Rupa-rupa Pendapatan Lainnya

9	BIAYA
----------	--------------

91	BIAYA SUMBER AIR
-----------	-------------------------

91.01	BIAYA OPERASI SUMBER AIR
--------------	---------------------------------

91.01.10	Biaya Pegawai/Gaji
91.01.11	Biaya Tunjangan
91.01.12	Biaya Iuran Pensiun
91.01.13	Biaya Iuran BPJS
91.01.14	Biaya Insentif
91.01.15	Biaya Lembur
91.01.16	Pakaian Dinas
91.01.17	Pengobatan
91.01.20	Pemakaian Bahan Bakar
91.01.30	Biaya Listrik PLN
91.01.40	Pemakaian Bahan Pembantu
91.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber Air

91.02	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR
--------------	--------------------------------------

91.02.10	Pemeliharaan Bangunan Instalasi Sumber
----------	--

91.02.11	Pemeliharaan Bak Penampung
91.02.20	Pemeliharaan Pengumpulan & Reservoir
91.02.30	Pemeliharaan Danau, Sungai

Kode	Uraian
91.02.40	Pemeliharaan Mata Air & Saluran
91.02.50	Pemeliharaan Sumur-sumur
91.02.60	Pemeliharaan Pipa Induk
91.02.70	Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan
91.02.90	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya
91.03	BIAYA AIR BAKU
91.03.10	Biaya Air Baku
91.09	BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR
91.09.09	Biaya Penyusutan Sumber Air
91.09.10	Biaya Penyusutan Bangunan Dan Perbaikannya
91.09.20	Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air
91.09.30	Biaya Penyusutan Reservoir & Penampungan
91.09.40	Biaya Penyusutan Sumur-sumur
91.09.50	Biaya Penyusutan Pipa Air Baku
91.09.60	Biaya Penyusutan Pompa-pompa
91.09.70	Biaya Penyusutan Peralatan Pompa
91.09.80	Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air Lainnya
92	BIAYA PENGOLAHAN AIR
92.01	BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR
92.01.10	Biaya Pegawai/Gaji
92.01.11	Biaya Tunjangan
92.01.12	Biaya Iuran Pensiun
92.01.13	Biaya Iuran BPJS
92.01.14	Biaya Insentif
92.01.15	Biaya Lembur

92.01.16 Pakaian Dinas

Kode	Uraian
92.01.17	Pengobatan
92.01.18	Bantuan / Sumbangan
92.01.19	Pemakaian Bahan Kimia Nelas
92.01.20	Pemakaian Bahan Kimia Surabaya
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu Oli Surabaya
92.01.31	Pemakaian Bahan Pembantu Oli Nelas
92.01.40	Biaya Bahan Bakar Surabaya
92.01.41	Biaya Bahan Bakar Nelas
92.01.50	Biaya Listrik PLN Surabaya
92.01.51	Biaya Listrik PLN Nelas
92.01.60	Biaya Labor IPA Surabaya
92.01.61	Biaya Labor WTP Nelas
92.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air Surabaya
92.01.91	Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air Nelas
92.01.92	Biaya Produksi AMDK
92.02	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan Instalasi & Penyempurnaan Tanah Surabaya
92.02.11	Pemeliharaan Bangunan Instalasi & Penyempurnaan Tanah Nelas
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Surabaya
92.02.21	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Nelas
92.02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa Surabaya
92.02.31	Pemeliharaan Instalasi Pompa Nelas
92.02.40	Pemeliharaan Instalasi Listrik Pengolahan Surabaya
92.02.41	Pemeliharaan Instalasi Listrik Pengolahan Nelas
92.02.90	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya Surabaya
92.02.91	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya Nelas

Kode	Uraian
92.03	BIAYA PENGADAAN AIR CURAH
92.03.10	Biaya Pengadaan Air Curah
92.09	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR
92.09.09	Biaya Penyusutan Pengolahan Air
92.09.10	Biaya Penyusutan Bangunan Pompa
92.09.20	Biaya Penyusutan Bangunan Pengolahan
92.09.30	Biaya Penyusutan Pembangkit Tenaga Listrik
92.09.40	Biaya Penyusutan Pompa
92.09.50	Biaya Penyusutan Reservoir Penampung Air
92.09.55	Biaya Penyusutan Instalasi Alat-alat Pengolahan Air
92.09.60	Biaya Penyusutan Instalasi Pompa Lainnya
92.09.70	Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Lainnya
93	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
93.01	BIAYA OERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
93.01.10	Biaya Pegawai / Gaji
93.01.11	Biaya Tunjangan
93.01.12	Biaya Iuran Pensiun
93.01.13	Biaya Iuran BPJS
93.01.14	Biaya Insentif
93.01.15	Biaya Lembur
93.01.16	Pakaian Dinas
93.01.17	Pengobatan
93.01.18	Bantuan / Sumbangan
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan
93.01.30	Biaya Bahan Bakar (BBM)

Kode	Uraian
93.01.40	Biaya Listrik
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil
93.01.60	Biaya Operasi Peralatan Khusus

93.01.90 Rupa-rupa Biaya Operasi Transmisi dan Distribusi

93.02 BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI & DISTRIBUSI

93.02.10 Pemeliharaan Bangunan Instalasi & Penyempurnaan Tanah

93.02.20 Pemeliharaan Reservoir & Tangki-tangki

93.02.30 Pemeliharaan Pipa Transmisi

93.02.31 Pemeliharaan Dinas

93.02.40 Jembatan Pipa

93.02.50 Pemeliharaan Instalasi Pompa

93.02.51 Pemeliharaan Pompa Distribusi

93.02.60 Pemeliharaan Meter-meter

93.02.70 Pemeliharaan Hidran Umum

93.02.80 Pemeliharaan Peralatan Teknik

93.02.81 Pemeliharaan Instalasi Listrik Distribusi

93.02.90 Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Lainnya

93.02.91 Pemeliharaan Satgas PKA

93.09 BIAYA PENYUSUTAN TRANSMISI & DISTRIBUSI

93.09.09 Biaya Penyusutan Transmisi & Distribusi

93.09.10 Biaya Penyusutan Bangunan & Perbaikannya

93.09.30 Biaya Penyusutan Reservoir & Menara Air

93.09.40 Biaya Penyusutan Pipa Transmisi & Distribusi

93.09.50 Biaya Penyusutan Saluran Air

93.09.51 Biaya Penyusutan Saluran Pemadam Kebakaran

Kode	Uraian
------	--------

93.09.60	Biaya Penyusutan Instalasi Pipa Dinas
----------	---------------------------------------

93.09.61	Biaya Penyusutan Jembatan Pipa
----------	--------------------------------

93.09.70	Biaya Penyusutan Meter Air Terpasang
----------	--------------------------------------

93.09.80	Biaya Penyusutan Kran Umum
----------	----------------------------

93.09.85	Biaya Penyusutan Terminal Air
----------	-------------------------------

93.09.90 Biaya Penyusutan Transmisi & Distribusi Lainnya

94 BIAYA KEMITRAAN

94.10 BIAYA KEMITRAAN

94.10.10 Biaya Kemitraan

95 BIAYA AIR LIMBAH

95.01 BIAYA OPERASI AIR LIMBAH

95.01.10 Biaya Pegawai

95.01.11 Tunjangan

95.01.20 Biaya Bahan Bakar

95.01.30 Biaya Listrik

95.01.40 Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan

95.01.90 Rupa-rupa Biaya Operasi Air Limbah

95.02 BIAYA PEMELIHARAAN AIR LIMBAH

95.02.10 Pemeliharaan Bangunan dan Penyempurnaan Tanah

95.02.20 Pemeliharaan pembangkit Listrik

95.02.30 Pemeliharaan Peralatan Pompa

95.02.40 Pemeliharaan Alat Pengolah Air Limbah

95.02.50 Pemeliharaan Kendaraan Penyedia Air Limbah

95.02.90 Pemeliharaan Rupa-rupa Instalasi Air Limbah

95.03 BIAYA PENYUSUTAN AIR LIMBAH

95.03.10 Biaya Penyusutan Air Limbah

Kode	Uraian
------	--------

96 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

96.01 BIAYA PEGAWAI

96.01.10 Biaya Pegawai/Gaji

96.01.11 HONOR PIHAK KE 3

96.01.14 Biaya Pegawai / Gaji AMDK

96.01.20 Tunjangan

96.01.21 Biaya Dana Representasi Direksi

96.01.22 Tunjangan AMDK

96.01.30	Iuran Pensiun
96.01.31	Iuran Astek
96.01.40	Lembur
96.01.41	Insentif
96.01.42	Insentif Tangki
96.01.43	BBM Tangki
96.01.44	BBM Kendaraan
96.01.50	Kesejahteraan karyawan
96.01.51	Biaya Pengobatan
96.01.60	Pakaian Dinas
96.01.70	Bantuan dan Sumbangan
96.01.80	Pendidikan dan Latihan
96.01.81	Pembinaan Karyawan
96.01.82	Pembinaan Olahraga
96.01.90	Rupa-rupa Biaya Pegawai

Kode	Uraian
96.02	BIAYA KANTOR
96.02.10	Biaya ATK & Foto Copy
96.02.20	Barang Cetakan
96.02.30	Perlengkapan Komputer
96.02.40	Biaya telepon, Teleks, & Telegram
96.02.50	Biaya Rapat & Tamu
96.02.51	Biaya Konsumsi
96.02.60	Biaya Pos & Materai
96.02.70	Biaya Listrik Kantor
96.02.71	Biaya Rekening Air Kantor
96.02.80	Biaya <i>Cleaning Service</i>
96.02.90	Rupa-rupa Biaya Kantor
96.03	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN
96.03.10	Biaya Pengawasan Meter

96.03.20	Biaya Pembacaan Meter
96.03.30	Biaya Penagihan Rekening Air
96.03.40	Biaya Pencatatan Langganan
96.03.50	Biaya Percetakan Formulir Rekening
96.03.60	Biaya Pengolahan Penerbitan Rekening
96.03.71	Biaya Humas dan Pembinaan Masyarakat
96.03.72	Biaya Iklan
96.03.73	Diskon Sambungan Baru
96.03.90	Rupa-rupa Biaya Langganan

Kode	Uraian
96.04	BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
96.04.10	Biaya Survei & Penelitian
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik
96.04.30	Biaya Perencanaan Bidang Usaha & Keuangan
96.04.40	Biaya Perencana Komputerisasi
96.04.90	Rupa-rupa Biaya Litbang
96.05	BIAYA KEUANGAN
96.05.10	Bunga Pinjaman
96.05.20	Biaya Komitmen
96.05.30	Biaya Denda Keterlambatan
96.05.40	Biaya Jasa Bank Atas Pinjaman
96.05.90	Rupa-rupa Biaya Keuangan Lainnya
96.06	BIAYA PEMELIHARAAN
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor
96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan Penumpang
96.06.21	Pemeliharaan Kendaraan Angkut Barang
96.06.22	Pemeliharaan Kendaraan Tangki Air
96.06.23	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
96.06.24	Pemeliharaan Kendaraan Tidak Bermesin
96.06.25	Pemeliharaan Perahu Motor Tangki

Kode	Uraian
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan
96.06.40	Pemeliharaan Rumah Dinas
96.06.50	Pemeliharaan Taman & Lapangan
96.06.60	Pemeliharaan Instalasi Listrik
96.06.70	Pemeliharaan Alat Berat

Kode	Uraian
96.07	BIAYA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
96.07.10	Biaya Penyisihan Piutang
96.07.11	Biaya Penyisihan Piutang Non Air / Limbah
96.07.20	Biaya Penghapusan Piutang
96.08	RUPA-RUPA BIAYA UMUM
96.08.09	B. Humas & Pembinaan Masyarakat
96.08.10	Biaya Promosi/Iklan
96.08.11	Biaya Iuran/ Berlangganan Media Cetak
96.08.12	Biaya Iuran keanggotaan
96.08.13	Biaya langganan Media Elektronik
96.08.14	Biaya Dokumentasi
96.08.15	Biaya Buku
96.08.20	Biaya Honor Badan Pengawas
96.08.21	Uang Jasa Badan Pengawas
96.08.22	Biaya Operasional Badan Pengawas
96.08.23	Biaya Pakaian Dinas Badan Pengawas
96.08.24	Studi Banding Badan Pengawas
96.08.25	Perjalanan Dinas Badan Pengawas
96.08.30	Biaya Perjalanan Dinas
96.08.40	Biaya Jasa Profesional
96.08.41	Biaya Jasa Manajemen
96.08.42	Biaya Bantuan Hukum
96.08.43	Biaya Audit

96.08.44	Biaya Representatif
96.08.50	Biaya Sewa

Kode	Uraian
96.08.51	Biaya Asuransi Kesehatan
96.08.60	Biaya Asuransi
96.08.61	Biaya Keamanan
96.08.62	Biaya Dana Representatif Direksi
96.08.70	Biaya PBB
96.08.71	Retribusi PAD
96.08.72	Biaya Retribusi/ Perizinan
96.08.73	Biaya Perjanjian
96.08.74	Sumbangan
96.08.90	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya
96.08.91	Dana Representasi
96.08.92	Biaya Bahan Bakar Kendaraan
96.08.93	Biaya Peningkatan Kinerja
96.08.94	Biaya Keagamaan
96.09	PENYUSUTAN&AMORTISASI INST.NON.PABRIK AIR
96.09.10	Biaya Penyusutan & Amortisasi Instalasi Non Pabrik
96.09.11	Biaya Penyusutan & Amortisasi Instalasi Umum
96.09.20	Biaya Penyusutan Bangunan & Perbaikannya
96.09.30	Biaya Penyusutan Alat-alat Pergudangan
96.09.31	Biaya Penyusutan Rupa-rupa Alat & Perlengkapan Lainnya
96.09.32	Biaya Penyusutan Alat Laboratorium
96.09.33	Biaya Penyusutan Alat Perhubungan
96.09.34	Biaya Penyusutan Alat-alat Berat
96.09.35	Biaya Penyusutan Alat Bengkel
96.09.36	Biaya Penyusutan Alat Angkutan

Kode	Uraian
96.09.37	Biaya Penyusutan Peralatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
96.09.40	Biaya Penyusutan Kendaraan Tangki Air
96.09.50	Biaya Penyusutan Motor Tangki
96.09.60	Biaya Penyusutan Meubel Kantor
96.09.70	Biaya Penyusutan Mesin-mesin Kantor
96.09.80	Biaya Penyusutan Rupa-rupa Inventaris Kantor
98	BIAYA DILUAR USAHA
98.01	BIAYA LAIN-LAIN
98.01.01	Biaya Bank
98.01.02	PPh Ps. 23
98.01.03	PPh Ps. 25
98.01.04	Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap
98.01.05	Rupa-rupa Biaya Lain-lain
98.01.06	Kerugian Penurunan Nilai Persediaan
98.01.07	Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga
98.01.08	Kerugian Penurunan Nilai Uang Muka Kerja
98.01.09	PPh Ps. 21
98.01.10	Biaya Discount Sambungan Baru
98.01.11	Biaya Covid 19
98.01.12	Biaya PPN Pipa Sub Distribusi
98.01.13	Biaya Rekening Air SR-MBR
98.01.14	Biaya SPPD AMDK
98.01.15	Biaya Pendidikan & Pelatihan AMDK
98.01.16	Biaya Pembelian Bahan Persediaan AMDK
98.01.17	Biaya Operasi AMDK
98.01.18	PPN
98.01.19	Biaya Rekening Air Gratis 2a

Catatan : Kode perkiraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

BAB VIII

PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI AKUNTANSI

8.1 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah salah satu aset lancar signifikan bagi perusahaan pada umumnya. Akuntansi untuk persediaan, pada tanggal tertentu ditentukan berdasarkan hasil perkalian dua faktor yaitu jumlah kuantitas atau unit fisik yang ada pada tanggal tersebut dan biaya perolehan per unit barang persediaan yang bersangkutan :

Nilai Persediaan	:	Kuantitas (Jumlah Unit) x Biaya Perolehan Satuan
------------------	---	--

Metode Pencatatan Persediaan :

a) Metode Periodik

Dalam metode periodik, jumlah persediaan ditentukan secara berkala (periodik) dengan melakukan perhitungan fisik dan mengalikan jumlah unit tersebut dengan harga satuan untuk memperoleh nilai persediaan yang ada pada saat itu.

Metode ini setiap kali ada pembelian persediaan akan dicatat pada akun persediaan. Pada akhir periode usaha untuk penyusunan Laporan Keuangan, harus dilakukan perhitungan fisik persediaan untuk mengetahui nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan atau beban pemakaiannya. Contoh melaksanakan pembelian untuk kebutuhan ATK/Cetakan dengan nilai sebesar Rp3.500.000,-.

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Pemakaian ATK/Cetakan	Rp3.500.000,-	
Utang Usaha/Kas		Rp3.500.000,-

Pada akhir tahun untuk penyusunan Laporan Keuangan, harus dilakukan perhitungan fisik persediaan ATK/Cetakan. Dari perhitungan fisik diketahui persediaan adalah sebesar Rp750.000,-.

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Persediaan ATK/Cetakan	Rp750.000,-	
Beban Pemakaian ATK /Cetakan		Rp750.000,-

b) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual catatan persediaan selalu dimutakhirkan (*updated*) setiap kali terjadi transaksi yang melibatkan persediaan, sehingga perusahaan selalu mengetahui kuantitas dan nilai persediaan setiap saat.

Setiap kali melakukan pembelian barang maka perusahaan akan mendebit akun persediaan (bukan akun pembelian). Setiap kali terjadi pengeluaran atau pemakaian persediaan langsung mengurangi akun persediaan. Contoh : perusahaan melaksanakan pembelian untuk bahan kimia dengan nilai sebesar Rp100.000.000,-.

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Persediaan	Rp100.000.000,-	
Utang Usaha/Kas		Rp100.000.000,-

Laporan dari unit produksi & distribusi telah dilakukan pemakaian bahan kimia sebesar Rp50.000.000,-.

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Pemakaian Bahan Kimia	Rp50.000.000,-	
Persediaan		Rp50.000.000,-

PEMAKAIAN PERSEDIAAN

Dokumen Akuntansi : Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPPB).

Pencatatan : Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia (JPBIK).

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Aktiva Tetap	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Beban Instalasi Transmisi & Distribusi	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Beban Pemakaian Bahan Kimia	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Beban Pemeliharaan Transmisi & Distribusi	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Beban Pokok Penjualan Sambungan Baru	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Persediaan Bahan Instalasi SR		Rpxxxxxxxxxxxxxx
Persediaan Bahan Kimia		Rpxxxxxxxxxxxxxx
Persediaan Bahan Pembantu		Rpxxxxxxxxxxxxxx

Penilaian Persediaan dan Pemakaian Persediaan berdasarkan biaya perolehan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) macam metode :

- a) Identifikasi khusus
- b) Rata-rata (*average*)
- c) Masuk Pertama Keluar Pertama (*First In First Out /FIFO*)

PENURUNAN NILAI PERSEDIAAN

Mensyaratkan entitas untuk menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah persediaan mengalami penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi netto dan seluruh kerugian persediaan diakui kerugian penurunan nilai persediaan sebagai beban pada periode terjadi penurunan atau kerugian tersebut (contoh : kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual).

Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi netto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan periode terjadinya pemulihan tersebut.

Contoh :

Pada akhir tahun 2023, berdasarkan laporan Tim Inventarisasi Fisik telah dilakukan inventarisasi fisik baik dari jumlah dan lamanya persediaan di gudang. Terdapat beberapa persediaan yang sudah lama dan jarang dipakai lagi. Secara teknik mutu persediaan sudah menurun, dengan nilai perolehan sebesar Rp300.000.000,- apabila dijual dipasar harga sebesar Rp175.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	Rp125.000.000,-	
Akumulasi Penurunan Nilai Persediaan		Rp125.000.000,-

Pembelian Persediaan Dengan Uang Muka Pembelian

Bukti Akuntansi : Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Pembelian dan Daftar Permintaan Barang (DPB), selanjutnya dibuat voucher.

Media Pencatatan : Jurnal Pembayaran Kas (JPK)

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Uang Muka Pembelian	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Kas/Bank		Rpxxxxxxxxxxxxxx

Untuk Pencatatan Setelah Persediaan (Barang) Diterima

Bukti Akuntansi : Laporan Penerimaan Barang (LPB) dan Faktur Pembelian

Media Pencatatan : Jurnal Umum (JU)

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Bahan Instalasi	Rpxxxxxxxxxxxxxx	
Uang Muka Pembelian		Rpxxxxxxxxxxxxxx
Utang Usaha/Kas		Rpxxxxxxxxxxxxxx

8.2 Akuntansi Investasi Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi merupakan suatu entitas, termasuk non korporasi seperti Persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam Ventura Bersama.

Investasi pada entitas asosiasi merupakan investasi dimana investor memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan merupakan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

CONTOH :

Perusahaan sedang bernegosiasi untuk membeli 30% saham PT.XYZ. Pada Laporan Posisi Keuangan PT.XYZ, terdapat total Aset sebesar Rp50.000.000.000,- dan total Liabilitas sebesar Rp30.000.000.000,-. Sehingga nilai Aset netto sebesar Rp20.000.000.000,-. Setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi ternyata ada beberapa Aset PT.XYZ yang nilainya di bawah nilai wajar, yakni tanah memiliki nilai wajar sebesar Rp6.000.000.000,- dan paten yang dimiliki nilai wajar sebesar Rp4.000.000.000,-. Dengan menambah selisih nilai wajar ini, maka diperkirakan aset PT.XYZ menjadi Rp30.000.000.000,-.

Perusahaan menawarkan harga Rp9.000.000.000,- ($Rp30.000.000.000,- \times 30\%$) untuk membeli 30% saham dari total saham PT.XYZ.

PT.XYZ tidak setuju dengan penawaran tersebut, dan menawar lebih tinggi yaitu Rp12.500.000.000,- untuk 30% sahamnya. Setelah bernegosiasi, pada tanggal 30 Desember

2022, perusahaan menyetujui harga tersebut. Perhitungan *Goodwill* – nya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Investor	Rp12.500.000.000,-
2.	Persentase Nilai Buku Yang Dibeli	Rp6.000.000.000,-*
3.	Pembayaran di Atas Nilai Buku	Rp6.500.000.000,-

Kelebihan pembayaran yang teridentifikasi pada aset tertentu :

a) Tanah **)	Rp1.800.000.000,-
b) Paten ***)	Rp1.200.000.000,-
c) Goodwill	<u>Rp 500.000.000,-</u>
	<u>Rp3.500.000.000,-</u>

Perhitungan :

- a) $Rp20.000.000.000,- \times 30\% = Rp6.000.000.000,-(*)$
b) $Rp6.000.000.000,- \times 30\% = Rp1.800.000.000,-(**)$
c) $Rp4.000.000.000,- \times 30\% = Rp1.200.000.000,-(***)$

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Investasi pada PT.XYZ	Rp12.500.000.000,-	
Kas/Bank		Rp12.500.000.000,-

Dengan metode ekuitas, perusahaan mencatatkan nilai investasinya sesuai dengan total yang dibayarkan yaitu Rp12.500.000.000,-.

Pengukuran Investasi di Tahun Kedua

Pada tahun berikutnya PT.XYZ mencatatkan laba sebesar Rp1.200.000.000,- dan membagikan deviden 40% dari laba kepada pemilik saham. Dari laba tersebut, perusahaan berhak sebesar 30% yang menambah nilai investasi. Namun ketika tidak menerima deviden, maka nilai investasinya berkurang.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai Investasi Pada Awal Tahun	Rp12.500.000.000,-
2.	Bagian Laba PT.XYZ	Rp360.000.000,-*)
3.	Deviden dari PT.XYZ	(Rp144.000.000,-)**)
4.	Nilai Investasi Pada Akhir Tahun	Rp12.716.000.000,-

*) $Rp1.200.000.000,- \times 30\% = Rp360.000.000,-$

**) $Rp1.200.000.000,- \times 40\% \times 30\% = Rp144.000.000,-$

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Investasi pada PT.XYZ	Rp360.000.000,-	
Bagian Laba Entitas Asosiasi		Rp360.000.000,-

Bagian Laba Entitas Asosiasi

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas/Bank	Rp144.000.000,-	
Investasi pada PT.XYZ		Rp144.000.000,-

Penerimaan Dividen Dari Investasi

8.3 Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti (tanah dan bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee*) penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak termasuk :

- digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

CONTOH 1

Perusahaan memiliki gedung yang disewakan. Kemudian perusahaan memutuskan menukar gedung tersebut dengan gedung di kawasan yang lebih ramai sehingga perusahaan harus memberikan jumlah uang tambahan sebesar Rp3.500.000.000,-. Gedung lama milik Perusahaan memiliki nilai buku Rp15.000.000.000,- Biaya perolehan sebesar Rp17.000.000.000,-. Akumulasi depresiasi sebesar Rp2.000.000.000,-. Sedangkan gedung baru memiliki nilai wajar sebesar Rp20.000.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI PADA PENGAKUAN AWAL

Nama Rekening	Debit	Kredit
Gedung Baru	Rp20.000.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi Gedung Lama	Rp2.000.000.000,-	
Gedung Lama		Rp17.000.000.000,-
Kas/Bank		Rp3.500.000.000,-
Keuntungan dari Pertukaran		Rp1.500.000.000,-

CONTOH 2 : PENCATATAN METODE NILAI WAJAR DAN NILAI BIAYA

Properti investasi dimiliki perusahaan berumur 10 tahun dengan nilai perolehan sebesar Rp50.000.000.000,- dan nilai residu Rp500.000.000,-. Depresiasi dengan metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar investasi yang dimiliki perusahaan Rp5.230.000.000,-

a) MODEL NILAI WAJAR

Jika menggunakan model nilai wajar, maka perusahaan tidak perlu menghitung depresiasi dan langsung membandingkan antara nilai tercatat dengan nilai wajar. Dikarenakan nilai wajar lebih besar, maka diakui untung/laba revaluasi sebesar Rp230.000.000,-. Keuntungan diakui laba rugi tahu berjalan.

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Properti Investasi	Rp230.000.000,-	
Keuntungan Revaluasi		Rp230.000.000,-

b) MODEL BIAYA

Jika menggunakan model biaya maka perusahaan tidak mengakui kenaikan tersebut, tetapi mengakui depresiasi. Jumlah beban yang disusutkan per tahun dihitung dengan :

$$(\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}) / \text{Umur Penggunaan}$$

$$(\text{Rp50.000.000.000,-} - \text{Rp500.000.000,-}) / 10 \text{ tahun} = \text{Rp450.000.000,-}$$

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Depresiasi	Rp450.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi		Rp450.000.000,-

8.4 Akuntansi Aset Tetap dan Depresiasi

Aset tetap adalah semua aset berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari.

PENGAKUAN AWAL DAN PENGUKURAN AWAL

Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

PENGELUARAN MODAL VERSUS PENGELUARAN BEBAN

Biasanya pada setiap entitas, terdapat kebijakan batasan kapitalisasi biaya. Kebijakan ini ditujukan untuk pembelian aset berwujud yang walaupun memberikan manfaat ekonomi bagi entitas, yang biaya perolehannya dapat diukur secara andal, namun tidak dikategorikan sebagai aset tetap, karena nilainya yang tidak material bagi entitas tersebut.

Batasan kapitalisasi ini diterapkan pada nilai per unit aset dan bukan pada total pembelian aset pada suatu waktu tertentu.

Pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya lebih besar dari batasan kapitalisasi, akan dicatat sebagai aset tetap (pengeluaran modal), sedangkan untuk pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya tidak lebih besar dari kapitalisasi, langsung dicatat sebagai beban periode berjalan (pengeluaran beban).

Untuk tujuan pengendalian atas pengeluaran untuk aset berwujud yang langsung dibeban ini, entitas dapat menggunakan suatu daftar tersendiri yang lazim disebut Daftar Inventaris.

PERTUKARAN ASET TETAP

Entitas mungkin saja memperoleh suatu aset tetap melalui pertukaran dengan aset non moneter lainnya atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter lainnya dinilai pada nilai wajar, kecuali jika:

1. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
2. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial.

CONTOH PERTUKARAN TANAH DAN BANGUNAN

Perusahaan memiliki sebidang tanah di tengah kota dengan bangunan yang berdiri di atasnya. Nilai tercatat tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,- dengan biaya perolehan Rp12.000.000.000,-. Diketahui bahwa nilai pasar dari tanah dan bangunan adalah sebesar Rp15.000.000.000,-.

Perusahaan kemudian menukar tanah dan bangunan tersebut dengan sebidang tanah di dekat daerah pelabuhan, dan lebih luas dari tanah yang dimiliki sebelumnya. Nilai pasar dari sebidang tanah tersebut adalah Rp18.000.000.000,-. Untuk transaksi penukaran ini perusahaan menambah pembayaran kas sebanyak Rp2.000.000.000,-. Diasumsikan bahwa penukaran ini memiliki substansi komersial.

PEMBAHASAN :

Nilai wajar dari tanah dan bangunan sebesar Rp15.000.000.000,-. Nilai wajar dari aset yang diserahkan adalah Rp17.000.000.000,- (nilai wajar tanah dan bangunan ditambah dengan nilai kas yang diserahkan). Karena nilai wajar dari aset yang diserahkan diketahui, maka transaksi pertukaran ini harus dicatat pada nilai wajar aset yang diserahkan yaitu Rp17.000.000.000,-.

Laba rugi dari transaksi pertukaran ini dihitung sebagai berikut:

Nilai dicatat tanah dan bangunan Rp10.000.000.000,- ditambah kas yang diserahkan Rp2.000.000.000,- dibandingkan dengan nilai wajar yang dipertimbangkan dalam transaksi ini yaitu nilai wajar aset yang diserahkan Rp15.000.000.000,-. Dengan demikian terdapat keuntungan pertukaran aset sebesar Rp5.000.000.000,-.

PENCATATAN TRANSAKSI PERTUKARAN ASET TETAP

Nama Rekening	Debit	Kredit
Tanah	Rp17.000.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi Gedung	Rp2.000.000.000,-	
Tanah dan Bangunan		Rp12.000.000.000,-
Kas / Bank		Rp2.000.000.000,-
Keuntungan Pertukaran Aset		Rp5.000.000.000,-

BIAYA PINJAMAN SEBAGAI KOMPONEN HARGA PEROLEHAN

Biaya pinjaman dapat diakui sebagai komponen biaya perolehan aset tetap, jika memenuhi kriteria yaitu jika biaya pinjaman secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset tetap kualifikasian.

Jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinjaman yang timbul dari pinjaman dana digunakan untuk membiayai perolehan (pembangunan) aset tetap.

PEMBAHASAN :

Perusahaan membangun gedung bertingkat yang nantinya akan dijadikan kantor utama tempat operasional perusahaan. pembangunan gedung tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan meminjam dana pada bank, dan atas pinjaman tersebut perusahaan harus membayar biaya bunga per bulan Rp75.000.000,- per bulan.

PENCATATAN TRANSAKSI ATAS BIAYA PINJAMAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Aset Dalam Penyelesaian	Rp75.000.000,-	
Kas / Bank		Rp75.000.000,-

DEPRESIASI

Depresiasi adalah suatu proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian rupa sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya.

Tanah umum tidak disusutkan karena umur ekonomis tanah tidak terbatas walaupun digunakan atau berjalannya waktu.

Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap adalah jumlah tercatatnya dikurangi dengan nilai residu, baik itu pada model biaya, maupun model revaluasi. depresiasi aset tetap harus terus dilakukan sepanjang nilai residu aset tidak melebihi nilai tercatatnya.

Jika nilai residu aset sama atau bahkan lebih besar dari nilai tercatat, maka depresiasi atas aset tersebut harus dihentikan, beban depresiasi sama dengan nol. Sampai dengan saat dimana nilai residu menurun hingga lebih kecil dari nilai tercatat.

DEPRESIASI ASET TETAP BERWUJUD

Penentuan metode depresiasi atas aset tetap berwujud dan amortisasi aset tak berwujud serta kapan depresiasi dan amortisasi dapat atau harus dimulai dapat berbeda antara SAK EP dan Peraturan Pajak.

SAK EP menetapkan bahwa aset tetap harus disusutkan sesuai dengan pola penggunaan manfaatnya selama manfaat ekonomis dan setiap akhir periode pelaporan manajemen harus melakukan asesmen untuk menentukan apakah pada penggunaan aset masih sama dengan metode depresiasi yang digunakan dan sisa manfaatnya ekonomi masih sesuai. Sedangkan peraturan pajak lebih lazimnya lebih menekankan pembakuan dan keseragaman.

Depresiasi aset tetap berwujud telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.72 Tahun 2023 diadakan penggolongan sebagai berikut :

Uraian	Umur	Garis Lurus
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 tahun	25%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%
Kelompok 4	20 tahun	5%
Bangunan		
Permanen	20 tahun	5%
Tidak Permanen	10 tahun	10%

Dokumen Akuntansi : Daftar Aset Tetap dan Perhitungan Depresiasi

Metode Pencatatan : Jurnal Umum

PENCATATAN TRANSAKSI DEPRESIASI ASET TETAP

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Depresiasi Sumber Air	Rpxxxxxxxxxxx	
Beban Depresiasi Pengolahan Air	Rpxxxxxxxxxxx	
Beban Depresiasi Transmisi & Distribusi	Rpxxxxxxxxxxx	
Beban Depresiasi	Rpxxxxxxxxxxx	
Akumulasi Depresiasi Sumber Air		Rpxxxxxxxxxxx
Akumulasi Depresiasi Pengolahan Air		Rpxxxxxxxxxxx
Akumulasi Depresiasi Transmisi & Distribusi		Rpxxxxxxxxxxx
Akumulasi Depresiasi		Rpxxxxxxxxxxx

AKUNTANSI MODEL REVALUASI ASET TETAP

Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap yang berada dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Suatu aset tetap dikatakan berada dalam kelompok yang sama dilihat dari sifat kegunaan yang berupa dalam operasi normal entitas.

Berikut adalah contoh kelompok aset tetap yang lazim:

- 1) Tanah
- 2) Tanah dan Bangunan
- 3) Mesin dan Peralatan
- 4) Peralatan dan Perabot Kantor
- 5) Kendaraan

PENERAPAN MODEL REVALUASI : NILAI ASET MENINGKAT

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

CONTOH

Perusahaan melakukan revaluasi aset dengan biaya perolehan sebesar Rp7.500.000.000,- disusut menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi atas aset tersebut. Berdasarkan laporan dari penilai independen, nilai wajar dari aset tersebut Rp5.000.000.000,-

PEMBAHASAN

Pada saat dilakukan revaluasi, akumulasi depresiasi pada waktu tersebut adalah sebesar:

$$2 \times \frac{1}{5} \times \text{Rp}7.500.000.000,- = \text{Rp}3.000.000.000,-$$

Dengan demikian nilai tercatat aset sebesar Rp4.500.000.000,- jika nilai wajar aset adalah Rp5.000.000.000,-. Berarti aset tetap mengalami kenaikan nilai sebesar Rp500.000.000,- yang seluruhnya akan dicatat sebagai surplus revaluasi.

Berdasarkan kenaikan nilai aset sebagai akibat revaluasi akan dicatat pada surplus revaluasi, yang akan dilaporkan sebagai komponen penghasilan komprehensif lain pada bagian ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

PENCATATAN TRANSAKSI REVALUASI ASET TETAP MENINGKAT

Nama Rekening	Debit	Kredit
Akumulasi Depresiasi	Rp3.000.000.000,-	
Aset Tetap		Rp2.500.000.000,-
Surplus Revaluasi		Rp500.000.000,-

PENERAPAN MODEL REVALUASI : NILAI ASET MENURUN

Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laba rugi, namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke penghasilan komprehensif lain pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

CONTOH

Perusahaan melakukan revaluasi aset dengan biaya perolehan sebesar Rp7.500.000.000,- disusut menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi atas aset tersebut. Berdasarkan laporan dari penilai independen, nilai wajar dari aset tersebut Rp4.000.000.000,-

PEMBAHASAN

Pada saat dilakukan revaluasi, akumulasi depresiasi pada waktu tersebut adalah sebesar:

$$2 \times \frac{1}{5} \times \text{Rp}7.500.000.000,- = \text{Rp}3.000.000.000,-$$

Dengan demikian nilai tercatat aset sebesar Rp4.500.000.000,-. Jika nilai wajar aset adalah Rp4.000.000.000,- berarti aset tetap mengalami penurunan nilai aset sebesar Rp500.000.000,- yang seluruhnya akan dicatat sebagai rugi surplus revaluasi.

Dalam Laporan Posisi Keuangan akan disajikan aset tetap nilai Rp4.000.000.000,- dengan akumulasi depresiasi nihil. Tidak terdapat saldo surplus revaluasi. Namun dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya, terdapat rugi penurunan nilai aset tetap sebesar Rp500.000.000,-.

PENCATATAN TRANSAKSI REVALUASI ASET TETAP MENURUN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Akumulasi Depresiasi	Rp3.000.000.000,-	
Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap	Rp500.000.000,-	
Aset Tetap		Rp3.500.000.000,-

8.5 Akuntansi Tanah

Sesuai dengan fungsinya atau tujuan pemanfaatannya dalam suatu entitas usaha, dalam pelaporan akuntansi, untuk tanah dapat dikelompokkan dan disajikan sebagai berikut:

- Aset Tetap
- Barang Dagangan : tanah matang perusahaan real estate
- Bahan Baku Produksi : tanah mentah dalam perusahaan real estate
- Aset Lain-lain : tanah sebagai cadangan untuk ekspansi perluasan bangunan pabrik suatu perusahaan
- Aset tetap tanah – Hak Sewa Guna Usaha : hak atas tanah yang diperoleh melalui sewa

PEROLEHAN GABUNGAN TANAH DAN BANGUNAN

Bahwa tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah walaupun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersama sebagai satu kesatuan. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya tanah memiliki umur yang tidak terbatas dan lazimnya tidak disusutkan, sedangkan bangunan merupakan aset tetap yang disusutkan.

CONTOH

Di awal tahun perusahaan membeli sebuah aset yang terdiri dari tanah dan bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp9.600.000.000,- dengan kas. Pada saat pembelian diketahui secara andal bahwa nilai wajar tanah adalah Rp7.000.000.000,- sedangkan nilai wajar bangunan adalah Rp5.000.000.000,-. Masa manfaat bangunan diperkirakan selama 10 tahun tanpa nilai sisa.

PEMBAHASAN

Harga perolehan yang dialokasikan ke tanah

$$= 7/12 \times \text{Rp}9.600.000.000,- = \text{Rp}5.600.000.000,-$$

Harga perolehan yang dialokasikan ke bangunan

$$= 5/12 \times \text{Rp}9.600.000.000,- = \text{Rp}4.000.000.000,-$$

PENCATATAN TRANSAKSI PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Tanah	Rp5.600.000.000,-	
Bangunan	Rp4.000.000.000,-	
Kas / Bank		Rp9.600.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI BEBAN DEPRESIASI BANGUNAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Depresiasi Bangunan *)	Rp400.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi Bangunan		Rp400.000.000,-

*) $1/10 \times \text{Rp}4.000.000.000,- = \text{Rp}400.000.000,-$

8.6 Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, dan tidak memiliki substansi fisik. Nilai dari aset tak berwujud berasal dari hak atau keistimewaan yang diperoleh entitas dari memiliki aset tersebut.

Berikut adalah beberapa contoh dari aset tak berwujud : Paten, Hak Cipta, Merk Produk, Piranti Lunak Komputer (*Software*), Waralaba, Goodwill.

CONTOH

Perusahaan membeli suatu sistem informasi IT dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,- dan umur manfaat ekonomis diperkirakan 10 tahun tanpa nilai sisa.

PENCATATAN TRANSAKSI SAAT PEMBELIAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Aset Tak Berwujud	Rp2.000.000.000,-	
Kas / Bank		Rp2.000.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI SAAT PEMBEBANAN AMORTISASI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp200.000.000,-	
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp200.000.000,-

PERUBAHAN ESTIMASI UMUR MANFAAT

Pada akhir tahun ke dua, nilai tercatat aset tak berwujud adalah Rp1.600.000.000,-
 $= \text{Rp}2.000.000.000 - (2 \times \text{Rp}200.000.000)$

Nilai Rp1.600.000.000,- ini menjadi basis amortisasi sisa umur manfaat 10 tahun ke depan. Besarnya amortisasi setiap tahun menjadi Rp160.000.000,-
 $= \text{Rp}1.600.000.000,- / 10$

PENCATATAN TRANSAKSI PERUBAHAN ESTIMASI UMUR MANFAAT

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp160.000.000,-	
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp160.000.000,-

8.7 Akuntansi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

CONTOH BIAYA PINJAMAN

Perusahaan membeli mesin pompa seharga Rp105.000.000,- pembayaran dicicil sebanyak 3 kali dan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.

PEMBAHASAN

Perusahaan harus membayar tambahan biaya bunga sebesar 2% atas pembelian pompa, yaitu sebesar 2% per bulan. Pada pembayaran pertama yaitu pada saat pengadaan pompa, perusahaan hanya membayar Rp35.000.000,-. Pada pembayaran kedua, perusahaan membayar Rp35.000.000,- ditambah bunga sebesar 2% dari Rp70.000.000,- saldo pinjaman bulan tersebut, atau sebesar Rp1.400.000,-. Pada akhir bulan kedua perusahaan membayar sisa sebesar Rp35.000.000,- ditambah bunga sebesar 2% dari Rp35.000.000,- atau sama Rp700.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI SAAT PEMBELIAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Mesin Pompa	Rp105.000.000,-	
Kas / Bank		Rp35.000.000,-
Utang Usaha		Rp70.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI SAAT PEMBAYARAN CICILAN KEDUA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Utang Usaha	Rp35.000.000,-	
Beban Bunga (Beban Pinjaman)	Rp1.400.000,-	
Kas / Bank		Rp36.400.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI SAAT PEMBAYARAN CICILAN KETIGA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Utang Usaha	Rp35.000.000,-	
Beban Bunga (Beban Pinjaman)	Rp 700.000,-	
Kas / Bank		Rp35.700.000,-

8.8 Akuntansi Sewa

Sewa adalah kontrak, atau bagian dari kontrak, yang memberikan untuk menggunakan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Mencakup kontrak untuk menyewa aset dengan persyaratan yang memberikan opsi kepada pesewa untuk memperoleh hak milik atas aset sesuai ketentuan yang disepakati.

Suatu kontrak dianggap sebagai sewa/mengandung sewa jika memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :

- 1) Terdapat aset identifikasian
- 2) Penyewa memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian selama suatu jangka waktu.

CONTOH

Perusahaan menandatangani perjanjian untuk menyewa mesin pompa dengan PT. XYZ tanggal 1 Januari 2024. Nilai wajar mesin pompa pada tanggal tersebut adalah Rp1.000.000.000,-. Masa sewa selama 5 (lima) tahun dengan estimasi umur ekonomis juga selama 5 (lima) tahun. Depresiasi dilakukan menggunakan metode garis lurus.

Angsuran sewa yang dibayar setiap tanggal 1 Januari, dan dimulai saat perjanjian ditandatangani adalah sebesar Rp240.660.000,- per tahun.

Suku bunga implisit yang dikenakan oleh PT.XYZ adalah 12%.

Pembayaran sewa minimum :

Nilai Kini Pembayaran Angsuran Sewa $\text{Rp}240.660.000,- \times 4,03735 = \text{Rp}971.673.173,-$

PENCATATAN TRANSAKSI SEWA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Mesin Pompa	Rp971.673.173,-	
Liabilitas Sewa		Rp971.673.173,-

PENCATATAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANGSURAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Liabilitas Sewa	Rp240.660.000,-	
Kas / Bank		Rp240.660.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI PEMBEBANAN BIAYA BUNGA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Bunga	Rp87.716.220,-	
Utang Bunga		Rp87.716.220,-

PENCATATAN TRANSAKSI PEMBEBANAN BEBAN PENYUSUTAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Depresiasi Mesin Pompa	Rp200.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi Mesin Pompa		Rp200.000.000,-

8.9 Akuntansi Provisi

Provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Jadi bedanya dengan liabilitas biasa lainnya adalah, suatu provisi meskipun keberadaannya (*existence*) sudah pasti ada, tetapi waktu (kapan harus dilunasi) dan jumlah pada saat penyusunan laporan keuangan masih belum dapat dipastikan.

Suatu liabilitas yang waktunya dan jumlah belum dapat dipastikan diakui sebagai provisi bila dipenuhi ketiga kondisi sebagai berikut :

- 1) Estimasi mempunyai kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu
- 2) Besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya
- 3) Estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat

PENCATATAN TRANSAKSI PROVISI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Jaminan Reparasi	RpXXXXXXXXXX	
Utang (Provisi) Jaminan Reparasi		RpXXXXXXXXXX

PENCATATAN TRANSAKSI PERBAIKAN REPARASI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Utang (Provisi) Jaminan Reparasi	RpXXXXXXXXXX	
Kas / Bank		RpXXXXXXXXXX

8.10 Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas

Menetapkan prinsip untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai Liabilitas atau Ekuitas dan mengatur akuntansi untuk instrumen ekuitas yang diterbitkan kepada perorangan atau pihak lain yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai investor dalam instrumen ekuitas (yaitu dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

CONTOH

Pada tanggal 1 Januari 2022 perusahaan menerbitkan 500 obligasi yang dapat dikonversi, obligasi diterbitkan pada nilai nominal Rp1.000.000,- per obligasi dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tanpa biaya transaksi. Total hasil yang diperoleh dari penerbitan obligasi adalah Rp500.000.000,-. Bunga dibayarkan secara tahunan setiap akhir tahun pada suku bunga tahunan 4%. Setiap obligasi yang dapat dikonversi, atas diskresi pemegang instrumen, menjadi 25 saham biasa setiap saat sampai jatuh tempo. Pada waktu obligasi

diterbitkan, suku bunga pasar untuk utang serupa yang tidak memiliki opsi konversi adalah 6%.

Hasil dari penerbitan obligasi (A)	Rp500.000.000
Nilai sekarang pokok pada akhir lima tahun	Rp373.630.000
Nilai sekarang bunga terutang setahun dalam jangka waktu lima tahun	Rp84.250.000
Nilai sekarang Liabilitas yang merupakan nilai wajar	Rp457.880.000
Residual yang merupakan nilai wajar komponen ekuitas	Rp42.120.000

PENCATATAN TRANSAKSI PENERBIT OBLIGASI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas / Bank	Rp500.000.000,-	
Liabilitas Keuangan – Obligasi Dikonversi		Rp457.880.000,-
Ekuitas		Rp42.120.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI MEREPRESENTASIKAN DISKONTO PADA PENERBIT OBLIGASI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas / Bank	Rp500.000.000,-	
Diskonto Obligasi	Rp42.120.000,-	
Liabilitas Keuangan – Obligasi Dikonversi		Rp500.000.000,-
Ekuitas		Rp42.120.000,-

8.11 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan perusahaan terdiri dari Pendapatan Usaha dan Non Usaha. Pendapatan Usaha meliputi Pendapatan Penjualan Air, baik diproduksi sendiri oleh perusahaan atau dibeli untuk dijual kembali dan Pendapatan Non Air seperti sambungan baru, pemeriksaan laboratorium, penyambungan kembali. Sedangkan pendapatan non operasional meliputi pendapatan bunga deposito, jasa giro, sewa, royalti dan deviden.

PENDAPATAN AIR

Pendapatan air yang berasal dari penjualan air diakui dengan terbit Daftar Rekening Ditagih (DRD) air.

Berikut ini adalah contoh-contoh transaksi penjualan air, piutang rekening air dan non air:

1) Pencatatan Transaksi Piutang Air

PDAM Kota Bengkulu menerbitkan rekapitulasi DRD Air atas pemakaian air bulan Januari 20x1 sebesar Rp155.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Harga Air Rp	Beban Tetap Rp
Sosial	5.000.000	1.250.000
Rumah Tangga R1	10.000.000	2.500.000
Rumah Tangga R2	7.500.000	1.875.000
Rumah Tangga R3	7.500.000	1.875.000
Instansi Pemerintah	15.000.000	3.000.000
TNI/POLRI	10.000.000	2.000.000
Niaga Kecil	15.000.000	3.750.000
Niaga Menengah	10.000.000	2.500.000
Niaga Besar	20.000.000	5.000.000
Industri	15.000.000	3.750.000
Pelabuhan	10.000.000	2.500.000
Total	125.000.000	30.000.000

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 1 Februari 20x1			
Dokumen Daftar Rekening Air yang Ditagihkan (DRD-A)			
Jurnal Rekening Air dan Non Air (JR)			
Debet :	Piutang rekening air-Sosial	Rp	6.250.000
	Piutang rekening air-R1	Rp	12.500.000
	Piutang rekening air-R2	Rp	9.375.000
	Piutang rekening air-R3	Rp	9.375.000
	Piutang rekening air-Inst Pemerintah	Rp	18.000.000
	Piutang rekening air-TNI/POLRI	Rp	12.000.000
	Piutang rekening air-Niaga Kecil	Rp	18.750.000
	Piutang rekening air-Niaga Mengah	Rp	12.500.000
	Piutang rekening air-Niaga Besar	Rp	25.000.000
	Piutang rekening air-Industri	Rp	18.750.000
	Piutang rekening air-Pelabuhan	Rp	12.500.000
Kredit :	Pendapatan air-Harga air	Rp	125.000.000
	Pendapatan air-Beban Tetap	Rp	30.000.000

2) Pencatatan pelunasan piutang air loket Kantor

Pada tanggal 14 Februari 20x1 sesuai Laporan Penerimaan Piutang Air (LPP-Air), perusahaan menerima pelunasan piutang pelanggan sebesar Rp11.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Harga Air Rp	Beban Tetap Rp
Sosial	200.000	75.000
Rumah Tangga R1	700.000	200.000
Rumah Tangga R2	1.100.000	300.000

Kelompok Pelanggan	Harga Air Rp	Beban Tetap Rp
Rumah Tangga R3	1.000.000	225.000
Instansi Pemerintah	500.000	100.000
TNI/POLRI	500.000	100.000
Niaga Kecil	750.000	200.000
Niaga Menengah	750.000	200.000
Niaga Besar	1.000.000	300.000
Industri	2.000.000	1.000.000
Total	8.500.000	2.700.000

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 14 Februari 20x1			
Dokumen Laporan Penerimaan Penagihan Air (LPP-A)			
Jurnal Penerimaan Kas/Bank (JPKB)			
Debet :	Kas	Rp	11.200.000
Kredit :	Piutang rekening air-Sosial	Rp	275.000
	Piutang rekening air-R1	Rp	900.000
	Piutang rekening air-R2	Rp	1.400.000
	Piutang rekening air-R3	Rp	1.225.000
	Piutang rekening air-Instansi Pemerintah	Rp	600.000
	Piutang rekening air-TNI/POLRI	Rp	600.000
	Piutang rekening air-Niaga Kecil	Rp	950.000
	Piutang rekening air-Niaga Menengah	Rp	950.000
	Piutang rekening air-Niaga Besar	Rp	1.300.000
	Piutang rekening air-Industri	Rp	3.000.000

3) Pencatatan pelunasan piutang air loket bank

Pada tanggal 15 Februari 20x1 sesuai laporan penerimaan piutang air (LPP-Air) Loket Bank Pembangunan Daerah, perusahaan menerima pelunasan piutang pelanggan sebesar Rp25.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Harga Air	Beban Tetap
	Rp	Rp
Rumah Tangga R1	2.000.000	800.000
Rumah Tangga R2	2.000.000	600.000
Rumah Tangga R3	2.500.000	600.000
Niaga Kecil	2.500.000	750.000
Niaga Menengah	2.000.000	750.000
Niaga Besar	3.000.000	900.000
Industri	5.000.000	2.100.000
Total	19.000.000	6.500.000

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 15 Februari 20x1			
Dokumen Laporan Penerimaan Penagihan Air (LPP-A) bank BPD			
Jurnal Penerimaan Kas/Bank (JPKB)			
Debet :	Bank Pembangunan Daerah/Kas	Rp	25.500.000
Kredit :	Piutang rekening air-R1	Rp	2.800.000
	Piutang rekening air-R2	Rp	2.600.000
	Piutang rekening air-R3	Rp	3.100.000
	Piutang rekening air-Niaga Kecil	Rp	3.250.000
	Piutang rekening air-Niaga Menengah	Rp	2.750.000
	Piutang rekening air-Niaga Besar	Rp	3.900.000
	Piutang rekening air-Industri	Rp	7.100.000

4) Pencatatan koreksi pemakaian air

Pada tanggal 15 Februari 20x1, memo kredit dari bagian rekening menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi pemakaian air pelanggan bernama Jojo nomor pelanggan 8403, dengan rincian sebagai berikut:

Nama/ID: Jojo/8403/Gol: R1

Kubikasi Awal			Kubikasi Koreksi			Piutang Awal		Piutang Terkoreksi	
Meter Lalu	Meter Kini	Pakai	Meter Lalu	Meter Kini	Pakai	Harga Air	Beban Tetap	Harga Air	Beban Tetap
1.000	1.050	50	1.000	1.030	30	75.000	5.000	50.000	5.000

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 15 Februari 20x1		
Dokumen memo kredit dari bagian rekening		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Pendapatan air	Rp25.000
Kredit :	Piutang rekening air-R1	Rp25.000

Pada tanggal 16 Februari 20x1, memo debet dari bagian rekening menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi pemakaian air pelanggan bernama Joyo nomor pelanggan 8404, dengan rincian sebagai berikut:

Nama/ID: Joyo/8404/Gol: R3

Kubikasi Awal			Kubikasi Koreksi			Piutang Awal		Piutang Koreksi	
Meter Lalu	Meter Kini	Pakai	Meter Lalu	Meter Kini	Pakai	Harga Air	Beban Tetap	Harga Air	Beban Tetap
5.000	5.050	50	5.000	5.150	150	100.000	5.000	250.000	5.000

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 16 Februari 20x1		
Dokumen memo kredit dari bagian rekening		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Piutang rekening air - R3	Rp150.000
Kredit :	Pendapatan air	Rp150.000

5) Pencatatan penghapusan piutang air

Pada tahun 20x1, PDAM Kota Bengkulu memiliki kebijakan internal pengelolaan piutang rekening air yang ditandatangani oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas, antara lain sebagai berikut:

- Piutang rekening air yang telah berumur di atas lima tahun dapat diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapuskan.
- Piutang rekening air yang telah dihapuskan, dikeluarkan dari catatan pembukuan namun tetap dicatat secara *extracomptabel* dan tetap diusahakan penagihannya.

Pada tanggal 31 Januari 20x2, Dewan Pengawas memberikan persetujuan penghapusan rekening air, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Harga Air Rp	Beban Tetap Rp
Sosial	1.000.000	150.000
Rumah Tangga R1	10.000.000	2.500.000
Rumah Tangga R2	7.500.000	1.750.000
Rumah Tangga R3	1.500.000	350.000
Niaga Kecil	10.000.000	1.100.000
Niaga Menengah	5.000.000	1.000.000
Niaga Besar	10.000.000	1.000.000
Total	45.000.000	7.500.000

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 31 Januari 20x2		
Dokumen Keputusan Direksi dan Persetujuan Dewan Pengawas		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Akumulasi Peny. Kerugian Piutang Usaha	Rp 52.500.000
Kredit :	Piutang rekening air-Sosial	Rp 1.150.000
	Piutang rekening air-R1	Rp12.500.000
	Piutang rekening air-R2	Rp 9.250.000
	Piutang rekening air-R3	Rp 1.850.000
	Piutang rekening air-Niaga Kecil	Rp 11.100.000
	Piutang rekening air-Niaga Menengah	Rp 6.000.000
	Piutang rekening air-Niaga Besar	Rp 11.000.000

6) Pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan

Pada tanggal 1 Maret 20x2, sesuai LPP Air terdapat penerimaan pelunasan piutang rekening air – R3 yang telah dihapuskan sebesar Rp3.500.000,00 terdiri dari pelunasan piutang rekening air sebesar Rp2.000.000,00, denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 dan beban penyambungan baru sebesar Rp1.000.000,00.

Jurnal untuk mencatat kembali transaksi piutang:

Tanggal 1 Maret 20x2		
Dokumen LPP Air		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Piutang rekening air-R3	Rp 2.000.000
Kredit :	Akum Peny. Kerugian Piutang Air	Rp 2.000.000

Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas

Tanggal 1 Maret 20x2		
Dokumen LPP Air		
Jurnal Penerimaan Kas/Bank (JPKB)		
Debet :	Kas	Rp 3.500.000
Kredit :	Pendapatan Denda	Rp 500.000
	Pendapatan Sambungan Baru	Rp 1.000.000
	Piutang rekening air-R3	Rp 2.000.000

7) Pencatatan keterlambatan pelunasan piutang

Pada tanggal 29 Maret 20x2, sesuai LPP Air terdapat penerimaan pelunasan piutang rekening air pelanggan golongan R1 yang terdiri atas penerimaan piutang air sebesar Rp5.000.000,00 dan penerimaan denda keterlambatan pelunasan sebesar Rp150.000,00.

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 29 Maret 20x2		
Dokumen LPP Air		
Jurnal Penerimaan Kas/Bank		
Debet :	Kas	Rp 5.150.000
Kredit :	Piutang rekening air-R1	Rp 5.000.000
	Pendapatan denda	Rp 150.000

8) Pencatatan penyisihan kerugian piutang usaha pelanggan masih aktif

Saldo piutang rekening air PDAM Kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 20x2 sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Saldo per 31/12/20x2 Rp
Sosial	50.000.000
Rumah Tangga R1	100.000.000
Rumah Tangga R2	40.000.000
Rumah Tangga R3	200.000.000
Instansi Pemerintah	50.000.000
TNI/POLRI	50.000.000
Niaga Kecil	50.000.000
Niaga Menengah	50.000.000
Niaga Besar	200.000.000
Industri	500.000.000
Pelabuhan	10.000.000
Total	1.300.000.000

Berdasarkan pengalaman selama tiga tahun terakhir, kemungkinan tidak tertagihnya piutang rekening air sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Tahun 2009 (Rpjuta)			Tahun 20x0 (Rpjuta)			Tahun 20x1 (Rpjuta)			Rata - Rata
	Piutang 31 Des 2008 + DRD 2009	Ter tagih selama 2009	%Tak Tertagih	Piutang 31 Des 2009 + DRD 20x0	Ter tagih selama 20x0	%Tak Tertagih	Piutang 31 Des 20x0 + DRS 20x1	Ter tagih selama 20x1	%Tak Tertagih	
Sosial	40	30	25%	40	40	0%	50	45	10%	12%
Rumah Tangga R1	75	70	7%	80	75	6%	95	92	3%	5%
Rumah Tangga R2	30	29	3%	36	35	3%	38	37	3%	3%
Rumah Tangga R3	175	175	0%	180	180	0%	195	195	0%	0%
Inst Pemerintah	50	50	0%	50	50	0%	50	50	0%	0%
TNI/POLRI	45	40	11%	46	45	2%	48	46	4%	6%
Niaga Kecil	50	50	0%	50	50	0%	50	49	2%	1%
Niaga Menengah	50	50	0%	50	50	0%	50	50	0%	0%
Niaga Besar	200	200	0%	200	200	0%	200	200	0%	0%
Industri	500	500	0%	500	500	0%	500	490	2%	1%
Pelabuhan	10	10	0%	10	10	0%	10	10	0%	0%

Pada tanggal 31 Desember 20x2, PDAM Kota Bengkulu harus membukukan beban penyisihan kerugian piutang usaha sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Per 31/12/20x2	%	Besar
	Rp		Penvisihan Rp
Sosial	50.000.000	12%	6.000.000
Rumah Tangga R1	100.000.000	5%	5.000.000
Rumah Tangga R2	40.000.000	3%	1.200.000
Rumah Tangga R3	200.000.000	0%	0
Instansi Pemerintah	50.000.000	0%	0
TNI/POLRI	50.000.000	6%	3.000.000
Niaga Kecil	50.000.000	1%	500.000
Niaga Menengah	50.000.000	0%	0
Niaga Besar	200.000.000	0%	0
Industri	500.000.000	1%	5.000.000
Pelabuhan	10.000.000	0%	0
Total	1.300.000.000		20.700.000

Pada akhir tahun 20x1, saldo akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha sebesar Rp19.000.000,00, sehingga beban yang harus dicatat pada akhir tahun 20x2 hanya sebesar Rp1.700.000,00 (Rp20.700.000-19.000.000).

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 31 Desember 20x2		
Dokumen Surat Keputusan Direksi dan Persetujuan Dewan Pengawas		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Beban penyisihan kerugian piutang usaha	Rp 1.700.000
Kredit :	Akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha	Rp 1.700.000

Seandainya pada akhir tahun 2011, saldo akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha sebesar Rp25.000.000,00, maka akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha yang harus dilakukan pendebitan sebesar Rp4.300.000,00 (Rp25.000.000-20.700.000).

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Tanggal 31 Desember 20x2		
Dokumen Surat Keputusan Direksi dan Persetujuan Dewan Pengawas		
Jurnal Umum (JU)		
Debet :	Akumulasi penyisihan kerugian piutang usaha	Rp 4.300.000
Kredit :	Keuntungan pemulihan penyisihan	Rp 4.300.000

PENURUNAN NILAI PIUTANG REKENING AIR

Pembentukan penurunan piutang rekening air dilakukan pada saat akhir tahun setelah perusahaan melakukan evaluasi atas piutang rekening air dengan membuat daftar umur piutang rekening.

PENCATATAN TRANSAKSI PENURUNAN PIUTANG REKENING AIR

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Penurunan Piutang Rekening Air	RpXXXXXXXXXXXX	
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok I		RpXXXXXXXXXXXX
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok II		RpXXXXXXXXXXXX
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok III		RpXXXXXXXXXXXX
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok Khusus		RpXXXXXXXXXXXX

PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING AIR

Penghapusan piutang rekening air berdasar daftar normatif piutang rekening air untuk dihapuskan apabila sudah ada persetujuan dari Dewan Pengawas atau KPM sesuai Perda.

PENCATATAN TRANSAKSI PENURUNAN PIUTANG REKENING AIR

Nama Rekening	Debit	Kredit
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok I	RpXXXXXXXXXXXX	
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok II	RpXXXXXXXXXXXX	
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok III	RpXXXXXXXXXXXX	
Penurunan Nilai Piutang Rek.Air Kelompok Khusus	RpXXXXXXXXXXXX	
Piutang Rekening Air Kelompok I		RpXXXXXXXXXXXX
Piutang Rekening Air Kelompok II		RpXXXXXXXXXXXX
Piutang Rekening Air Kelompok III		RpXXXXXXXXXXXX
Piutang Rekening Air Kelompok Khusus		RpXXXXXXXXXXXX

9) Pendapatan Pemasangan Sambungan Baru

Pendapatan pemasangan sambungan baru diukur berdasarkan pendaftaran diakui pada saat calon pelanggan telah membayar biaya pendaftar dan kuitansi pembayaran dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP).

Dalam pengakuan pendapatan sambungan baru, pembebanan Harga Pokok Penjualan harus diakui dengan konsep *Matching Cost Against Revenue*.

Penerimaan biaya pendaftaran diakui pada saat calon pelanggan telah membayar biaya pendaftar.

PENCATATAN TRANSAKSI PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas / Bank	RpXXXXXXXXXXXX	
Pendapatan Non Air Sambungan Baru		RpXXXXXXXXXXXX

Dokumen Akuntansi : kuitansi pembayaran dan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP)

10) Beban Harga Pokok Penjualan Sambungan Baru

Pencatatan atas Harga Pokok Penjualan Sambungan Baru dilakukan setelah adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sambungan Baru.

PENCATATAN TRANSAKSI PEMBEBANAN HARGA POKOK PENJUALAN SAMBUNGAN BARU

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Pokok Penjualan Sambungan Baru *)	RpXXXXXXXXXXXX	
Aset Tidak Lancar (Water Meter)	RpXXXXXXXXXXXX	
Persediaan Meter Air		RpXXXXXXXXXXXX
Persediaan Aksesoris		RpXXXXXXXXXXXX
Kas /Bank		RpXXXXXXXXXXXX

*) Biaya pemasangan dan aksesoris

Dokumen Akuntansi : Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang (BPPB)

8.12 Akuntansi Hibah Pemerintahan

Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah dimaksud adalah bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang, barang dan jasa. Hibah pemerintah tidak mengikat dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada hibah yang berkaitan dengan aset tetap, maka baik hibah maupun aset tetap yang diterima harus dicatat pada nilai wajar. Hibah pemerintah ini hanya boleh diakui jika telah diperoleh suatu keyakinan bahwa :

- Entitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan hibah tersebut
- Hibah akan diperoleh

Hibah yang diterima dicatat sebagai pendapatan selama periode yang berkaitan dengan penggunaan hibah tersebut. Hibah yang diterima berkaitan dengan aset tetap, diakui sebagai pendapatan selama masa manfaat aset tetap tersebut dan diakui secara proporsional sejalan dengan depresiasi aset tetap yang bersangkutan. Hibah pemerintah tidak boleh dikreditkan secara langsung pada ekuitas.

CONTOH

Perusahaan akan menerima hak pemakaian tanah dari pemerintah daerah sebagai hibah, atas usaha perusahaan melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas air minum. Tanah tersebut digunakan oleh perusahaan untuk perluas usaha, dan tanah itu dapat digunakan selama 20 tahun ke depan. Seluruh persyaratan penerimaan hibah telah dipenuhi oleh perusahaan. Nilai wajar dari tanah yang akan diterima adalah Rp1.500.000.000,-

PEMBAHASAN

Nilai wajar dari tanah yang diterima adalah Rp1.500.000.000,-, sehingga perusahaan akan mencatat tanah dan pendapatan dari hibah pemerintah masing-masing Rp1.500.000.000,-. Sesuai dengan sifatnya, tanah tidak disusutkan, namun karena adanya pembatasan penggunaan tanah tersebut selama 20 tahun, maka atas tanah yang diperoleh melalui hibah ini harus disusutkan selama 20 tahun.

PENCATATAN TRANSAKSI HIBAH PEMERINTAH

a) Pada Saat Menerima Hibah

Nama Rekening	Debit	Kredit
Hak Tanah	Rp1.500.000.000,-	
Pendapatan Ditangguhkan – Hibah		Rp1.500.000.000,-

b) Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Nama Rekening	Debit	Kredit
Hak Tanah	Rp75.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi Hak Tanah		Rp75.000.000,-
Pendapatan Ditangguhkan – Hibah	Rp75.000.000,-	
Pendapatan Hibah		Rp75.000.000,-

8.13 Akuntansi Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja.

Jenis imbalan kerja yang termasuk ke dalam definisi imbalan kerja adalah sebagai berikut :

No	Jenis Imbalan Kerja	Contoh
1.	Imbalan Jangka Pendek	Upah, gaji, bagi hasil atau bonus, iuran jaminan sosial
2.	Imbalan Pasca Kerja	Pensiun, asuransi jiwa pasca kerja, tunjangan kesehatan
3.	Imbalan Jangka Panjang Lainnya	Cuti berimbalan jangka panjang, imbalan jasa jangka panjang lainnya
4.	Imbalan Pemutusan	Pemutusan Hubungan Kerja

Program Pensiun

Program pensiun yang diikuti, apakah program pensiun iuran pasti atau program pensiun manfaat pasti.

1. Apabila Perusahaan Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti

- Gambaran umum tentang program pensiun, pengelola dana pensiun, persentase iuran yang menjadi kontribusi perusahaan, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun dan lain-lain.
- Jumlah beban (iuran) pensiun periode berjalan dan jumlah iuran pensiun yang masih harus dibayar.
- Hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan program pensiun yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.

CONTOH AKUNTANSI PROGRAM IURAN PASTI

Perusahaan melakukan program imbalan kerja iuran pasti untuk 100 pekerjaannya. Perusahaan membayar iuran sebesar Rp100.000.000,- per tahun (Rp1.000.000,- untuk setiap orang) ke program tersebut. Program Iuran Pasti mensyaratkan pekerja untuk bekerja selama minimum 3 (tiga) tahun di perusahaan untuk menjadi berhak akan imbalan pascakerja tersebut. Iuran yang dibayarkan bagi pekerja yang meninggalkan perusahaan sebelum periode 3 (tiga) tahun tersebut dikembalikan kepada perusahaan.

20 (dua puluh) pekerja meninggalkan perusahaan pada awal tahun ke tiga. Maka, perusahaan menjadi berhak akan pengembalian sebesar Rp40.000.000,- (20 pekerja x Rp1.000.000,- x 2 tahun). Di tahun ketiga perusahaan membayar iuran sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap pekerja per periode ketika pekerja menjadi berhak akan imbalan ini. Maka perusahaan mengakui beban sebesar Rp100.000.000,- di tahun pertama, Rp100.000.000,- di tahun kedua dan Rp80.000.000,- di tahun ketiga. Pengembalian sebesar Rp40.000.000,-

diakui sebagai aset dan pendapatan di tahun ketiga, sehingga mengakibatkan beban neto sebesar Rp40.000.000,- di tahun ketiga.

PENCATATAN TRANSAKSI TAHUN PERTAMA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Gaji luran Pasti	Rp100.000.000,-	
Kas / Bank		Rp100.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI TAHUN KEDUA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Gaji luran Pasti	Rp100.000.000,-	
Kas / Bank		Rp100.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI TAHUN KETIGA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Gaji luran Pasti	Rp80.000.000,-	
Kas / Bank		Rp80.000.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI PENERIMAAN ASURANSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas / Bank	Rp40.000.000,-	
Hutang Non Usaha		Rp40.000.000,-

Pada Saat Pengembalian

Setelah perusahaan dana pengembalian maka perusahaan memberikan dana tersebut kepada karyawan yang berhak menerimanya dan membuat pencatatan transaksi.

PENCATATAN TRANSAKSI PEMBAYARAN KEPADA KARYAWAN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Hutang Non Usaha	Rp40.000.000,-	
Kas / Bank		Rp40.000.000,-

2. Apabila Perusahaan Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti :

- Gambaran umum tentang program pensiun, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, dan pengelolaannya.
- Kebijakan pendanaan.

- Rincian beban pensiun yang terdiri dari beban jasa kini, amortisasi beban jasa lalu, amortisasi.
- Koreksi dari bunga atas beban pensiun yang masih harus dibayar, jangka waktu amortisasi beban jasa lalu.
- Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan aktuaris, nilai wajar aset bersih dana pensiun dan selisih lebih (kurang) antara liabilitas aktuarial dan nilai wajar aset bersih.
- Rekonsiliasi beban pensiun yang masih harus dibayar (dibayar dimuka).
- Bila dilakukan perubahan metode aktuarial, alasan perubahan, jumlah penyesuaian.
- Perubahan terhadap Laporan Keuangan periode sajian, dan jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode sajian tanggal penilaian aktuarial terakhir, nama aktuaris, frekuensi penilaian dilakukan.
- Hal-hal penting lain yang berhubungan dengan manfaat pensiun, termasuk dampak.
- Pembubaran, pengurangan peserta yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan.

Apa keuntungan dan kerugian metode aktuarial?

KEUNTUNGAN	Kewajiban imbalan pasti berdasarkan perhitungan aktuarial < kewajiban yang diharapkan
	Hasil investasi aset program > hasil investasi yang diharapkan
KERUGIAN	Kewajiban imbalan pasti berdasarkan perhitungan aktuarial > kewajiban yang diharapkan
	Hasil investasi aset program < hasil investasi yang diharapkan

CONTOH PERGERAKAN DALAM NILAI WAJAR ATAS ASET PROGRAM

Uraian	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
Saldo awal nilai wajar atas aset program	21.630.000.000,-	20.050.000.000,-
Penghasilan Bunga	1.125.000.000,-	1.045.000.000,-
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali: Imbal hasil atas aset program (tidak termasuk)	2.590.000.000,-	700.000.000,-
Jumlah yang dimasukkan dalam biaya bunga neto		
Lain-lain	-	-
Kontribusi dari Entitas	4.550.000.000,-	4.350.000.000,-

Uraian	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
Kontribusi dari pekerja	2.200.000.000,-	2.060.000.000,-
Aset yang didistribusikan dalam penyelesaian	-	-
Aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis	-	-
Perubahan Kurs Valuta Asing	(6.305.000.000,-)	830.000.000,-
Pembayaran Imbalan	(4.780.000.000,-)	(7.405.000.000,-)
Lain-lain (jelaskan)	-	-
Saldo akhir nilai wajar atas aset program	21.010.000.000,-	21.630.000.000,-

CONTOH MENENTUKAN BUNGA NETO

Pada awal periode terdapat nilai wajar aset program sebesar Rp30.000.000.000,- dan nilai kini liabilitas manfaat pasti sebesar Rp32.000.000.000,-. Ekspektasi pasar 8% dan tingkat diskonto 5%. Tentukan biaya bunga netto.

PERHITUNGAN

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nilai kini liabilitas manfaat pasti	Rp32.000.000.000,-
2.	Nilai wajar atas program	Rp30.000.000.000,-
3.	Liabilitas pensiun netto	Rp2.000.000.000,-

Biaya bunga netto = Rp2.000.000.000,- x 5% = Rp100.000.000,-

Ikhtisar perhitungan beban imbalan yang akan dilaporkan dalam laba rugi :

Beban Imbalan / Pensiun Expense:

- Biaya jasa kini
- Biaya jasa lalu
- Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian
- Biaya bunga netto

CONTOH IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan memberikan program pasca kerja pasti untuk karyawannya, berikut ini informasi yang terkait dengan rencana program imbalan pasca kerja tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya jasa kini	Rp5.000.000,-
2.	PVDBO pada awal tahun	Rp40.000.000,-
3.	FV Aset program awal tahun	Rp35.000.000,-

No.	Uraian	Jumlah
4.	Tingkat bunga	10%
5.	Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum tercatat	Rp8.000.000,-
6.	Tahun rata-rata sisa pelayanan	15 tahun
7.	Iuran yang dibayar kepada dana pensiun	Rp4.000.000,-
8.	Imbalan yang dibayarkan kepada pekerja	Rp6.000.000,-
9.	PVDBO pada akhir tahun berdasarkan aktuarial	Rp49.000.000,-

Hitung beban imbalan dan kewajiban imbalan yang akan dilaporkan pada akhir periode dan bagaimana jurnal yang terkait dengan program ini.

Langkah 1 : Menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti PVDBO awal tahun
Rp40.000.000,-

PVDBO akhir tahun Rp49.000.000,-

Langkah 2 : FV aset program Rp40.450.000,-

Langkah 3 : Liabilitas imbalan pasca kerja neto Rp49.000.000,-

Langkah 4 : Menentukan RpXXXXXXX laba rugi

No.	Uraian	Jurnal Umum (Dalam Rupiah)				Memo (Dalam Rupiah)	
		Beban	Kas	Penghasilan Komprehensif Lainnya	(Liabilitas)/ Aset Imbalan	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	Nilai Wajar Aset Program
1.	Saldo Awal			(8.000.000)	(5.000.000)	(40.000.000)	(35.000.000)
2.	Biaya Jasa Kini	5.000.000				(50.000.000)	
3.	Biaya Bunga	2.000.000				(2.000.000)	
4.	Pendapatan Bunga	(1.750.000)					1.750.000
5.	Iuran		(4.000.000)				4.000.000
6.	Imbalan					300.000	(300.000)
7.	Pengukuran Kembali-Kerugian			2.300.000		(2.300.000)	
8.	Jumlah Tahun Berjalan	5.250.000	(4.000.000)	2.300.000	(3.550.000)		
9.	Saldo Akhir			(5.700.000)	(8.550.000)	(94.000.000)	(29.550.000)

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Imbalan	Rp5.250.000,-	
Penghasilan Komprehensif Lainnya	Rp2.300.000,-	
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		Rp3.550.000,-
Kas / Bank		Rp4.000.000,-

AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dihitung mengacu pada peraturan yang berlaku.

CONTOH

Pada tahun pelaporan 31 Desember 2023 Tn. X telah berusia 30 tahun, mulai bekerja pada saat umur 25 tahun dan akan pensiun pada usia 55 tahun dengan gaji Rp10.000.000,-/bulan. Tingkat kenaikan gaji diasumsikan 8% per tahun dengan tingkat suku bunga diskonto 10% per tahun, berapakah imbalan pasca kerja yang akan dibayar oleh perusahaan dan berapakah kewajiban yang diakui untuk tahun-tahun yang lalu.

PEMBAHASAN

Gaji pada saat pensiun = $Rp10.000.000 \times (1+0,08)^{(55-30)}$

= $Rp10.000.000 \times (6,84848)$

= Rp68.484.800

(1) Pesangon = $Rp68.484.800 \times 9 = Rp616.363.200,-$

(2) Penghargaan masa kerja = $10 \times Rp68.484.800 = Rp684.848.000,-$

(3) IPK pada masa yang akan datang = (1) + (2) = $Rp1.301.211.200,-$

(4) Aset pajak tangguhan = $22\% \times Rp1.301.211.200 = Rp286.266.464,-$

PENCATATAN BEBAN IMBALAN KERJA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Laba ditahan (Cadangan Umum)	Rp1.014.944.736,-	
Aset Pajak Tangguhan	Rp286.266.464,-	
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		Rp1.301.211.200,-

8.14 Akuntansi Pajak Penghasilan

LABA (RUGI) AKUNTANSI

Adalah laba (rugi) selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

LABA KENA PAJAK ATAU LABA FISKAL

Adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).

BEBAN PAJAK (PENGHASILAN PAJAK)

Adalah jumlah gabungan pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

PAJAK KINI (*CURRENT TAX*)

Adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan.

ASET PAJAK TANGGUHAN

Adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa mendatang sebagai akibat adanya :

- a) Perbedaan temporer dapat dikurangkan.
- b) Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi.
- c) Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. (kredit pajak belum dimanfaatkan merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada entitas yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pengurangan pajak terutang di masa depan).

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak :

- a) Perbedaan temporer kena pajak yaitu temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
- b) Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

CONTOH

PERBEDAAN TEMPORER KENA PAJAK DIAKUI SEBAGAI LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2022 membeli sebuah mobil tangki seharga Rp500.000.000,- dengan umur ekonomis adalah 5 tahun. Untuk perhitungan laba akuntansi, mobil tangki tersebut disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama 5 tahun (25% per tahun). Tapi untuk tujuan perhitungan laba fiskal, perusahaan memilih metode saldo menurun

(*declining balance method*) yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan dengan persentase depresiasi 50% per tahun dari saldo buku.

Perbandingan perhitungan depresiasi antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Akuntansi Keuangan	Akuntansi Pajak
1 Januari 2022	Harga Perolehan Mobil Tengki	Rp500.000.000,-	Rp500.000.000,-
31 Desember 2022	Depresiasi :		
	25%	(125.000.000,-)	
	50%		(250.000.000,-)
	Nilai Buku	375.000.000,0	250.000.000,-

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat mobil tangki adalah Rp375.000.000,- sedangkan dasar pengenaan pajak (*tax base*) adalah Rp250.000.000,-. Maka untuk periode berikut jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak sebesar Rp125.000.000,- (Rp375.000.000,- - Rp250.000.000,-) adalah perbedaan temporer kena pajak.

Jika tarif pajak penghasilan adalah 22%, maka pajak sejumlah Rp27.500.000,- (22% x Rp125.000.000,-) merupakan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang dan merupakan liabilitas pajak tangguhan.

Bila laba akuntansi sebelum Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp800.000.000,- maka perhitungan laba fiskal adalah sebagai berikut :

Laba Akuntansi Sebelum Pajak		Rp800.000.000,-
Depresiasi secara komersial	Rp125.000.000,-	
Depresiasi secara fiskal	(Rp250.000.000,-)	
Selisih depresiasi komersial dan fiskal		(Rp125.000.000,-)
Laba kena pajak		Rp675.000.000,-

Pajak penghasilan kini 2022

$22\% \times \text{Rp}675.000.000,- = \text{Rp}148.500.000,-$

Liabilitas pajak tangguhan

$22\% \times \text{Rp}125.000.000,- = \text{Rp}27.500.000,-$

PENYAJIAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

No	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pajak Kini	Rp148.500.000,-
2.	Beban Pajak Tangguhan	Rp27.500.000,-
3.	Jumlah Beban Pajak	Rp176.000.000,-

Entitas akan mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi sebesar Rp176.000.000,- dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan sebesar Rp27.500.000,-

PENCATATAN TRANSAKSI

Per 31 Desember 2022

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Pajak Kini	Rp148.500.000,-	
Beban Pajak Tangguhan	Rp27.500.000,-	
Hutang Pajak pasal 29		Rp148.500.000,-
Liabilitas Pajak Tangguhan		Rp27.500.000,-

PENENTUAN TIMBUL ASET ATAU LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN :

Uraian	Nilai Tercatat Pengenaan Pajak	Jenis Beda Temporer	Menimbulkan
Aset	Positif	Kena Pajak	Liabilitas Pajak Tangguhan
Aset	Negatif	Dapat Dikurangkan	Aset Pajak Tangguhan
Liabilitas	Positif	Dapat Dikurangkan	Aset Pajak Tangguhan
Liabilitas	Negatif	Kena pajak	Liabilitas Pajak Tangguhan

8.15 Akuntansi Penyertaan Pemerintah

Pemerintah memberikan bantuan dana kepada BUMD Air Minum sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

Bukti Akuntansi : Perda Penyertaan Modal Daerah, SP2D dan Rekening Bank/Bukti Transfer

Media Pencatatan : Jurnal Umum (JU)

PENCATATAN TRANSAKSI UNTUK PERUMDA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas / Bank	RpXXXXXXXXXX	
Penyertaan Pemerintah		RpXXXXXXXXXX

PENCATATAN TRANSAKSI UNTUK PERSERODA

Nama Rekening	Debit	Kredit
Kas / Bank	RpXXXXXXXXXX	
Modal Saham		RpXXXXXXXXXX

8.16 Akuntansi Pembagian Laba

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017

a. PENGGUNAAN LABA BUMD

Pasal 100

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan
 - c. deviden yang menjadi hak daerah
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas
 - e. bonus untuk pegawai
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM

Pasal 101

- (1) Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan tersebut untuk memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi

Pasal 102

Deviden Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 103

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Pasal 104

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah dan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN PERSERODA

Pasal 105

- (1) Penggunaan laba perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas
- (2) Deviden perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS

Penggunaan Laba BUMD Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 106

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

PEMBEBANAN ATAS TANTIEM DAN BONUS

PERHITUNGAN TANTIEM DAN BONUS

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Laba Kena Pajak	RpXXXXXXXXXXXXXXX
2.	Cadangan Umum	RpXXXXXXXXXXXXXXX
3.	Saldo Laba Setelah Dikurangi Cadangan Umum	Rp AAAAAAAAAAAAAA
4.	Tantiem dan Bonus	5% x RpAAAAAAAAAAAA

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Beban Tantiem dan Bonus	RpXXXXXXXXXXXXX	
Utang Tantiem dan Bonus		RpXXXXXXXXXXXXX

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN OLEH KMP / RUPS

Sesuai dengan PP No.54 Tahun 2017 pasal 97 ayat (4) Laporan Tahunan disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

PENCATATAN TRANSAKSI

Nama Rekening	Debit	Kredit
Saldo Laba Bersih	RpXXXXXXXXXXXXX	
Utang Deviden Pemerintah		RpXXXXXXXXXXXXX
Dana Sosial		RpXXXXXXXXXXXXX
Cadangan Umum		RpXXXXXXXXXXXXX
Cadangan Tujuan		RpXXXXXXXXXXXXX

PENCATATAN TRANSAKSI ATAS PEMBAYARAN TANTIEM DAN BONUS

Nama Rekening	Debit	Kredit
Utang Deviden Pemerintah	RpXXXXXXXXXXXX	
Utang PPh Pasal 21 Tantiem dan Bonus		RpXXXXXXXXXXXX
Kas / Bank		RpXXXXXXXXXXXX

PENCATATAN TRANSAKSI ATAS PEMBAYARAN DEVIDEN

Nama Rekening	Debit	Kredit
Utang Deviden Pemerintah	RpXXXXXXXXXXXX	
Kas / Bank		RpXXXXXXXXXXXX

BAB IX

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan perusahaan adalah laporan yang penting dalam bisnis. Dengan adanya laporan tersebut, perusahaan dapat mempunyai catatan keuangan yang valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan ini bisa menjadi bukti valid untuk memantau keadaan keuangan perusahaan.

Selain itu, laporan ini juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengatur strategi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Laporan ini juga bisa diberikan jika ada audit perusahaan.

Oleh sebab itu, laporan keuangan perlu dicatat dengan akurat dan benar. Itu artinya, pencatatan tersebut harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan perusahaan tanpa perlu dikurangi atau ditambah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri : 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Sesuai peraturan disebut di atas bahwa BUMD wajib membuat laporan keuangan :

1. Laporan Keuangan Bulanan
2. Laporan Keuangan Per Triwulan
3. Laporan Keuangan Tahunan

Komponen minimum laporan keuangan interim sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Penjelasan Tertentu

9.1 BENTUK LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA TIRTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	2024	2023
	ASET		
I	ASET LANCAR		
1.1	KAS DAN SETARA KAS		
1.2	PIUTANG USAHA		
1.3	PENURUNAN NILAI PIUTANG USAHA		
1.4	PIUTANG LAIN-LAIN		
1.5	PERSEDIAAN		
1.6	PEMBAYARAN DIMUKA		
	JUMLAH ASET LANCAR >>>>>>>>>>>>		
II	ASET TIDAK LANCAR		
	ASET TETAP		
2.1	ASET TETAP		
2.2	AKUMULASI DEPRESIASI AKTIVA TETAP		
	JUMLAH ASET TETAP >>>>>>>>>>>>		
	ASET LAIN-LAIN		
2.3	ASET TETAP DIKERJASAMAKAN		
2.4	ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN		
2.5	ASET TIDAK BERWUJUD		
2.6	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD		
2.7	ASET PAJAK TANGGUHAN		
	JUMLAH ASET LAIN-LAIN >>>>>>>>>>>>		
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR >>>>>>>>>		
	JUMLAH ASET >>>>>>>>>>>>		

PERUMDA TIRTA LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

[illegible]

PERUMDA TIRTA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	2024	2023
I	PENDAPATAN USAHA		
	a) Pendapatan Penjualan Air		
	b) Pendapatan Non Air		
	c) Pendapatan Kemitraan		
	Jumlah Pendapatan Usaha		
II	BEBAN USAHA		
	a) Beban Operasi		
	b) Beban Pengolahan Air		
	c) Beban Transmisi dan Distribusi		
	d) Beban (HPP) Sambungan Baru		
	Jumlah Beban Usaha		
III	LABA RUGI KOTOR		
IV	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		
V	LABA RUGI OPERASIONAL		
VI	PENDAPATAN BEBAN LAIN-LAIN		
	Pendapatan Lain-lain		
	Biaya Lain-lain		
	Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain		
VII	LABA RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK		
VIII	BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	Pajak Kini		
	Beban Pajak Tangguhan		
	Jumlah Pajak		
IX	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
X	(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
1	Surplus Revaluasi Tanah/Aset Tidak Lancar		
2	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		
3	Beban Pajak Penghasilan Terkait		
4	Penghasilan Komprensif Lain Tahun Berjalan		
	Jumlah (Kerugian) Penghasilan Komprehensif		
XI	JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		

PERUMDA TIRTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	2024	2023
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	- Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa		
	- Koreksi Saldo Laba Rugi		
	- Laba Operasi Sebelum Perubahan Aktivitas Operasi		
	Penyesuaian-penyesuaian		
	- Beban Penyisihan/Amortisasi/Penyusutan		
	- Keuntungan Penyusutan		
	- Keuntungan Pemulihan Penyisihan		
	Jumlah Penyesuaian-penyesuaian		
	Laba Operasi Sebelum perubahan modal kerja		
	- (Kenaikan) / Penurunan Kas Kecil		
	- (Kenaikan) / Penurunan Deposito		
	- (Kenaikan) / Penurunan Surat Berharga		
	- (Kenaikan) / Penurunan Piutang Usaha		
	- (Kenaikan) / Penurunan Piutang Non Usaha		
	- (Kenaikan) / Penurunan Persediaan		
	- (Kenaikan) / Penurunan Pembayaran Dimuka		
	- Kenaikan / (Penurunan) Hutang Usaha		
	- Kenaikan / (Penurunan) Hutang Non Usaha		
	- Kenaikan / (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Kenaikan / (Penurunan) Beban ymh Dibayar		
	- Kenaikan / (Penurunan) Hutang Pajak		
	- Kenaikan / (Penurunan) Sambungan ymh Dipasang		
	- Kenaikan / (Penurunan) Bagian Hutang Jk. Panjang Yg Jt. Tempo		
	Jumlah Arus dari aktivasi operasi		
	- Pembayaran Bunga		
	- Pembayaran pajak penghasilan		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (I)		
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	- Pengurangan (Penambahan) Aktiva Tetap		
	- Pengurangan (Penambahan) Aktiva Tetap dalam Penyelesaian		
	- Pengurangan (Penambahan) Aktiva Tetap Lainnya		
	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi (II)		
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	- Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Lain-lain		

No.	URAIAN	2024	2023
	- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya		
	- Kenaikan / (Penurunan) Kekayaan Pemda yang Dipisahkan		
	- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah Pusat		
	- Pengeluaran Kas untuk Deposito/ Surat Berharga		
	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (III)		
	Kenaikan (Penurunan) Kas dan setara kas		
	Saldo Awal Kas/Bank		
	Saldo Akhir Kas/Bank		
	- Kas / Bank		
	- Kas Kecil		
	- Deposito		

PERUMDA TIRTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

No	Uraian	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Hibah	Cadangan Umum	Saldo Laba Rugi Bersih	Jumlah
1.	Saldo Per 1 Desember 2023						
2.	Laba Tahun Berjalan						
3.	Saldo Per 31 Desember 2023						
4.	Pembagian Laba:						
	a) Deviden						
	b) Dana Sosial						
	c) Cadangan Umum						
	d) Cadangan Bertujuan						
5.	Saldo Per 31 Desember 2024						

BAB X

LAPORAN MANAJEMEN DIREKSI DAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS

10.1 Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Permendagri No.118 Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018, tentang Rencana Bisnis, RKAP, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD

10.2 Laporan Manajemen Direksi

a) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017, Pasal 97

- 1) Laporan Direksi BUMD AM terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
- 2) Laporan bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas / Komisaris
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas / Komisaris
- 4) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM
- 5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima
- 6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana pada ayat (5) disahkan oleh KPM
- 7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis
- 8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri

b) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Pasal 98

- 1) Laporan tahunan BUMD AM paling sedikit memuat :
 - a) Laporan Keuangan
 - b) Laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah

- c) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD AM
 - d) Laporan mengenai tugas pengawasan/Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris selama tahun buku baru lampau
 - e) Nama anggota Direksi dan anggota Pengawas/Komisaris
 - f) Penghasilan anggota Direksi dan anggota Pengawas/Komisaris untuk tahun buku baru lampau
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a) Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya
 - b) Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan
 - c) Laporan Arus Kas
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas
 - e) Catatan Atas Laporan Keuangan

c) Permendagri No.118 Tahun 2018 Pasal 28

- 1) Laporan Direksi BUMD AM terdiri dari :
- a) Laporan bulanan
 - b) Laporan triwulan
 - c) Laporan tahunan
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan

d) Permendagri No.118 Tahun 2018 Pasal 29

- 1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan
- 2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a) Perbandingan RKAP dengan Realisasi RKAP
 - b) Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP
 - c) Rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas

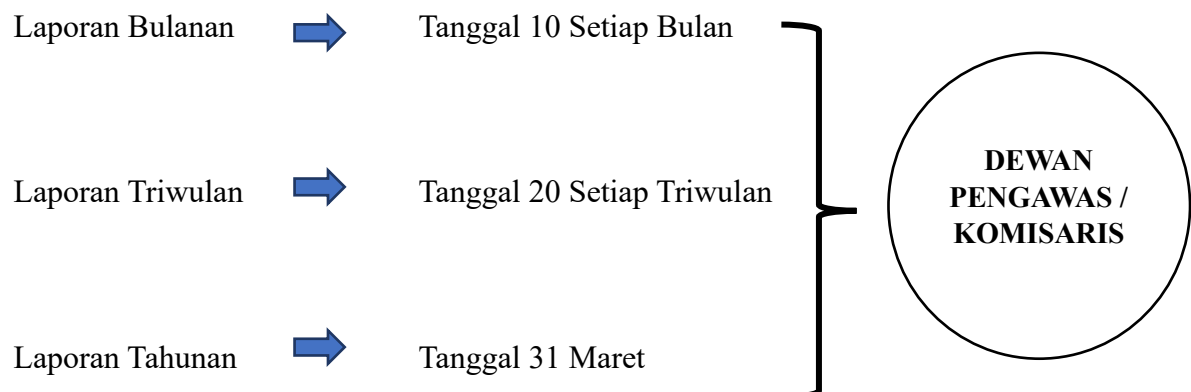
e) Permendagri No.118 Tahun 2018 Pasal 30

- 1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan
- 2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) Perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP
 - b) Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP
 - c) Rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas
- 4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan

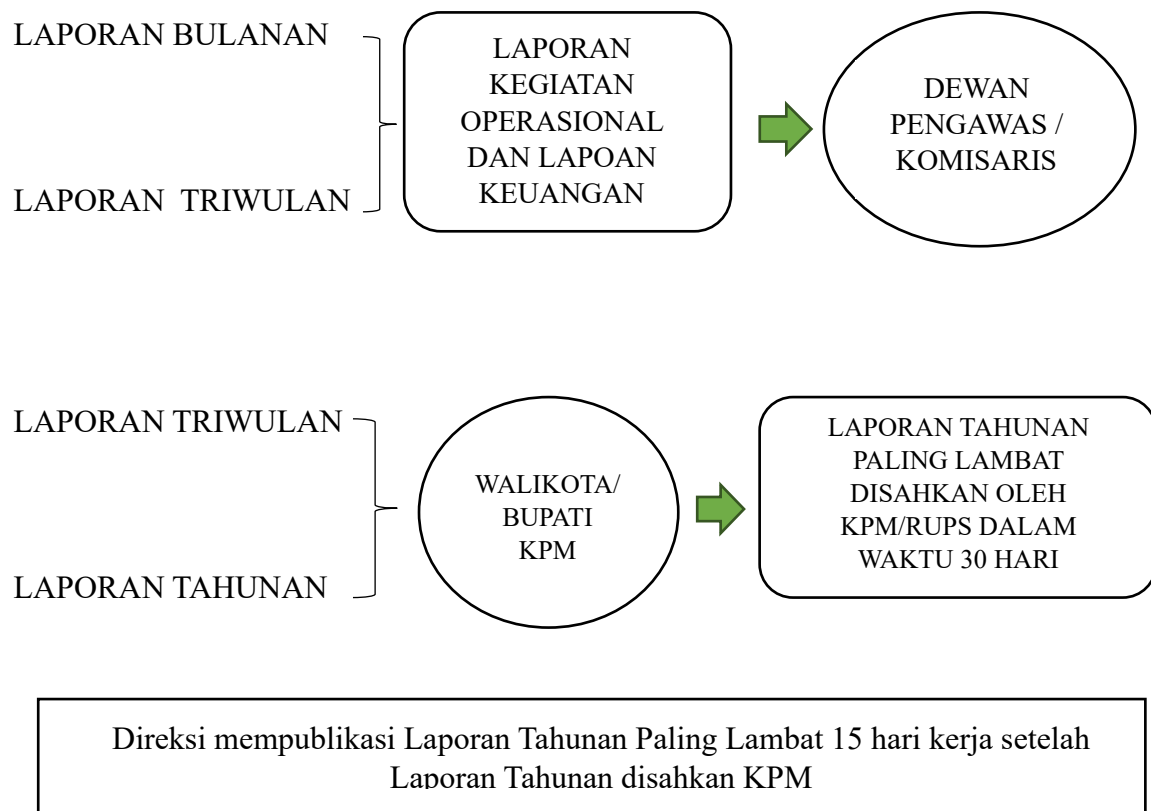
f) Permendagri No.118 Tahun 2018 Pasal 31

- 1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen
- 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima
- 4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM
- 5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri

LAPORAN DIREKSI / DIREKTUR KE DEWAN PENGAWAS / KOMISARIS



LAPORAN DIREKSI / DIREKTUR KEDEWAN PENGAWAS / KOMISARIS DAN KPM



Laporan Tahunan Disampaikan Kepada Menteri

10.3 Laporan Dewan Pengawas

a) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Pasal 96

- 1) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
- 2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM
- 3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- 4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup
- 5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM
- 6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas/Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya tertulis

b) Permendagri No.118 Tahun 2018 Pasal 27

- 1) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM
- 2) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a) Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKAP
 - b) Faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD AM
 - c) Upaya memperbaiki kinerja BUMD AM
- 3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- 4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup
- 5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima

LAPORAN DEWAN PENGAWAS / KOMISARIS KE WALIKOTA / BUPATI (KPM)

